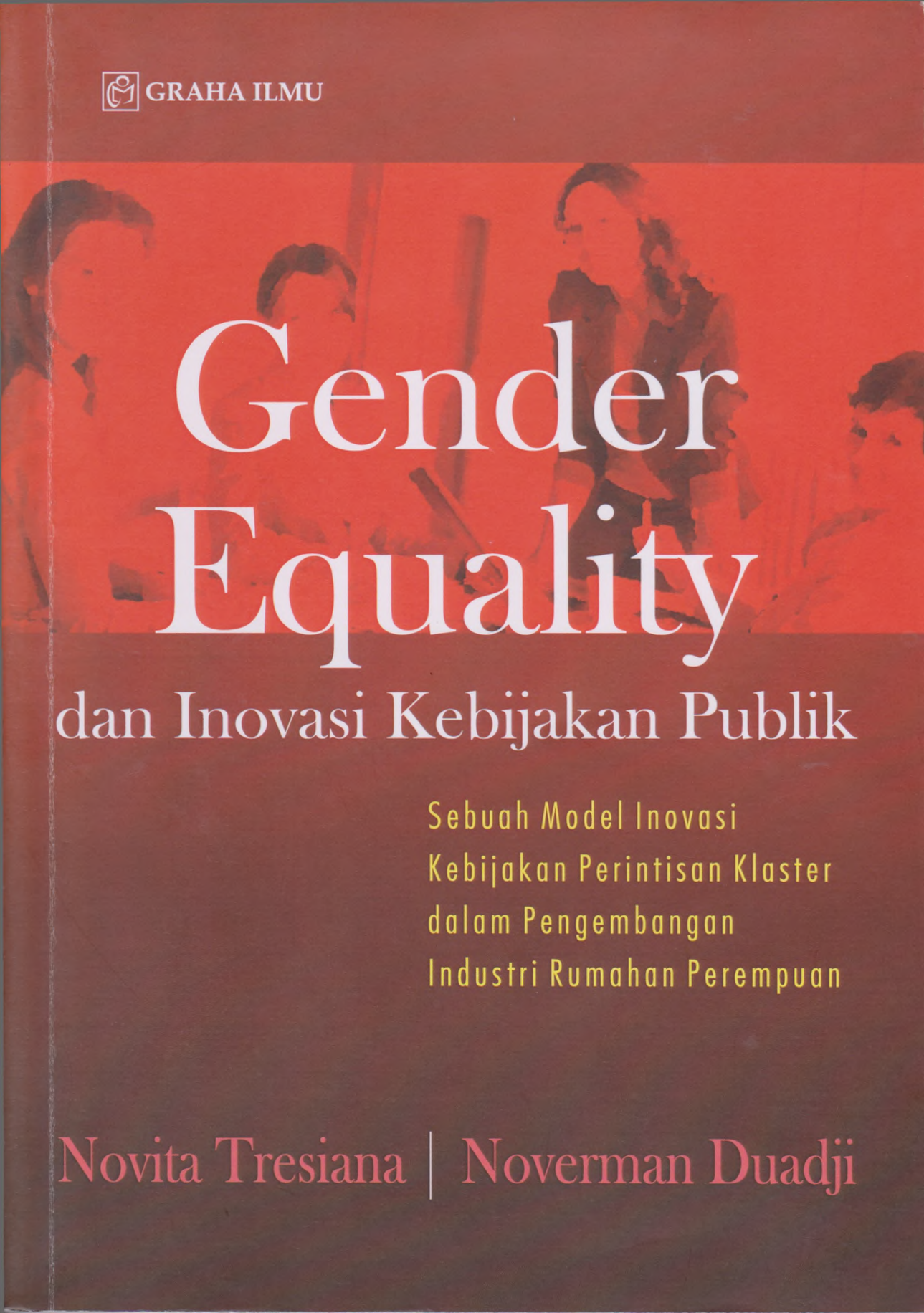


The background of the cover features a photograph of several women in a meeting or workshop setting, overlaid with a semi-transparent red filter. The women are engaged in discussion, with some looking towards the camera and others looking at each other.

Gender Equality

dan Inovasi Kebijakan Publik

Sebuah Model Inovasi
Kebijakan Perintisan Klaster
dalam Pengembangan
Industri Rumahan Perempuan

Novita Tresiana | Noverman Duadji

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Gender Equality dan Inovasi Kebijakan Publik (Sebuah model inovasi kebijakan perintisan klaster dalam pengembangan industry rumahan perempuan).

Penulis : Novita Tresiana, Noverman Duadji (anggota)
NIP : 196911032001121002
Instansi : Fakultas ISIP Universitas Lampung
Publikasi : Buku
ISBN : 978-623-228-013-7
Tanggal Publikasi : 2020
Penerbit : graha ilmu, yogyakarta
Website : http://repository.lppm.unila.ac.id/19994/1/Buku%20Referensi%20Gender%20Equality%20dan%20inovasi%20kebijakan%20Publik_2019.pdf

Mengetahui/Menyetujui :
Dekan FISIP

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001

Bandar Lampung, 20 April 2021

Penulis,

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP '196911032001121002

Mengetahui/Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA
NIP 196505101993032008

DOKUMEN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	31-5-2021
NO INVEN	79/B/B/V/FISIP/2021
JENIS	Referensi
PARAF	st

GENDER EQUALITY DAN INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK; Sebuah Model Inovasi Kebijakan Perintisan Klaster dalam Pengembangan Industri Rumahan Perempuan

oleh Novita Tresiana; Noverman Duadji

Hak Cipta © 2019 pada penulis

Edisi Pertama; Cetakan Pertama ~ 2019



GRAHA ILMU

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283

Telp: 0274-889398; 0274-882262; Fax: 0274-889057;

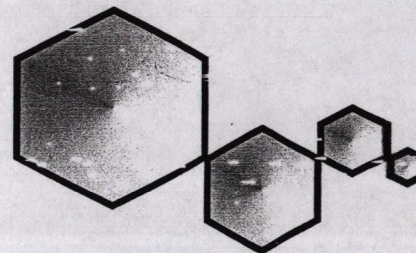
Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-228-013-7

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

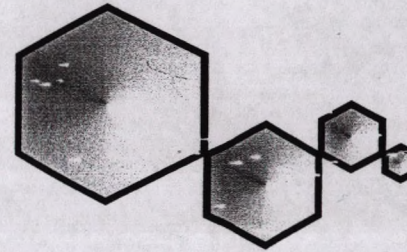
DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xvi + 140; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW; Kertas Cover: Ivori 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding; Laminasi Doff.



UCAPAN TERIMA KASIH

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (DIRJEN RISBANG) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui pembiayaan Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi tahun Anggaran 2019.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung.



KATA PENGANTAR

Penerapan inovasi kebijakan klaster industri rumahan berbasis model *The Triple Helix* menjadi metode percepatan transformasi tercapainya kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan. Adanya Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, yang ditujukan pada pengembangan Industri Rumahan perempuan, dalam konteks pembangunan desa, menjadi relevan mengingat fakta pertumbuhan industri rumahan (IR) yang dikelola perempuan di desa semakin pesat, meski kontribusi pada PDRB rendah, produktivitas pekerjaanya tertinggal, namun diakui industri rumahan yang dikelola perempuan mampu memainkan peran strategis meningkatkan dinamik ekonomi desa, utamanya dalam menyedot luapan tenaga kerja.

Buku ini dimaksudkan sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan implementasi gender equality sebagai salah satu tujuan *Sustainability Development Goals* (SDGs), utamanya mengantisipasi terjadinya pemiskinan perempuan dikarenakan ketidaksetaraan gender di bidang ekonomi. Model klaster dan tahapannya menjadi rujukan untuk keberdayaan perempuan. Keseluruhan bab dalam buku ini berisi uraian tentang fakta empirik yang berasal dari hasil-hasil penelitian dan diperkuat kajian teoritik. Melalui hasil penelitian yang disajikan dalam buku ini, penulis mengajak para pembaca untuk mensitensikan kendala dan kekuatan program program pemberdayaan perempuan di Indonesia selama ini.

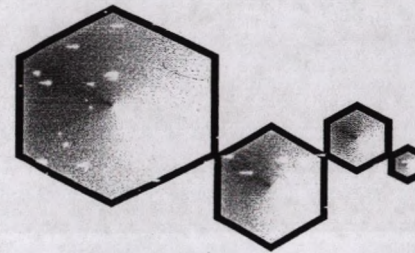
Kehadiran buku ini dihadapan para pembaca diharapkan dapat membuka wawasan tentang pentingnya kolaborasi triple helix antara pihak pemerintah lokal, perguruan tinggi (universitas) dan industri/bisnis. Melalui Kolaborasi ketiganya, basis kapasitas perempuan akan meningkat. Disamping itu juga tujuan tujuan lain berupa kebijakan yang unggul, dukungan infrastruktur, *capacity building* (kapasitas masyarakat) serta inovasi produk-produk dan pemasaran juga akan meningkat.

Pemerintah, universitas dan industri menyadari perlu lebih fokus pada pengembangan pemberdayaan perempuan dan mewujudkan gender equality, sebagai bentuk wujud upaya membangun potensi perempuan kreatif dan potensi daerah, menuju daya saing nasional dan regional melalui pembangunan *culture sustainability management*.

Semoga buku ini berguna bagi para pembaca, khususnya yang memberikan perhatian pada peningkatan kesetaraan gender di Indonesia.

Penulis,

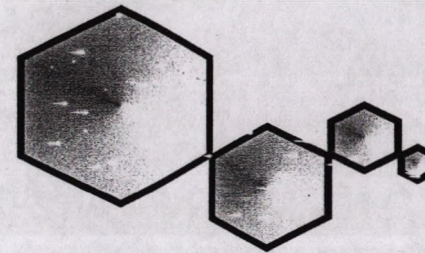
Dr. Novita Tresiana
Dr. Noverman Duadji



DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMAKASIH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Isu Gender dan Reposisi Administrasi Publik	3
1.1.1 <i>Governance</i> , Kebijakan Publik dan Reposisi Administrasi Publik	4
1.1.2 Gender dan Administrasi Publik	10
1.2 Pemetaan Isu Gender Bidang Ekonomi	14
1.2.1 Partisipasi Angkatan Kerja Sektor Ekonomi	14
1.2.2 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri	18
1.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	21
1.3 Gambaran Umum Isi Buku	25
BAB 2 PERSPEKTIF <i>GENDER EQUALITY</i> DAN KEBIJAKAN KLASER INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN	27
2.1 Perspektif <i>Gender Equality</i> dan <i>Sustainable Development Goals</i>	29
2.2 Kebijakan Industri Rumahan Kelompok Perempuan	40
2.2.1 Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Rumahan Kelompok Perempuan di Indonesia	47

2.3	Inovasi Kebijakan Kluster Industri Rumahan	51
2.4	Kesimpulan	62
BAB 3	MODEL RINTISAN KLUSTER INDUSTRI RUMAHAN BERBASIS <i>TRIPLE HELIX</i>: SEBUAH INOVASI KEBIJAKAN	65
3.1	Mengukur Stratifikasi dan Pertumbuhan Kluster Industri Rumahan	67
3.1.1	Peta Wilayah dan Kebijakan Industri Rumahan di Lampung Selatan	67
3.1.2	Peta Basis Kapasitas Pelaku Industri Rumahan Kabupaten Lampung Selatan	86
3.1.3	Peta Pengukuran Perkembangan Kluster Industri Rumahan Kabupaten Lampung Selatan	98
3.1.4	Konektivitas	105
3.2	<i>Triple Helix</i> dalam Pengembangan Kluster Industri Rumahan Perempuan	107
3.3	Model Kebijakan Rintisan Kluster Industri Rumahan Berbasis <i>The Triple Helix</i> dalam Mewujudkan <i>Gender Equity</i> Perempuan	109
3.4	Kesimpulan	117
BAB 4	PERAN JARINGAN SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN KLUSTER INDUSTRI RUMAHAN	119
4.1	Jaringan Sosial	119
4.2	Jaringan Sosial dalam Kluster Industri Rumahan Lampung Selatan	122
4.2.1	Jaringan Sosial Untuk Mendapatkan Tenaga Kerja	123
4.2.2	Jaringan Sosial Untuk Mendapatkan Sumberdaya Ekonomi	123
4.2.3	Keberlanjutan Jaringan Sosial	125
4.3	Kesimpulan	126
BAB 5	PENUTUP	129
	DAFTAR PUSTAKA	133
	TENTANG PENULIS	139

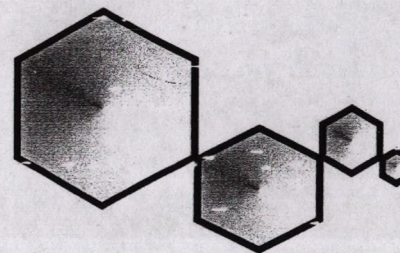


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Empat Institusi Strategis Administrasi Publik	12
Gambar 1.2	Peran Strategis Administrasi Publik dalam mewujudkan <i>Gender Equality</i>	12
Gambar 1.3	Model Peta Dasar Pengamatan Gender pada Administrasi Publik	13
Gambar 1.4	Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, yang bekerja seminggu yang lalu dan pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota dan golongan umur di Provinsi Lampung, Agustus 2018	16
Gambar 1.5	Persentase Tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018	19
Gambar 1.6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Menurut Jenis Kelamin Pemilik Usaha dan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung 2018	24
Gambar 2.1.	Pekerjaan informal: Hirarki penghasilan dan resiko kemiskinan menurut status kerja dan jenis kelamin	41
Gambar 2.2.	Posisi Industri Rumahan	44
Gambar 2.3.	Model Proses Pengembangan IR	46
Gambar 2.4.	Desain Pengembangan IR	46
Gambar 2.5.	Kategori IR Tahun 2016 dan 2017	49

Gambar 2.6. Gambar Siklus Perkembangan Klaster	57
Gambar 3.1. Peta Kabupaten Lampung Selatan	68
Gambar 3.2. Luas dan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan	69
Gambar 3.3 <i>Triple Helix Field Interaction Model</i>	108
Gambar 3.4 <i>Circulation of Individuals In The Triple Helix.</i>	108
Gambar 3.5. Model Kebijakan Rintisan Klaster Berbasis <i>The Triple Helix</i>	111

-oo0oo-



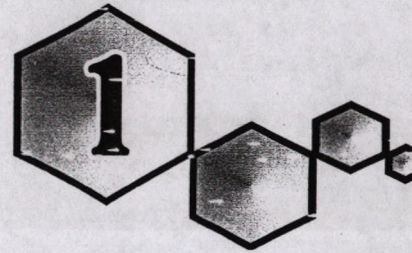
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Gender Equality di Indonesia	35
Tabel 2.2. Best Practice IR Daerah	49
Tabel 3.1. Indikator Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan	70
Tabel 3.2. Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan	71
Tabel 3.3. Perkembangan Tenaga Kerja Kab. Lamsel menurut Lapangan Kerja Utama dan Jenis Kelamin 2013-2015	71
Tabel 3.4. Indikator Ketenagakerjaan Kecamatan Rajabasa 2014	72
Tabel 3.5. Batas Desa Canti dan Waymuli Timur	72
Tabel 3.6. Perbandingan Kondisi Umum Desa Canti dan Desa Waymuli Timur	73
Tabel 3.7. Kondisi Pemerintahan Desa	73
Tabel 3.8. Struktur Mata Pencaharian Desa Waymuli Timur	73
Tabel 3.9. Struktur Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin Masyarakat Desa Canti	74
Tabel 3.10. Jenis Kelamin Pelaku IR	75
Tabel 3.11. Usia Pelaku IR	76
Tabel 3.12. Tingkat Pendidikan Pelaku IR	76
Tabel 3.13. Kepemilikan Pengalaman Sebagai TKI/TKW di Luar Negeri	77
Tabel 3.14. Susunan Tim Pelaksana Pengembangan IR Lampung Selatan	77
Tabel 3.15. Pemetaan Potensi Pengembangan IR dan Analisis Kebutuhan Pengembangan IR di Kabupaten Lampung Selatan	79

Tabel 3.16. Kelas Usaha	87
Tabel 3.17. Lokasi Responden	88
Tabel 3.18. Usia Responden	88
Tabel 3.19. Jenis Kelamin Responden	88
Tabel 3.20. Tingkat Pendidikan Responden	88
Tabel 3.21. Kepemilikan Pengalaman Sebagai TKI/TKW di Luar Negeri	89
Tabel 3.22. Jenis Produksi	90
Tabel 3.23. Jumlah Modal Usaha	91
Tabel 3.24. Sumber Modal Usaha	91
Tabel 3.25. Teknologi Produksi	92
Tabel 3.26. Jumlah Tenaga Kerja	92
Tabel 3.27. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kelompok Usia	93
Tabel 3.28. Kepemilikan Pengalaman Pelatihan	93
Tabel 3.29. Jumlah Upah Pekerja Industri Rumahan	94
Tabel 3.30. Cara Penjualan Produksi	95
Tabel 3.31. Wilayah Pemasaran	95
Tabel 3.32. Cara Pembayaran	96
Tabel 3.33. Lama Usaha	96
Tabel 3.34. Pola Produksi	96
Tabel 3.35. Status Tempat Usaha	97
Tabel 3.36. Fasilitas Pendukung	97
Tabel 3.37. Inisiator Klaster IR	98
Tabel 3.38. Bentuk Kelembagaan	98
Tabel 3.39. Dampak&Manfaat Kegiatan Kelembagaan	99
Tabel 3.40. Kepemilikan Izin Usaha	100
Tabel 3.41. Lama Usaha	100
Tabel 3.42. Pola Produksi	100
Tabel 3.43. Status Tempat Usaha	101
Tabel 3.44. Kategori Usaha	101
Tabel 3.45. Kelas Usaha	102
Tabel 3.46. Cara Penjualan Produksi	102
Tabel 3.47. Wilayah Pemasaran	102
Tabel 3.48. Cara Pembayaran	103
Tabel 3.49. Nilai Tambah	103
Tabel 3.50. Tingkat Keuntungan	104

Tabel 3.51. Perkembangan Orientasi Pasar	105
Tabel 3.52. Koneksi Usaha	105
Tabel 3.53. Kerjasama Vertikal&Horizontal	106
Tabel 3.54. Spesialisasi Usaha IR	106
Tabel 3.55. Lembaga Pendukung	107

-oo0oo-



PENDAHULUAN

Gender equality menjadi point penting pembangunan berkelanjutan, yang menggambarkan kondisi, kontribusi dan kemanfaatan pembangunan, dilakukan dan diterima secara setara perempuan dan laki-laki sehingga tercapai keberdayaan ekonomi perempuan (Tresiana dan Duadji, 2019). Kata "gender" sering diidentikkan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai pemberian dari Tuhan yang bersifat kodrati. Echols dan Shadiy (1983), menggambarkan secara etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Gender juga diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Dari literatur tersebut kata gender diartikan sebagai perbedaan fisik dan perilaku.

Terkait konsep gender, tidak terlepas dari konsep kesetaraan dan keadilan gender (*gender equity*). Tujuan dari merekonstruksi konsep gender adalah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Nugroho (2008) memahami kesetaraan gender sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Tujuannya agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. *Gender equity*, merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Adanya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak

adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan. Pada akhirnya laki-laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.

Dalam kesejarahan, *gender equality* telah diperjuangkan sejak abad ke-17, yang hingga saat ini dominasi fakta menunjukkan bahwa perempuan masih mengalami diskriminasi dalam berbagai hal, termasuk bidang ekonomi. Oleh karena itu, isu *gender equality* merupakan salah satu isu penting yang masih perlu diperjuangkan. Pada tahun 2000, UN menetapkan *gender equality* sebagai salah satu tujuan pembangunan millenium/*Millenium Development Goals* (MDGs). *Gender equality* sebagai salah satu isu utama pembangunan tercantum dalam tujuan ke-3 MDGs yakni mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 2015, MDGs berakhir dengan menyisakan fakta bahwa masih terdapat target-target yang belum tercapai baik secara global maupun di Indonesia khususnya dalam hal kesetaraan gender. Seiring dengan berakhirnya program MDGs pada tahun 2015, UN membuat program baru sebagai kelanjutan dari MDGs yakni tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs terdiri dari 17 tujuan yang direncanakan untuk 15 tahun ke depan atau sering dikenal dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030. Program ini berlaku baik bagi negara maju maupun negara berkembang, termasuk Indonesia. *Gender equality* menjadi salah satu dari 17 tujuan SDGs. Isu ini tercantum dalam tujuan ke-5 yakni mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan seluruh perempuan. Dalam tujuan ini, SDGs berusaha memastikan agar masalah-masalah yang terjadi pada perempuan seperti diskriminasi gender, kekerasan seksual dan eksploitasi dapat dihentikan.

Responsivitas terhadap tujuan kelima SDGs, maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan paket Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Salah satu paket kebijakan ditujukan pada aktivitas skala usaha mikro atau Industri Rumahan, sebelum dilakukan pengembangan industri rumahan (IR) secara masal. Dalam konteks desa, kebijakan ini menjadi relevan mengingat fakta pertumbuhan industri rumahan (IR) yang dikelola perempuan di desa semakin pesat, meski kontribusi pada PDRB rendah, produktivitas pekerjaanya tertinggal, namun IR mampu memainkan

peran strategis meningkatkan dinamik ekonomi desa, utamanya dalam menyedot luapan tenaga kerja, namun posisinya kurang diperhitungkan dalam memainkan peran bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan model pengembangan industri rumahan (IR) di daerah harus dirubah, yang bukan hanya ditujukan untuk penanggulangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, pencegahan migrasi untuk menjadi TKI dengan pekerjaan informal, serta pencegahan *trafficking*, namun juga pengembangan inovasi kebijakan, sistem sosial budaya ke arah ketercapaian *gender equality* (kesetaraan ekonomi laki-laki dan perempuan).

Permasalahan yang akan dikaji dalam buku ini adalah bagaimana upaya-upaya yang relevan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan, yang mampu membantu penanggulangan kemiskinan perempuan, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, pencegahan migrasi untuk menjadi TKI/TKW dengan pekerjaan informal, serta pencegahan *trafficking*. Selain itu juga, bagaimana strategi inovasi yang dilakukan bagi ketercapaian *gender equality* (kesetaraan ekonomi laki-laki dan perempuan).

Pada bab pendahuluan ini diuraikan pentingnya memahami gender, isu-isu gender dan relasinya dalam administrasi publik. Bab ini juga mendeskripsikan reposisi administrasi publik untuk memahami isu gender menjadi sebuah perspektif agar pemerintah, cendekiawan dan swasta hadir, untuk melahirkan inovasi kebijakan. Uraian pada bab pendahuluan ini sebagai *entry point* untuk mendudukkan pemahaman *governance* sebagai tool dan media melahirkan inovasi kebijakan publik yang berkarakter kesetaraan dan keadilan bagi semua elemen masyarakat, terutama kelompok perempuan. Bab ini juga menggambarkan isu-isu krusial gender bidang ekonomi, yang berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan (*trust*) publik, terhadap hasil-hasil pembangunan.

Pada bagian akhir pendahuluan, akan diuraikan gambaran umum keseluruhan isi buku dengan maksud untuk menghantarkan pembaca pada pembahasan yang lebih rinci.

1.1 ISU GENDER DAN REPOSISI ADMINISTRASI PUBLIK

Memasuki abad 21 administrasi publik memasuki *nation* baru. Administrasi publik bukan sekadar instrumen birokrasi negara, fungsinya

lebih dari itu administrasi publik sebagai instrumen kolektif, sebagai sarana publik untuk menyelenggarakan tatakelola kepentingan bersama dalam jaringan kolektif untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang telah disepakati. Pergeseran ini menandai, administrasi publik telah memasuki wilayah peran publik yang lebih substantif. Reposisi ini sampai taraf tertentu juga sebagai anti klimak dari praktek administrasi publik yang selama ini berlangsung luas, yang menempatkan segala urusan publik sebagai bagian urusan negara, sarwa negara. Wilayah administrasi publik demikian ini oleh Frederickson (1997) disebut administrasi publik sebagai *governance*. Dengan kata lain administrasi publik sebagai *governance* pada dasarnya administrasi publik yang mempunyai lokus sinergi kiprah pada wilayah publik dengan menyertakan pelaku-pelaku yang genuinely dari publik dengan fokus agenda *interest* publik yang memang menjadi kebutuhannya (*common interest*).

1.1.1 Governance, Kebijakan Publik dan Reposisi Administrasi Publik

Modernisasi Administrasi Publik (AP) adalah merupakan faktor terpenting yang memungkinkan demokratisasi dan modernisasi negara berlangsung secara efektif dan efisien di abad 21 ini, abad yang sering dikatakan sebagai *American Century* (Frederickson, 2000). Globalisasi yang melanda seluruh bangsa tanpa kecuali disertai dengan revolusi informasi yang besar telah menempatkan bangsa di dunia hidup dalam sebuah ruang tanpa batas (*borderless*). Ditengah situasi demikian manajemen negara tak dapat lagi mengandalkan cara-cara konvensional. Demikian pula peran administrasi publik dalam keadaan demikian, tak dapat lagi mementaskan pertentangan kepentingan negara versus rakyat, atau pergulatan kepentingan dalam drama politik. Administrasi publik diharuskan melakukan reposisi atau deformasi kedalam sebuah tatanan kekinian. Menurut Frederickson (1997), ada beberapa alasan mendasar mengapa administrasi publik harus melakukan proses ini. *Pertama*, diantara fenomena penting globalisasi ini administrasi publik kontemporer dihadapkan pada melemahnya batas-batas yurisdiksi dalam berbagai bentuk. Bangsa, negara, provinsi, kota atau bahkan desa telah kehilangan batas-batas fisikalnya. Melemahnya batas yurisdiksi tersebut bahkan telah mengarah menyatunya berbagai kawasan, tanpa pembatas. Revolusi telekomunikasi telah menghilangkan rambu dan batas

fisikal yang pada akhirnya juga merubah berbagai corak hubungan sosial antar manusia, mereka dipautkan dalam batas lintas negara, lintas samudra dalam ruang global. Dalam kondisi demikian, bagaimana memahami kepentingan publik, menjaga kongruen kepentingan dari berbagai aktor seraya mengontrol hubungan yang terjadi. *Kedua*, disartikulasi negara, melembeknya peran negara dalam menangani persoalan-persoalan kompleks yang sumbernya beragam. Sehingga sebuah negara tak dapat secara mandiri menanganinya secara baik. Contohnya adalah munculnya hujan asam, menipisnya lapisan ozon di atas benua Amerika dan Australia, bukan semata kesalahan dari negara tersebut tapi juga bersumber dari perilaku publik dari negara-negara lain. *Ketiga*, makin maluasnya makna kata "publik". Dalam sejarah administrasi publik, yang disebut dengan publik itu identik dengan negara (*government*). Ungkapan publik kini tak lagi terbatas pada negara tetapi juga melingkupi seluruh organisasi-organisasi non negara atau juga institusi-institusi yang secara langsung melakukan kontrak kerja dengan negara untuk mewujudkan tugas publik. Organisasi parastatal, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Perdebatan tentang *good governance* dan *good government* adalah merupakan tema penting di era globalisasi ini. Berbagai bantuan dan kerjasama multi lateral tak jarang mensyaratkan dua tema tersebut dapat dihadirkan dalam sistem politik dan kebijakan publik sebuah negara. Tak terkecuali IMF, Bank Dunia, UNDP juga memberikan restriksi luas apabila negara resepien tak dapat mengintegrasikan *good governance* dan *good government* dalam pemerintahannya. Banyak analis menyatakan bahwa dengan prasarat seperti itu ada kesan, negara donor ataupun lembaga-lembaga asing telah mendeekte berbagai idiom politik, dan kebijakan publik kepada negara-negara berkembang. Dan bahkan acapkali negara-negara dana lembaga donor dipersalahkan sebagai agen *neo-imperialis* yang melakukan penjajahan dalam format baru.

Perkembangan istilah dan makna kata *governance* telah menjadi konsep payung dari sejumlah terminologi dalam kebijakan dan politik. Pierre, Jon and B. Guy Peters, (2000) mengutip beberapa tulisan yang seringkali digunakan secara serampangan untuk menjelaskan: jaringan kebijakan (*policy networks*), manajemen publik (*public management*), koordinasi antar sektor ekonomi, kemitraan publik-privat, *corporate governance* dan *good governance*

yang acapkali menjadi syarat utama yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga donor asing.

Istilah *governance* dalam *nomenclature* ilmu politik berasal dari bahasa Prancis *gouvernance* sekitar abad 14. Pada saat itu istilah ini lebih banyak merujuk pada pejabat-pejabat kerajaan yang menyelenggarakan tata kelola pemerintahan dibanding bermakna proses untuk memerintah atau lebih populer disebut "steering". Dalam kontes reposisi administrasi publik Frederickson (1997) memberikan interpretasi *governance* dalam empat terminologi: Pertama, *Governance*, menggambarkan bersatunya sejumlah organisasi atau institusi baik itu dari pemerintah atau swasta yang dipertautkan (*linked together*) secara bersama untuk mengurus kegiatan-kegiatan publik. Mereka dapat bekerja secara bersama-sama dalam sebuah jejaring antar negara. Karenanya terminologi pertama ini, *governance* menunjuk *networking* dari sejumlah himpunan-himpunan entitas yang secara mandiri mempunyai kekuasaan otonom. Atau dalam ungkapan Frederickson adalah perubahan citra sentralisasi organisasi menuju citra organisasi yang delegatif dan terdesentralisir. Mereka bertemu untuk melakukan perembukan, merekonsiliasi kepentingan sehingga dapat dicapai tujuan secara kolektif atau bersama-sama. Kata kunci terminologi pertama ini adalah *networking*, desentralisasi.

Kedua, *Governance* sebagai tempat berhimpunnya berbagai pluralitas pelaku - bahkan disebut sebagai hiper pluralitas - untuk membangun sebuah konser antar pihak-pihak yang berkaitan secara langsung atau tidak (*stake holders*) dapat berupa : partai politik, badan-badan legislatif dan divisinya, kelompok kepentingan, untuk menyusun pilihan-pilihan kebijakan seraya mengimplementasikan. Hal penting dalam konteks ini adalah mulai hilangnya fungsi kontrol antar organisasi menjadi, menyebarnya berbagai pusat kekuasaan pada berbagai pluralitas pelaku, dan makin berdayanya pusat-pusat pengambilan keputusan yang makin mandiri.

Sebagaimana dijelaskan Muhadjir (2000a) *Governance* dalam konteks kebijakan adalah "kebijakan publik tidak harus berarti kebijakan pemerintah, tetapi kebijakan oleh siapapun (pemerintah, semi pemerintah, perusahaan swasta, LSM, komunitas keluarga) atau jaringan yang melibatkan seluruhnya tersebut untuk mengatasi masalah publik yang mereka rasakan. Kalaupun kebijakan publik diartikan sebagai apa yang dilakukan pe-

merintah, kebijakan tersebut harus diletakkan sebagai bagian dari network kebijakan yang melibatkan berbagai komponen masyarakat tersebut. Dengan demikian terminologi kedua ini menekankan, *governance* dalam konteks pluralisme aktor dalam proses perumusan kebijakan dan implementasi kebijakan. Beberapa pertanyaan kunci yang penting: seberapa jauh kebijakan yang dilakukan pemerintah merespon tuntutan masyarakat, seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut, seberapa jauh masyarakat dilibatkan dalam proses implementasi, seberapa besar inisiatif dan kreativitas masyarakat tersalurkan, seberapa jauh masyarakat dapat mengakses informasi menyangkut pelaksanaan kebijakan tersebut, seberapa jauh hasil kebijakan tersebut memuaskan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kata kunci dalam terminologi kedua ini adalah pluralitas aktor, kekuasaan yang makin menyebar, perumusan dan implementasi kebijakan bersama.

Ketiga, *Governance* berpautan dengan kecenderungan kekinian dalam literatur-literatur manajemen publik utamanya spesialisasi dalam rumpun kebijakan publik, dimana relasi multi organisasional antar aktor-aktor kunci terlibat dalam implementasi kebijakan. Kerjasama para aktor yang lebih berwatak politik, kebersamaan untuk memungut resiko, lebih kreatif dan berdaya, tidak mencerminkan watak yang kaku utamanya menyangkut organisasi, hirarki, tata aturan. Dalam makna lebih luas *governance* merupakan jaringan (*network*) kinerja diantara organisasi-organisasi lintas vertikal dan horisontal untuk mencapai tujuan-tujuan publik. Kata kuncinya jaringan aktor lintas organisasi secara vertikal dan horisontal.

Keempat, terminologi *Governance* dalam konteks administrasi publik kental dengan sistem nilai-nilai kepublikan. *Governance* menyiratkan sesuatu hal yang sangat penting. *Governance* menyiratkan sesuatu keabsahan. *Governance* menyiratkan sesuatu yang lebih bermartabat, sesuatu yang positif untuk mencapai tujuan publik. Sementara terminologi pemerintah (*government*) dan birokrasi direndahkan, disepelkan mencerminkan sesuatu yang lamban kurang kreatif. *Governance* dipandang sebagai sesuatu yang aseptabel, lebih absah, lebih kreatif, lebih responsif dan bahkan lebih baik segalanya.

Dari keempat terminologi tersebut dapat ditarik pokok pikiran bahwa *governance* dalam konteks administrasi publik adalah merupakan proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang

dilakukan oleh aktor: pluralitas organisasi, dengan sifat hubungan yang lebih luwes dalam tataran vertikal dan horisontal, disemangati oleh nilai-nilai kepublikan antara lain keabsahan, responsif, kreatif. Dilakukan dalam semangat kesetaraan dan *networking* yang kuat untuk mencapai tujuan publik yang akuntabel.

Berdasarkan pemikiran ini *governance* adalah merupakan sebuah ekspansi *notion* dari makna administrasi publik yang semula hanya diartikan sebagai hubungan struktural antara aktor-aktor yang ada dalam *mainstream* negara. Secara tegas Milward dan O'Toole (dalam George H. Frederickson, 2000) memberikan interpretasi *governance* dalam dua aras penting: Pertama, *governance* sebagai studi tentang konteks struktural dari organisasi atau institusi pada berbagai level (*multi layered structural context*). Kedua, *governance* adalah studi tentang *network* yang menekankan pada peran beragam aktor sosial dalam sebuah jejaring negosiasi, implementasi, dan pembagian hasil. Sementara itu dari perspektif strukturalis sebagaimana argumentasi Lynn, Heinrich dan Hill yang dikutip oleh Frederickson (1997), elemen penting *notion governance* meliputi aras teori kelembagaan (*institutionalism*) dan teori jaringan (*network theory*):

Pertama, *governance* berkaitan dengan suatu level kelembagaan (*institutional level*). Matra ini meliputi *sistem nilai*, peraturan-peraturan formal atau informal dengan tingkat pelebagaan yang mantap: bagaimana hirarki ditata, sejauhmana batas-batasnya disepakati, bagaimana prosedurnya, apa nilai-nilai kolektif yang dianut rejim. Yang termasuk dalam konsepsi ini antara lain: hukum administrasi, dan bentuk peraturan legal lainnya, teori-teori yang berkaitan dengan bekerjanya birokrasi dalam skala luas, teori politik ekonomi, teori kontrol politik terhadap birokrasi. Pada gatra ini terdapat sejumlah teori yang sangat penting: teori kelembagaan (*institutional theory*), teori perburuan rente (*rent seeking*), teori kontrol dari birokrasi, dan dan teori tujuan dan filosofi pemerintah. Pada bagian ini teori *governance* difokuskan pada tataran-tataran sistem nilai (*value*).

Kedua, pada level organisasi dan managerial *governance* akan berpautan dengan biro-biro hirarki, departemen, komisi dan agen-agen pemerintah atau juga organisasi-organisasi yang menjalin hubungan kerja dengan pemerintah. Pada tataran ini agenda-agenda: kebebasan dan mandirian administratif, takaran-takaran unjuk kerja dalam proses pelayanan publik,

menjadi isu yang penting. Teori-teori yang signifikan untuk menjelaskan fenomena ini antara lain: *principal-agent theory*, *transaction cost analysis theory*, *collective action theory*, *network theory*. Intinya, pada terminologi kedua ini *governance* diproyeksikan pada peran mengakselerasikan kepentingan-kepentingan publik (*public interest*) dalam suatu *network* antar institusi.

Ketiga, pada level teknis, bagaimana nilai-nilai dan kepentingan publik sebagaimana telah dikemukakan pada pendekatan pertama dan kedua harus *dioperasionalkan* dalam tindakan-tindakan riil. Isu-isu tentang profesionalisme, standar kompetensi teknis, akuntabilitas, dan kinerja (*performance*) sangat penting dalam konteks ini. Teori-teori yang relevan untuk tema ini antara lain: ukuran-ukuran efesiensi, teknis manajemen budaya organisasi, kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan ukuran. Dengan demikian pada level ini *governance* lebih banyak berurusan dengan implementasi kebijakan publik pada level operasional (*public policy at the street level*).

Interpretasi teori *governance* menurut terminologi di atas merupakan reduksi dari dua pendekatan utama, yaitu teori institusionalisme (*institutionalism*) dan teori jaringan (*network*). *Governance* adalah merupakan pum-punan dari berbagai organisasi-organisasi publik dimana negara hanya menjadi salah satu elemennya disamping elemen yang lain yang menjalin sebuah *networking* secara kolektif. Disamping itu karena *governance* memum-pun sejumlah pluralitas organisasi maka kehadirannya juga dibangun oleh berbagai sistem nilai dan norma yang dibawa pada tataran supra organisasi, inter organisasi dan antar organisasi. Dalam konteks ini maka *governance* sesungguhnya sarat dengan ikatan-ikatan sistem nilai yang tersedia dalam deposit sistem sosialnya. Administrasi publik dalam konteks ini tidak netral dengan berbagai realitas yang berkembang di ekologiannya. Sistem nilai dapat saja berupa nilai-nilai formal yang dikonstruksi oleh pranata-pranata hirarkis dan rasional tapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai varian sistem nilai yang oleh Francis Fukuyama (1999), order sosial demikian juga dibangun secara spontan dan arasional oleh publik. Justeru nilai-nilai spontan arasional yang merupakan salah satu elemen kapital sosial inilah yang menyebabkan, modernisasi dan demokratisasi negara-negara modern di dunia dapat lebih cepat dibanding yang lain. Kini kita telah memasuki sebuah periode kesadaran baru, bahwa ciri utama interaksi peradaban masyarakat modern

tidak hanya ditentukan oleh order yang bersifat publik, formal, dan bercorak legal tetapi lebih dari itu juga ditentukan oleh peran-peran yang sifatnya dapat dinegosiasikan (*negotiable*), bersifat labil, kontur-kontur yang bersifat sangat privat, yang disebut sebagai nilai-nilai informal (Adam B. Seligman, 1998)

1.1.2 Gender dan Administrasi Publik

Konsep gender dan administrasi publik memiliki keterkaitan yang sangat erat. Melalui tulisan Maria Mies tentang housewifization (dalam Nugroho, 2008) terdeskripsi: "*proses dimana wanita diberi definisi sosial sebagai ibu rumah tangga (housewife), yang tergantung pada suami untuk penghidupan mereka, terlepas apakah mereka secara de facto ibu rumah tangga atau bukan. Definisi sosial wanita sebagai ibu rumah tangga adalah pasangan definisi sosial pria sebagai pencari nafkah terlepas dari kontribusi nyata yang mereka berikan kepada rumah tangga dan keluarga*". Kontruksi ini kemudian dibentuk melalui kebijakan publik dan implementasi kebijakan publik. Konsep ini diinspirasi oleh pemikiran Michael Foucault dalam History Sexuality yang mengatakan, bahwa sex tidak hanya dilihat sebagai sarana reproduksi atau sebagai sumber kesenangan, tapi juga sebagai pusat keberadaan manusia. Artinya, makna akan kebenaran diletakkan diantara basis perbedaan laki-laki dan perempuan. Wacana gender bertemu dengan kebijakan publik, atau dalam konteks yang lebih luas wacana gender bertemu dengan administrasi publik sebagai lembaga pembuat dan pelaksana kebijakan publik.

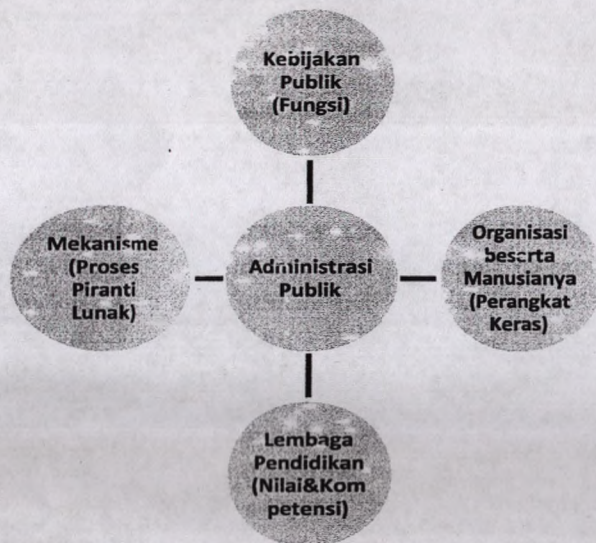
Isu gender dalam administrasi publik setidaknya dapat ditelusuri dari sejarah kemunculan isu-isu yang berkenaan dengan peran, hak, kewajiban perempuan dalam politik. *Pertama*, tulisan Joni Lovenduski (dalam Mary dan Kogan, 1992), yang menyebut *male-dominated* yang menggambarkan keterbelakangan perempuan dalam politik, dipandang secara luas kurang tertarik, kurang aktif dan tidak kompeten dibanding laki-laki. Paralel dengan itu, fakta partisipasi perempuan dalam politik memang dibatasi, sehingga data kondisi politik inilah yang menjadi data umum yang digeneralisasikan sebagai stereotipe inferioritas perempuan dalam politik. Kemudian kemajuan politik demokrasi didukung munculnya desakan pemerintahan yang baik, membuka peluang bagi perempuan untuk masuk politik dan menduduki posisi-posisi terbaik dalam politik. Salah satu

mesin yang menjalankan kehidupan politik adalah administrasi negara. Keterbukaan politik terhadap perempuan, atas meningkatnya kesetaraan gender dalam politik memiliki konsekuensi logis bagi keterbukaan administrasi publik terhadap perempuan atau kesetaraan gender dalam administrasi publik. Terlihat masuknya isu kesetaraan gender didalam administrasi publik, baik dalam lingkup yang paling sempit, yaitu birokrasi, hingga lingkup terbesar, yaitu *global governance*.

Kedua, kondisi kontradiktif pada tahun 1992, *gender equality* dalam administrasi publik telah menjadi wacana penting, terutama dengan dimasukkannya isu gender dalam ensiklopedia pemerintahan dan politik yang diterbitkan di Eropa (Hawkesworth dan Kogan, 1992), maupun oleh Bank Dunia (World Bank, 2000), maupun studi *global governance* di tahun 2000 (O'Brien, Robert et al, 2000). Sayangnya secara umum isu gender dalam administrasi publik belum menjadi isu pokok dalam administrasi publik, antara lain belum ditunjukkannya belum hadirnya isu gender dalam salah satu pegangan umum administrasi publik "*Hanbook of Public Administration*" yang diterbitkan di tahun 1996. Minimnya wacana gender dan administrasi publik, menjadi salah satu pendorong dari peneliti untuk mengembangkan wacana teoritis tentang gender dalam administrasi publik, karenanya perdebatan dan diskusi gender dalam politik perlu dikembangkan dalam diskusi gender dalam mesin politik yang penting, yaitu administrasi publik.

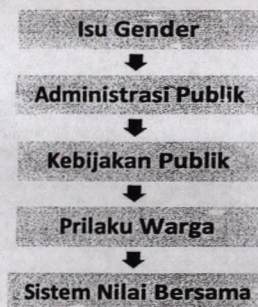
Mengaitkan isu gender dalam institusi strategis administrasi publik menjadi penting dalam konteks reposisi administrasi publik. Nugroho (2008) memberikan gambaran bagaimana isu gender masih belum menjadi milik masyarakat, melainkan masih milik pemerintah, dalam hal ini kementerian tertentu. Kegagalan menjelaskan gender kepada publik dengan cara publik disebabkan karna gender selama ini dijelaskan kepada publik dengan cara para pakar dan aktivis gender dengan kerangka yang bertentangan dengan kerangka pemikiran publik. Akhirnya gender menjadi isu embel-embel atau periferal. Secara khusus administrasi publik memiliki empat institusi atau lembaga strategis. *Pertama*, kebijakan publik yang merupakan tugas pokok dari setiap organisasi publik, dengan analogi "fungsi". *Kedua*, organisasi-organisasi publik, yang menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi publik, dengan analogi "perangkat (keras)". *Ketiga*, Lembaga yang mempersiapkan para administrator publik, dengan analogi "penyuplai nilai

dan kompetensi". *Keempat*, lembaga sistem atau mekanisme administrasi publik yang merupakan piranti lunak dari organisasi publik, dianalogikan dengan "proses".



Sumber: Nugroho, 2008

Gambar 1.1 Empat Institusi Strategis Administrasi Publik



Sumber: Nugroho, 2008

Gambar 1.2 Peran Strategis Administrasi Publik dalam mewujudkan Gender equality

Administrasi publik sangat strategis peranannya dalam ketercapaian *gender equality*, karena fungsi pokoknya adalah merumuskan kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mengikat seluruh warga tanpa kecuali. Dengan menjadikan administrasi publik sensitif gender, maka perspektif *gender equality* dapat berjalan cepat dan efektif.



Sumber: Nugroho, 2008

Gambar 1.3 Model Peta Dasar Pengamatan Gender pada Administrasi Publik

Gambar 1.3 merupakan model pemetaan yang dikembangkan dari model *matrix strategic position and action evaluation* (SPACE) yang biasanya dipergunakan untuk memetakan kondisi sebuah organisasi perusahaan dengan presentasi diagram kartesius empat kuadran (Umar, 2001). Penyesuaian diletakkan, bukan pada peletakan posisi strategis pada salah satu kuadran, melainkan kombinasi dari keempat kuadran dapat membentuk sebuah peta posisi strategis dari obyek yang dievaluasi. Dalam konteks evaluasi administrasi publik dan dengan isu kualitas *gender equality*. Maka empat variabel scan adalah institusi strategis yang dianggap merupakan faktor yang dianggap merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan atau kegagalan ketercapaian *gender equality* pada obyek, yaitu kebijakan, organisasi, lembaga atau organisasi pendidikan dan pelatihan dan mekanisme.

1.2 PEMETAAN ISU GENDER BIDANG EKONOMI

Survei pemetaan profil gender di Propinsi Lampung yang dilakukan oleh Tresiana dkk (2018) mendeskripsikan isu-isu gender yang berkaitan dengan bidang ekonomi sebagai berikut.

1.2.1 Partisipasi Angkatan Kerja Sektor Ekonomi

Ketimpangan atau ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan manfaat menjadi sangat bermasalah ketika dikaitkan dengan pembagian kerja atas gender, yaitu pembagian kerja yang bersumber pada nilai-nilai sosial budaya yang menganggap bahwa perempuan cocok untuk jenis pekerjaan tertentu, demikian juga laki-laki. Karena perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, maka pekerjaan-pekerjaan terkait dengan pemeliharaan anak dianggap cocok untuk perempuan sementara pekerjaan mencari nafkah dianggap cocok untuk laki-laki meskipun sekarang sudah banyak perempuan yang bekerja mencari nafkah. Selain itu, pembagian kerja atas gender juga disebabkan karena adanya pelabelan gender (*gender stereo typing*) yaitu pemberian atribut-atribut tertentu pada masing-masing kategori gender yang pada umumnya merugikan. Sebagai contoh anggapan bahwa perempuan itu cengeng, emosional, lemah, tidak mandiri, tidak stabil, submisif, sebaliknya laki-laki mandiri, tegas, kasar, agresif, dominan, kejam, dan sebagainya. Peran pencarian nafkah (produktif) cocok untuk laki-laki; peran reproduktif cocok untuk perempuan dan peran sosial dapat dilakukan laki-laki dan perempuan meskipun kecenderungannya laki-laki yang dominan karena aktivitas sosial dilakukan di luar rumah tangga.

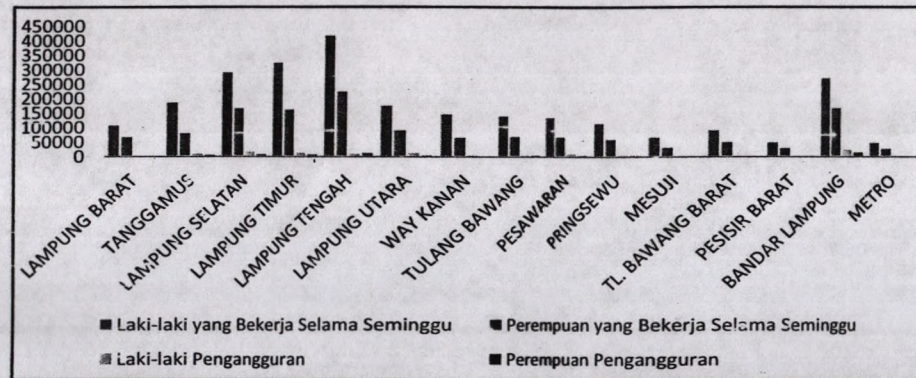
Ketimpangan dalam pembagian kerja atas gender mengakibatkan munculnya banyak ketidakadilan gender yang terwujud dalam bentuk marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi) perempuan, subordinasi perempuan atas laki-laki, *stereotype gender*, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja ganda pada perempuan. Ketimpangan gender dalam pembagian kerja juga mengakibatkan terjadinya diskriminasi gender, yaitu perlakuan yang tidak menyenangkan yang pada umumnya dialami perempuan karena anggapan bahwa perempuan lemah, tidak rasional, dan sebagainya sehingga ada status dan peran tertentu yang ditutup atau dibatasi untuk perempuan.

Ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja tercermin dari masih tertinggalnya partisipasi perempuan dibandingkan laki-laki, dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), *Employment to Population Ratio* (EPR), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tingkat pekerja tidak penuh, paruh waktu, dan setengah menganggur. Kondisi ini menunjukkan peluang usaha perempuan untuk bekerja dan berusaha jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki (Kementerian P3A dan BPS, 2016).

Secara makro, terdapat banyak variabel yang menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan rendah. Studi yang dilakukan Akmal dan Zulkifli (dalam Tresiana dkk, 2018) di empat Negara yakni China, Singapura, Indonesia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, belanja pemerintah dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara simultan terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan. Analisis data makro Tenaga Kerja Perempuan dalam Pembangunan di Indonesia tahun 1980-2010 yang dilakukan Harahap (dalam Tresiana dkk, 2018) menemukan variabel pendidikan sebagai determinan peningkatan partisipasi tenaga kerja perempuan. Menurutnya kemajuan di bidang pendidikan yang dicapai perempuan mengakibatkan terbukanya peluang karirnya. Adapun motivasi utama perempuan bekerja adalah tuntutan ekonomi/menambah pendapatan keluarga. Kontribusi rata-rata pendapatan perempuan di perdesaan sekitar 48,22% dari total pendapatan keluarga.

Senada dengan studi Harahap, Gesti (dalam Tresiana dkk, 2018) yang melakukan analisis determinan pendapatan sektor industri di Indonesia Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara bersama-sama tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pengalaman kerja kuadrat, jenis kelamin, domisili, jam kerja dan kelompok industri berpengaruh terhadap pendapatan. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan. Pengalaman kerja berpengaruh secara positif dan koefisien pengalaman kerja kuadrat menunjukkan tanda negatif yang artinya tiap tambahan satu tahun pengalaman kerja akan meningkatkan pendapatan marginal dan pada titik tertentu akan mengalami penurunan. Jenis kelamin berpengaruh terhadap pendapatan. Tenaga kerja laki-laki memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi dibanding perempuan. Tenaga kerja yang berdomisili di perkotaan memiliki

tingkat pendapatan lebih tinggi dibanding pedesaan. Tenaga kerja yang bekerja dengan jam kerja penuh memiliki tingkat pendapatan lebih tinggi dibanding tenaga kerja yang bekerja tidak penuh.



Sumber: Profil Gender dan Anak, Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan LPPM Unila

Gambar 1.4 Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja, yang bekerja seminggu yang lalu dan pengangguran terbuka menurut Kabupaten/Kota dan golongan umur di Provinsi Lampung, Agustus 2018

Variabel pendidikan juga berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran terselubung di pedesaan. Studi Harfina (dalam Tresiana dkk, 2018) yang merujuk data Sakernas 2007 di Pedesaan Jawa Tengah menunjukkan bahwa perempuan yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang lebih rendah untuk menjadi pengangguran terselubung. Berdasarkan tipe okupasinya, pekerja pertanian lebih terbuka peluangnya untuk menjadi penganggur terselubung dibanding sektor manufaktur dan jasa. Peningkatan produktivitas pertanian di pedesaan Jawa Tengah secara tidak langsung mengurangi jumlah pengangguran terselubung yang berarti meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Variabel gender bersama-sama umur dan status perkawinan berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan gender dalam tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Faktor karakteristik rumah tangga yang terdiri dari asal daerah tempat tinggal, jumlah tanggungan anak (0-14) tahun, dan pendapatan rumah tangga juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kesenjangan gender tingkat pengangguran terbuka

di Indonesia. Selain itu, faktor pendidikan perempuan juga menunjukkan pengaruh yang signifikan. Tingkat pendidikan perempuan yang lebih baik akan menurunkan kesenjangan gender pada tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Oleh karenanya, salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah bisa mendorong para perempuan Indonesia untuk lebih peduli dengan pendidikan.

Tingkat pengangguran di masyarakat selanjutnya berpengaruh langsung terhadap meningkatnya kemiskinan dan dampak negatif lain di masyarakat. Studi yang dilakukan Amalia (dalam Tresiana dkk, 2018) di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa variabel gender dan angka melek huruf berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Variabel pengangguran terbuka berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. Hal ini berarti semakin tinggi kesetaraan gender maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan. Temuan bahwa pengangguran terbuka berefek terhadap kemiskinan juga dikemukakan oleh Anggadini (dalam Tresiana dkk, 2018) melalui studinya di Sulawesi Tengah. Studi ini juga menemukan bahwa tingkat literasi mempunyai efek positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Umur harapan hidup dan PDRB mempunyai efek negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan temuan Darman (dalam Tresiana dkk, 2018), yang menyatakan bahwa hukum Okun berlaku di Indonesia, dimana koefisien Okun bernilai negatif. Tingkat pengangguran cenderung meningkat seiring dengan dicapainya pertumbuhan GDP. Studi Hastuti & Artaningtyas (dalam Tresiana dkk, 2018) dengan menggunakan data panel, juga menunjukkan bahwa hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi konsentrasi pengangguran propinsi di Indonesia.

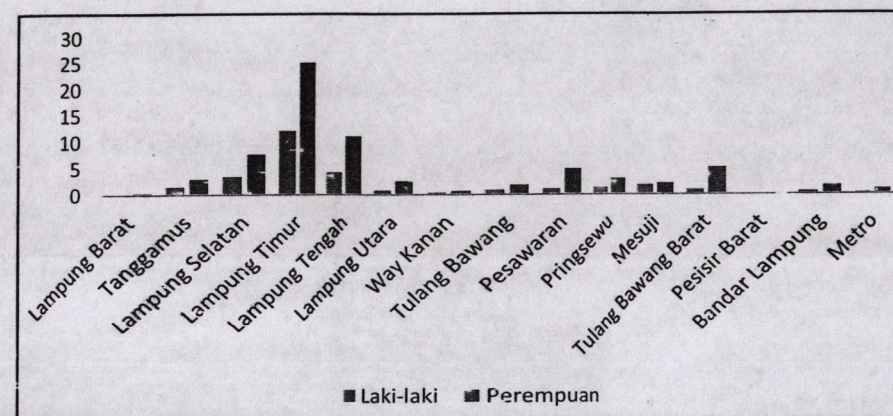
Uraian di atas menunjukkan kompleksitas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial budaya, dan kesetaraan gender. Laporan Bank Dunia (2000) menyebutkan bahwa ketika perkembangan ekonomi meningkatkan pendapatan dan mengurangi kemiskinan, ketidaksetaraan gender cenderung menurun. Rumahtangga-rumahtangga berpenghasilan rendah dipaksa untuk menjatah pengeluaran untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan gizi di mana perempuan dan anak perempuan yang "dikorbankan" karena merekalah yang menanggung sebagian besar beban. Oleh sebab itu, ketika pendapatan rumahtangga bertambah, ketidaksetaraan gen-

der dalam sumber daya manusia cenderung menurun. Sebagaimana hak-hak dasar lainnya, pendapatan yang lebih tinggi umumnya menghasilkan kesetaraan gender dalam sumber daya, baik kesehatan maupun pendidikan. Di bidang pendidikan, hasil simulasi menunjukkan bahwa peningkatan terbesar yang ditimbulkan oleh pertumbuhan pendapatan kemungkinan akan terjadi di wilayah-wilayah termiskin: Asia Selatan dan Sub Sahara Afrika, bahkan dampak pendapatan khususnya kuat pada tingkat sekunder.

1.2.2 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri

Kesenjangan gender lain di bidang ekonomi khususnya dalam akses pasar kerja adalah persentase TKI yang didominasi oleh perempuan. Terdapat perbedaan karakteristik antara tenaga kerja migran laki-laki dan perempuan. Tenaga kerja laki-laki umumnya adalah tenaga profesional dan semi profesional, sementara itu tenaga kerja perempuan umumnya tidak mempunyai keterampilan seperti sebagai asisten rumah tangga. Tabel 10 menunjukkan bahwa TKI Provinsi Lampung tahun 2017, sebagian besar 70% diantaranya adalah tenaga kerja perempuan. Kondisi seperti ini tidak menguntungkan bagi perempuan karena risiko yang ditanggungnya mulai dari disharmoni keluarga di tanah air yang ditinggalkan hingga keselamatan dirinya di negara tujuan. Perlindungan hukum terhadap TKI khususnya bagi TKW hingga saat ini masih menjadi kendala.

Menurut Febriyanti & Isabella (dalam Tresiana dkk,2018), implementasi perlindungan tenaga kerja Indonesia masih belum optimal, seperti misalnya komunikasi eksternal dengan pimpinan agensi yang belum baik khususnya komunikasi antara Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Komunikasi yang kurang baik juga terlihat dari tidak terpenuhinya hak-hak pekerja karena konsorsium asuransi yang tidak mampu memenuhi kewajiban membayar kompensasi atas klaim yang tidak lebih dari 7 hari kerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Kondisi sosial yang kurang mendukung kegiatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri pada tahap pra penempatan hal ini disebabkan Tenaga Kerja Indonesia Re-entry merasa keberatan dengan pembayaran premi asuransi yang dibebankan pada saat pembuatan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.



Sumber: Data BNP2TKI, 2018

Gambar 1.5 Persentase Tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung 2018

Kualitas SDM TKW yang rendah menjadi faktor lain yang menyebabkan tingginya risiko yang dihadapi tenaga kerja perempuan. Studi yang dilakukan Rahayuningsih (dalam Tresiana dkk,2018) terhadap TKI asal Madura menunjukkan bahwa rendahnya pendidikan formal mayoritas masyarakat Madura telah menyebabkan sejumlah masalah yang berimplikasi pada rendahnya kualitas tenaga kerja, antara lain: (1) mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal yang beresiko tinggi tanpa jaminan keamanan dan keselamatan yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) rendahnya kesadaran pola hidup sehat; dan (3) rendahnya kesadaran pola makan yang sehat. Minat masyarakat Madura untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI sangat besar. Hal ini didorong oleh berbagai sebab terutama faktor ekonomi. Akan tetapi, rendahnya kualitas SDM masyarakat Madura menyebabkan berbagai permasalahan timbul. Permasalahan tersebut antara lain yang utama adalah maraknya praktek TKI ilegal.

Bekerja di luar negeri bagi sebagian masyarakat merupakan bagian dari solusi atas berbagai kesulitan yang dihadapi di negerinya sendiri. Peluang kerja di luar negeri dengan upah yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan bekerja di dalam negeri merupakan daya tarik tidak saja bagi pekerja yang belum pernah bekerja di luar negeri melainkan juga bagi mantan TKI yang telah mempunyai pengalaman bekerja di luar negeri. Studi Fawaid (dalam

Tresiana dkk,2018) menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi minat mantan TKI bekerja kembali ke luar negeri yakni: upah di daerah tujuan, status pernikahan, umur, pendidikan, dukungan keluarga dan jumlah tanggungan keluarga. Wafirotn (dalam Tresiana dkk,2018) yang melakukan studi di Ponorogo menemukan faktor pendorong berupa pendapatan yang rendah dan sempitnya peluang kerja di satu sisi dan faktor penarik berupa gaji yang tinggi dan peluang kerja yang luas di sisi lain. Sementara itu Khumairoh dan Kuspriyanto (dalam Tresiana dkk,2018) menyebutkan faktor pendorong berupa motivasi mensejahterakan kehidupan keluarga dan dorongan saudara yang telah menjadi TKI dan faktor penarik berupa upah yang tinggi.

Bekerja di luar negeri dengan demikian menjadi impian bagi sebagian masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya. Remitan menjadi tumpuan bagi keluarga dimana anggotanya menjadi TKI. Studi Dibyantoro dan Ali (dalam Tresiana dkk,2018) menyebutkan bahwa penggunaan remitan meliputi usaha produktif (seperti pembelian tanah, investasi dan modal usaha), konsumtif (pembangunan/renovasi rumah dan pembelian alat-alat elektronik) dan investasi sosial (seperti modal untuk menjadi kepala desa). Khumairoh dan Kuspriyanto (dalam Tresiana dkk,2018) menemukan bahwa pemanfaatan remitan paling banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebesar 29%. Menurut Wafirotn (dalam Tresiana dkk,2018), bekerja di luar negeri memberi dampak sosial berupa peningkatan status sosial seperti peningkatan pengetahuan, pendidikan, pendapatan serta peningkatan kepemilikan barang. Meskipun demikian, tenaga kerja khususnya perempuan menghadapi resiko berupa berbagai macam stigma negatif (dalam Tresiana dkk,2018).

Perempuan yang bekerja sebagai TKI merupakan pencerminan rendahnya posisi perempuan di masyarakat. Menurut Khotimah (dalam Tresiana dkk,2018) Perempuan di Indonesia telah dirugikan oleh kemiskinan dan dimarginalkan oleh proses pembangunan. Dari perspektif perempuan, definisi kemiskinan tidak hanya dilihat dari rendahnya pendapatan, tetapi juga kurangnya kesempatan bekerja, berkarya, dan akses, serta hak untuk mengambil keputusan atas diri dan keluarganya. Rendahnya akses terhadap pendidikan akibat kemiskinan dan budaya patriarki juga menambah buruknya kualitas sumber daya perempuan Indonesia. Tenaga

Kerja Wanita (TKW) adalah contoh kongrit rendahnya mutu pendidikan sehingga menjadikan Perempuan tak lebih sebagai aset yang dapat dieksploitasi. Kemiskinan struktural dalam berbagai praktek pembangunan telah memarginalkan perempuan dan menempatkannya sebagai korban.

1.2.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Laporan Bank Dunia dalam *World's Development Report* (2000) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara persamaan gender, pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi. Peran perempuan di berbagai belahan dunia pun mengalami banyak perubahan. Perempuan merupakan penghuni 50% dari populasi dunia, tetapi hanya 40.8% yang menjadi pekerja di sektor formal. Sisanya lebih banyak bekerja di sektor informal. Tingkat pendidikan perempuan yang makin meningkat menjadikan taraf hidup perempuan lebih baik karena pekerjaan yang digelutinya.

Memasuki ekonomi global, perempuan di Indonesia masih harus menanggung beban ekonomi di rumah tangga mereka bahkan sebuah negara. Selain itu, mereka mengalami ketidaksetaraan dalam akses pekerjaan mereka. Itu artinya pria lebih besar aksesnya terhadap pasar tenaga kerja dibandingkan perempuan. Namun, di sisi lain, peran perempuan dalam keluarga dan merupakan bagian penting dalam keseluruhan konstruksi ekonomi nasional seiring dengan peningkatan pendapatannya. Hal ini ditunjukkan oleh kehadiran pengusaha perempuan di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM/UMKM) yang menjadi realitas kehidupan ekonomi di sebagian besar masyarakat Indonesia (dalam Tresiana dkk,2018).

Akses perempuan untuk memasuki sektor UMKM masih menghadapi banyak hambatan. Menurut Jati (dalam Tresiana dkk,2018), hambatan pengusaha perempuan terbagi menjadi dua, yaitu 1) karakteristik pribadi yang disebabkan oleh beban kerja karena peran ganda seorang wanita, dan 2) karakteristik struktural, yaitu hambatan untuk mengakses modal (dan persyaratan agunan) dan akses ke pemasaran di mana perempuan memiliki akses ke informasi pemasaran yang rendah. Secara bersama-sama variabel pencapaian, afiliasi, otonomi, dan dominasi terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi niat perempuan untuk memilih karir sebagai wirausaha. Studi lain menunjukkan seperti yang dilakukan Suprani & Khoiron (dalam Tresiana dkk,2018) menunjukkan bahwa bisnis UMKM umumnya

merupakan bisnis warisan keluarga yang bergantung pada keuangan keluarga. Para pengusaha takut untuk meminjam uang di bank, bahkan sebagian mereka tidak tahu prosedur pengajuan kredit.

Dari perspektif gender, secara terdapat perbedaan karakteristik antara pengusaha UMKM perempuan dengan laki-laki. Studi Suprani dan Khoiron (dalam Tresiana dkk, 2018), menyimpulkan perempuan lebih otonom untuk mengelola UMKM. Studi Sherlywati, Handayani, & Harianti (dalam Tresiana dkk, 2018) menemukan bahwa: 1) wirausahawan laki-laki lebih mandiri dalam menghadapi tantangan persaingan, 2) wirausahawan perempuan lebih mau mengambil risiko dan menyukai tantangan, 3) wirausaha laki-laki lebih banyak berpikir untuk pengembangan bisnis ke masa depan untuk mempromosikan bisnis mereka, 4) wirasusahawan laki-laki lebih fleksibel dan mengantisipasi perubahan lingkungan. Sementara itu studi Anggraini (dalam Tresiana dkk, 2018) menyimpulkan bahwa perempuan Melayu tidak memiliki kelebihan signifikan dalam menjalankan peran mereka baik sebagai ibu dan istri maupun sebagai pengusaha. Pembagian kerja ditangani dengan bijaksana. Di antara mereka ada yang menjadi pengasuh sambil mengelola bisnis. Dalam hal kapasitas perempuan dalam pengembangan bisnis, sebagian besar perempuan Melayu mempunyai kapasitas dengan berpartisipasi dalam program-program pemerintah dan lembaga-lembaga mandiri, sehingga lebih mudah dalam merumuskan strategi pengembangan bisnis.

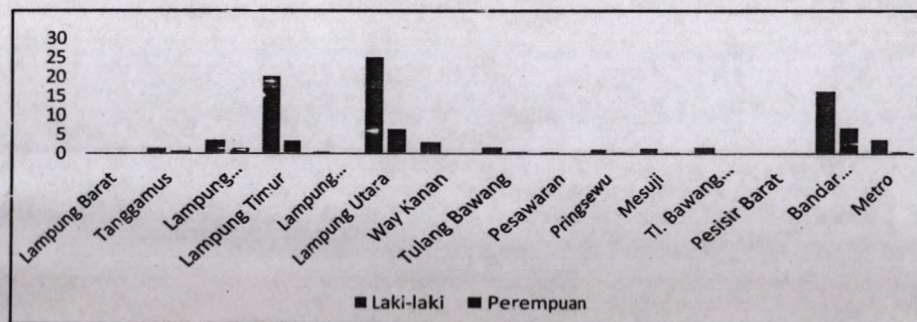
Secara keseluruhan variabel gender mempunyai pengaruh yang bervariasi terhadap kelangsungan dan perkembangan UMKM. Hasil studi Nainggolan (dalam Tresiana dkk, 2018) menunjukkan terdapat perbedaan gender secara signifikan yang mempengaruhi pendapatan dari UKM. Variabel tingkat pendidikan dan usia di sisi lain tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan UKM. Studi Wibawa (dalam Tresiana dkk, 2018) menunjukkan bahwa variabel pengetahuan yang mempengaruhi kompetensi dan produktivitas tenaga kerja laki-laki sementara itu pada tenaga kerja perempuan variabel kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang mempengaruhi produktivitas. Roslan & Karim, (dalam Tresiana dkk, 2018) mendapatkan bahwa variabel gender bersama-sama dengan variabel lain seperti tingkat pendidikan, jarak antara pemberi pinjaman dengan lokasi usaha peminjam, jangka waktu pengembalian, dan aturan sanksi yang

diberlakukan pada perjanjian kredit berhubungan dengan pengembalian kredit/pinjaman. Sementara itu Studi Suryani dan Ramadhan (dalam Tresiana dkk, 2018) menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi tingkat literasi keuangan pelaku usaha adalah perbedaan pendidikan dan pendapatan. Sedangkan perbedaan gender dan usia tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM.

Di berbagai negara, sektor UMKM telah terbukti sebagai satu-satunya sektor yang paling tahan terhadap terpaan gelombang krisis ekonomi. Sektor ini mempunyai elastisitas yang tinggi sehingga tidak terpengaruh oleh krisis ekonomi, selain mampu menyerap banyak tenaga kerja tidak terampil. Sehubungan dengan itu upaya pembinaan UMKM perlu terus dilakukan. Studi Akatiga (dalam Tresiana dkk, 2018) tentang pemberdayaan perempuan yang mengelola usaha kecil (PUK-mikro) menunjukkan adanya tiga dimensi dalam pemberdayaan: ekonomi, sosial dan politik. Hal ini tercermin dari temuan penelitiannya bahwa strategi pendampingan berjenjang menyebabkan adanya perbedaan pengaruh pendampingan tidak hanya dari lapis elite (pertama) hingga lapis basis (keempat), tetapi juga di antara PUK-mikro yang berada pada satu lapisan. Pengaruh pendampingan pada lapis pertama dan kedua menyangkut ekonomi, relasi gender dan politik. Sedangkan pada lapis ketiga dan keempat hanya terkait dengan ekonomi. Penguatan aspek ekonomi rumah tangga maupun kedudukan di masyarakat tampak berkorelasi dengan perbaikan kualitas relasi gender dalam rumah tangga (posisi sosial perempuan dalam rumah tangga) (dalam Tresiana dkk, 2018).

Pembinaan terhadap UMKM dengan demikian tidak saja berefek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melainkan juga dapat meningkatkan harkat dan martabat perempuan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesetaraan gender di masyarakat. Menurut Lucik, Naim, dan Samsudin (dalam Tresiana dkk, 2018) kegiatan produktif dilakukan ibu rumah tangga meningkatkan literasi keuangan. Banyak ibu rumah tangga yang kemudian memberanikan diri untuk meminjam modal di lembaga keuangan. Terdapat beberapa alasan di balik pilihan lembaga keuangan tertentu sebagai tempat meminjam modal diantaranya adalah kemudahan administrasi, bunga rendah dan pelayanan yang baik. Terdapat

tiga prakondisi, yang memaksa institusi keuangan melakukan penyesuaian dan memberi kebebasan kepada ibu rumah tangga untuk mendapatkan akses kredit. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa UMKM memperoleh manfaat dari kehadiran lembaga keuangan yang memiliki beragam keunggulan. Studi Setyari (dalam Tresiana dkk, 2018) juga menunjukkan hubungan yang kuat bahwa kredit mikro memberikan dampak yang signifikan positif terhadap tingkat kesejahteraan rumahtangga penerima program.



Sumber: Dinaskoperindag Provinsi Lampung 2017

Gambar 1.6 Persentase Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Menurut Jenis Kelamin Pemilik Usaha dan Kabupaten Kota di Provinsi Lampung 2018

Gambar 1.6 menunjukkan bahwa kepemilikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung masih didominasi oleh laki-laki yakni sebesar 80% dan perempuan hanya memiliki sebesar 20%. Dalam hal ini belum diketahui status perkawinan dari pemilik UMKM tersebut. Terdapat dugaan bahwa perempuan yang memiliki UMKM tersebut sudah berstatus janda. Jika masih ada suaminya, maka diperkirakan angka disparitasnya akan semakin tinggi. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan gender yang semakin menegaskan bahwa akses terhadap sumberdaya ekonomi di masyarakat lebih banyak dikuasai laki-laki. Hal ini mencerminkan bahwa budaya patriarkhi yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama dan sebagai konsekuensinya memperoleh bagian "kue" yang lebih besar dalam distribusi di keluarga (*bread winner*).

1.3 GAMBARAN UMUM ISI BUKU

Uraian buku ini berfokus pada upaya menemukan gagasan model inovasi kebijakan pengembangan industri rumahan kelompok perempuan, yang dapat diterapkan dalam pencapaian *gender equality* di bidang ekonomi. Dilatarbelakangi kegagalan kebijakan dan program pengembangan industri rumahan (IR) yang telah dilakukan Pemerintah Daerah sebelumnya, yang dilakukan secara sporadis dan insidentil, tidak berbasis model pembelajaran masyarakat sehingga dampak perkembangan usaha kelompok sulit dimonitor dan dievaluasi. Fakta pertumbuhan jenis IR semakin pesat, meski kontribusi pada PDRB rendah, produktivitas pekerjaannya tertinggal, namun IR mampu memainkan peran strategis meningkatkan dinamika ekonomi desa, utamanya dalam menyedot luapan tenaga kerja, namun sayang kurang diperhitungkan dalam memainkan perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pemerintah daerah perlu lebih fokus untuk pengembangan IR perempuan, sebagai potensi baru mengakselerasi kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi pengembangan IR yang dilakukan, melalui inovasi model kebijakan klaster. Inovasi model pengembangan IR dengan model klaster diharapkan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan *gender equality* pembangunan, khususnya bidang ekonomi sebagai upaya untuk membangun potensi manusia kreatif dan potensi daerah, menuju daya saing nasional dan regional melalui pembangunan *culture sustainability management*.

Untuk membahas perspektif tersebut, isi buku ini terdiri dari empat bab. Bab pertama (pendahuluan), penulis mengaitkan gender, isu-isu gender, khususnya bidang ekonomi dan hubungannya dengan administrasi publik. Administrasi publik sangat strategis peranannya dalam ketercapaian *gender equality*, karena fungsi pokoknya adalah merumuskan kebijakan publik, yang mengikat seluruh warga tanpa kecuali. Karenanya, menjadikan administrasi publik sensitif gender, maka perspektif *gender equality* dapat berjalan cepat dan efektif.

Bab kedua, berisi perspektif *gender equality* dan *sustainable development goals* (SDGs). Elaborasi kedua perspektif melahirkan dukungan dalam aras praksis maupun kebijakan *gender equality*. Pemerintah mengeluarkan program industri rumahan dan beberapa kebijakan-kebijakan afirmatif.

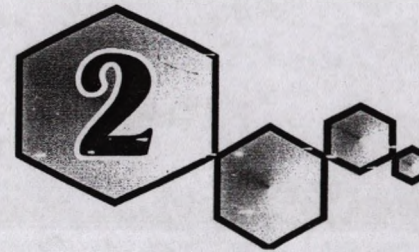
Judul bab diinspirasi ada pendekatan baru berupa GESI (*Gender equality dan Social Inclusion*) dalam memahami isu-isu kepublikan, termasuk isu gender dan perempuan.

Bab ketiga menguraikan tentang gambaran dan penerapan model inovasi kebijakan berupa kebijakan klaster dalam pengembangan program industri rumahan. Model disusun berbasis pendekatan triple helix, mengedepankan kolaborasi akademisi/cendekiawan, pemerintah dan sektor bisnis. Bab ini menggambarkan langkah langkah menyusun model rintisan klaster melalui pengukuran elemen perkembangan klaster, kemudian menetapkan tipologi/strategi perkembangan klaster sebagai strategi gerak triple helix. Beberapa dimensi penguatan diperlukan untuk ketercapaian kesuksesan klaster, diantaranya melalui penguatan kebijakan pemerintah, penguatan infrastruktur, penguatan inovasi dan penguatan kapasitas pelaku/masyarakat.

Bab keempat secara khusus membahas peran jaringan sebagai dimensi untuk mendorong perkembangan klaster industri rumahan (IR). Masyarakat yang komunitasnya memiliki banyak jaringan sosial yang padat, diyakini lebih kondusif dalam pembangunan ekonomi, dikarenakan ada sisi rasional pertukaran ekonomi.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari buku ini yang berisi kata-kata penutup (*closing statement*), sebagai rangkuman dari keseluruhan uraian dari buku. Pada bab ini juga dikemukakan beberapa rekomendasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan *gender equality* pembangunan, khususnya bidang ekonomi sebagai upaya untuk membangun potensi manusia kreatif dan potensi daerah, menuju daya saing nasional dan regional melalui pembangunan *culture sustainability management*

-oo0oo-



PERSPEKTIF *GENDER EQUALITY* DAN KEBIJAKAN KLASER INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN

Penjabaran optimalisasi, keberdayaan inovasi potensi-potensi sosial budaya untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat memerlukan inovasi model pemberdayaan kapasitas masyarakat, yang berfokus proses pembelajaran, penguatan kapasitas kelompok perempuan. Kelompok perempuan memerlukan penguatan kapasitas individu, entitas dan jejaring, juga kemandirian sosial dan ekonomi. Diperlukan intervensi kebijakan pemberdayaan ekonomi sebagai solusi bukan saja untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, tetapi juga ketercapaian *gender equality*.

Pemerintah melalui *leading sector* utamanya, yaitu Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA RI), hadir dengan mengeluarkan paket Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) di Tahun 2014, untuk mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 2 Tahun 2016, dilaksanakan program pembangunan industri rumahan (IR) secara masal, untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan. Fokus pengembangan industri rumahan diarahkan pada upaya mengakhiri 3 (tiga) pokok utama, yang disebut *3ENDs*, yaitu: (1) mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, (2) mengakhiri perdagangan manusia, dan (3) mengakhiri kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

Kebijakan Industri Rumahan (KIR), adalah sebuah alternatif kebijakan yang memiliki keunggulan menekankan lokalitas, baik kelembagaan, komunitas, lingkungan, kultur, ada pemihakan dan pemberdayaan yang dipahami sebagai proses transformasi hubungan sosial, ekonomi, dan perlindungan usaha perempuan. Karakter kebijakan berciri *transformative* dan *transactive planning*, *bottom up*, *community empowerment* dan *participative* menjadikan kebijakan ini sebagai inovasi model yang cukup efektif, terpadu, berkesinambungan, spesifik dan operasional, dengan berbasis pembelajaran yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan pelaku industri rumahan perempuan.

Berkaitan dengan hal itu, beberapa publikasi yang dilakukan Tresiana dan Duadji, memberikan peta jalan proses ketercapaian *gender equality* melalui inovasi pengembangan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk ketercapaian kondisi pelaku industri rumahan yang mandiri, memiliki ketahanan, *networking*, inovasi dan kreatifitas serta memiliki jiwa wirausaha yang handal. Publikasi Tresiana & Duadji Tahun 2018, "*Social Entrepreneur Model for Tourism Development in Kiluan Bay*", menggambarkan potensi masyarakat Teluk Kiluan yang lebih dari hanya sekedar pelaku/wirausaha ekonomi, melainkan *social entrepreneur* merupakan potensi yang bisa diciptakan dalam komunitas masyarakat. Publikasi yang berjudul "*Multi Stakeholders Governance Body Model in Achieving The Excellence Public Policy*" (2016), menggambarkan modal sosial masyarakat pedesaan yang menjadi kekuatan dasar bagi lahirnya kebijakan yang unggul. Kedua penelitian di atas, memberi hasil adanya potensi sosial budaya masyarakat yang bisa dikembangkan untuk keberhasilan pembangunan. Publikasi yang berkaitan dengan penguatan *governance* dan inovasi kebijakan *gender equality*, tergambar pada publikasi "*A Participation model based on community forum as reproductive health knowledge transaction space to indrease male participation in vasectomy*" (2018). Rekomendasinya adalah pemanfaatan ruang terbuka warga untuk ketercapaian *gender equality*.

Selanjutnya Duadji (2012) melalui publikasi berjudul "*Good Governance dalam Pemerintah Daerah*" merekomendasikan pemerintah lokal merevitalisasi dan mereformasi tata kelola hubungan pemerintah-masyarakat melalui inovasi kebijakan dengan partisipasi masyarakat dalam tata hubungan yang baru. Publikasi Tresiana (2015) "*Perumusan Kebijakan*

yang *berperspektif Gender di Propinsi Lampung*" mendapatkan hasil, perlunya kebijakan afirmatif untuk mengintegrasikan gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Untuk itu kelompok perempuan perlu diberikan perlindungan, kebijakan, skill, pendidikan dan kekuasaan. Penelitian di atas, diperkuat dengan survei yang dilakukan Tresiana dkk bekerjasama dengan KPPPA RI (2017) "*Analisis Potensi Industri Rumahan di Kabupaten Lampung Timur*". Survei mendapati potensi-potensi IR kelompok perempuan yang memerlukan strategi pengembangan yang tepat dan lebih operasional.

Pada bab kedua ini secara rinci menguraikan perspektif global untuk memahami isu-isu *gender equality*, khususnya ekonomi. Dua perspektif, yakni *sustainable development goals* (SDGs) dan *gender equality* sebagai bagian dari perspektif *Gender equality and Social Inclusion* (GESI), menjadi basis untuk memahami keberdayaan dan kesejahteraan kelompok perempuan. Wujud implementasi keduanya tergambar dalam model afirmatif berupa kebijakan klaster industri rumahan (KIR). Elaborasi gagasan perspektif dan model diharapkan menjadi inovasi yang mampu mengantisipasi persoalan dan isu-isu pemberdayaan bidang ekonomi kelompok perempuan secara cerdas dan memberi keberpihakan dan harapan bagi kesejahteraan kelompok khususnya perempuan dan juga masyarakat.

2.1 PERSPEKTIF GENDER EQUALITY DAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Perspektif *gender equality* dan *sustainable development goals* (SDGs), merupakan hasil perdebatan dan penelitian yang memahami makna gender dan perspektif pembangunan dalam aras global. Kata *gender* diidentikkan dengan jenis kelamin dan dipahami sebagai pemberian dari Tuhan yang bersifat kodrati. Secara *etimologis* kata *gender* berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. *Gender* juga diartikan sebagai perbedaan nilai dan perilaku yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Konsepsi dasar pemaknaan ini yang selanjutnya memunculkan ketimpangan gender. Gambaran perwujudan implementasi kesetaraan gender (*gender equality*), dalam konteks lokal masih termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan. Penelitian yang dilakukan Tresiana (2015) di Propinsi Lampung mendapati gambaran ketidakadilan yang dominan sebagai

berikut: *Pertama*, Marginalisasi Perempuan. Salah satu bentuk ketidakadilan terhadap gender yaitu marginalisasi perempuan. Marginalisasi perempuan (penyingkiran/pemiskinan) kerap terjadi di lingkungan sekitar. Nampak contohnya yaitu banyak pekerja perempuan yang tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Dengan hal ini banyak sekali kaum pria yang beranggapan bahwa perempuan hanya mempunyai tugas di sekitar rumah saja. *Kedua*, Subordinasi. Terdapat juga bentuk keadilan yang berupa subordinasi. Subordinasi memiliki pengertian yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu terdapat pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Salah satu contohnya yaitu perempuan dianggap makhluk yang lemah, sehingga sering sekali kaum adam bersikap seolah-olah berkuasa (wanita tidak mampu mengalahkan kehebatan laki-laki). *Ketiga*, Pandangan stereotype. Stereotype dimaksud adalah citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Salah satu stereotype yang berkembang berdasarkan pengertian gender, yakni terjadi terhadap salah satu jenis kelamin, (perempuan). Hal ini mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga terjadi di tempat kerja dan masyarakat bahkan di tingkat pemerintah dan negara.

Diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi dalam proses yang cukup panjang. Paham *patriarki* yang membentuk pemikiran bahwa laki-laki dianggap lebih superior dalam semua lini kehidupan telah menjadi pemicu terjadinya diskriminasi. Perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan menjadi hal yang turun temurun dipraktikkan di masyarakat. Ketidakadilan gender tersebut termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marginalisasi, subordinasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan. *Stereotype* yang terakam dalam benak masyarakat adalah perempuan hanya identik dengan kegiatan domestik atau rumah tangga.

Sedangkan laki-laki dianggap sebagai pelaku sentral dalam keluarga. Kaum perempuan juga mengalami marginalisasi atau proses peminggiran. Dalam dunia kerja, perempuan mendapatkan upah yang jauh di bawah upah rata-rata laki-laki dan memiliki peluang lebih rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja. Dalam pengambilan keputusan, perempuan pun masih termarginalisasi. Dengan adanya berbagai fakta indikasi ketimpangan pencapaian dan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender menjadi target penting dalam pembangunan manusia.

Dalam konteks ekonomi, Tresiana dan Duadji (2019), menggambarkan pendekatan teoritis tentang pemahaman terhadap ketimpangan gender dalam pasar kerja melalui 2 kelompok pandangan yakni: (1) mereka yang memfokuskan pada pilihan individu dan (2) mereka yang memfokuskan pada batasan/hambatan struktural. Kelompok yang memfokuskan pada pilihan individu menegaskan bahwa ketimpangan gender dalam akses terhadap pasar tenaga kerja berkaitan dengan pilihan individu perempuan yang berhubungan dengan investasi sumber daya yang merefleksikan peran perempuan dalam reproduksi biologi dan lemahnya akses terhadap pasar tenaga kerja. Dalam pandangan yang kedua, ketimpangan gender dalam pasar kerja merupakan produk dari hambatan-hambatan struktural yang berlangsung selama perjalanan hidup laki-laki dan perempuan dari kelompok-kelompok sosial yang berbeda. Dalam hal ini, hambatan merujuk pada norma-norma adat, kepercayaan dan nilai yang memengaruhi hubungan sosial dalam keluarga dan kekerabatan. Norma-norma, kepercayaan dan nilai-nilai tersebut membentuk model maskulin dan feminin di masyarakat yang berbeda dan membagi tugas dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, yang pada gilirannya menciptakan hambatan-hambatan atau batasan-batasan mana yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki dan mana yang seharusnya dilakukan perempuan.

Dari beberapa gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa *gender equality* merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Dengan demikian, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan.

Pada akhirnya laki-laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut. Pembangunan yang dicapai juga merupakan andil dari perempuan. Sudah seharusnya pembangunan manusia yang dicapai disertai dengan meningkatnya kesetaraan gender, yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas, dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan gender (*gender equality*) ditempatkan sebagai aspek yang sangat penting dalam Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Meskipun secara khusus disebutkan dalam Tujuan 5 (Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan), pengarusutamaan gender mendapat tempat di seluruh Tujuan SDGs dan tercakup pada lebih dari 100 target. Pada Tujuan 5 banyak menekankan pada usaha-usaha menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan dan aspek pemberdayaan perempuan. Akan tetapi yang menarik dari SDGs Tujuan 5 adalah memberikan perhatian terhadap pekerjaan rumah tangga dan penekanan pada perlunya reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk-bentuk lain dari properti, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam. Terkait dengan ekonomi, pada Tujuan 8.5 (Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua) bahkan secara jelas mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah termasuk melalui akses layanan keuangan. Salah satu indikator global untuk mengukur target tersebut adalah partisipasi laki-laki dan perempuan dalam lapangan kerja informal sektor non pertanian. Pentingnya kesetaraan akses dalam ekonomi juga ditekankan pada Target 8.5 yakni memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria. Hal ini ditunjang dengan dimasukkannya indikator upah rata-rata per jam pekerja perempuan dan laki-laki berdasarkan jabatan sebagai salah satu indikator pengukur keberhasilan target 8.5 tersebut.

Salah satu upaya SDGs menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan sebagaimana tertulis bahwa *gender*

equality adalah “*achieve gender equality and empower all women and girls*”, kesetaraan gender ini dibuat untuk mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan bukan hanya hak asasi manusia, tapi juga penting untuk mempercepat SDGs. Terdeskripsi terbukti berkali-kali, bahwa memberdayakan perempuan dan anak perempuan memiliki *multiplier effect*, dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh level. Yang bertujuan untuk membangun pencapaian untuk memastikan bahwa ada akhir diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di mana-mana.

Dalam konteks nasional, perspektif *gender equality* telah tertuang dalam visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik individu, wilayah, maupun jenis kelamin. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

RPJMN 2015-2019 (dalam Bappenas, 2014), perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan sangat ditekankan. Kesetaraan dalam pembangunan tersebut tidak lain untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan yang berkelanjutan. Target pembangunan dalam hal kesetaraan gender adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian perspektif gender di semua tahapan pembangunan, dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berikutnya, Indonesia memiliki kerangka kebijakan yang kuat untuk peningkatan kesetaraan gender, dan juga telah membuat komitmen nyata dalam pembangunan yang inklusif terhadap disabilitas. Pada tingkat kebijakan tertinggi, hal ini mencakup pernyataan kesetaraan semua orang dalam Konstitusi Republik Indonesia, ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*) pada tahun 1984, dukungan suara bagi Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*) pada tahun 2007, dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Kaum Penyandang

Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Person with Disabilities*) pada tahun 2011.

Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang penyandang disabilitas pada tahun 2016, dan rancangan undang-undang tentang keadilan dan kesetaraan gender juga tengah disusun namun proses pengesahannya di DPR tersendat. Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sangat relevan dengan tata kelola pemerintahan daerah Selanjutnya, Pemerintah Indonesia mengambil pendekatan baru untuk mencapai target pengurangan kemiskinan dengan memperkuat integrasi investasinya di berbagai bidang pelayanan sosial berbasis masyarakat untuk kehidupan yang lebih keberlanjutan, yaitu perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial (*Gender equality dan Social Inclusion*).

Perspektif *Gender equality* dan *Social Inclusion* (GESI) dikemukakan oleh Susanti (2018), adalah sebuah konsep yang membahas relasi kuasa yang tidak setara yang dialami oleh orang-orang atas dasar gender, ketidakmampuan (kemiskinan dan disabilitas), usia, lokasi, kasta/ etnis, bahasa dan agenatau kombinasi dari dimensi-dimensi ini. Fokus pada kebutuhan untuk tindakan menyeimbangkan kembali relasi kuasa ini, mengurangi kesenjangan dan memastikan persamaan hak, peluang, akses dan menghormati semua individu tanpa memandang identitas sosial mereka. Perspektif GESI dimaksudkan untuk mempertimbangkan dan memasukkan analisis ketidaksetaraan dan ketidakadilan berbasis gender, ketidakmampuan (kemiskinan dan disabilitas), usia, lokasi, kasta/etnis, bahasa. Menganalisis proses konstruksi sosial berbasis ketidaksetaraan dan ketidakadilan berbasis gender, ketidakmampuan (kemiskinan dan disabilitas), usia, lokasi, kasta/ etnis, bahasa dalam kehidupan masyarakat.

Berikut ini adalah komitmen pemerintah terkait *Gender equality*, termasuk *Social Inclusion* ditunjukkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1. Gender equality di Indonesia

Dokumen	Substansi/Ketentuan
UU 1945	Pasal 27: (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum; (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 H: (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 28 I: (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 34: (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW</i>) Ditandatangani oleh Indonesia: 29 Juli 1980	Pasal 14: (2) Negara-negara Pihak wajib membuat langkah-tindak yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikut serta dalam dan menikmati manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:

Tabel 2.1. Gender Equality di Indonesia (Lanjutan)

Dokumen	Substansi/Ketentuan
Diratifikasi oleh Indonesia dengan UU 7/1984: Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW), 13 Sep 1984	(a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di semua tingkat; (b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana; (c) Untuk mendapat manfaat langsung dari program jaminan sosial; (d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan keirampilan teknik mereka; (e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan ekonomi melalui kerja dan kewiraswastaan; (f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat; (g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, teknologi tepat-guna, serta perlakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman; (h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, transportasi dan komunikasi
Instruksi Presiden No. 9/2000: Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional	Instruksi ini mengharuskan pengarusutamaan isu-isu gender dalam lembaga negara dan program-programnya pada semua tahap pembangunan: yakni perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Tabel 2.1. Gender Equality di Indonesia (Lanjutan)

Dokumen	Substansi/Ketentuan
UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga	Definisi kekerasan dalam rumah tangga termasuk: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran keluarga, dan mengkriminalisasi perkosaan dalam pernikahan. Pelecehan seksual dikriminalisasi dan hak-hak korban diakui secara eksplisit.
UU No.40/2008 tentang Penghapusan diskriminasi ras dan etnis	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67/2011	Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
Surat Edaran Bersama 2012: Strategi nasional untuk percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender	Strategi nasional ini dirumuskan dan diedarkan oleh empat kementerian dalam nomor surat yang berbeda sebagai berikut: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional: 270/M.PPN/11/2012 2. Kementerian Keuangan: SE-33/MK.02/2012 3. Kementerian Dalam Negeri: 050/4379A/SJ - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: SE 46/MPP-PA/11/2012
Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014	Pasal 1, ayat 1: pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan desa diputuskan berdasarkan pertimbangan kesetaraan gender.
UU No. 6/2014 tentang Desa	Bab 2 tentang Kepala Desa pasal 26: demokrasi dan kesetaraan gender sebagai salah satu kewajiban kepala desa Paragraf (4); Pasal 63 ayat b: kesetaraan gender dalam Badan Permusyawaratan Desa Penjelasan bagian no.7 tentang non-diskriminasi terhadap kelompok etnis, agama dan kepercayaan, ras, kelompok masyarakat serta gender dalam Peraturan Desa.
RPJMN 2015-2019	RPJMN memberikan penegasan tentang pembangunan inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat adat minoritas dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

Tabel 2.1. Gender Equality di Indonesia (Lanjutan)

Dokumen	Substansi/Ketentuan
Peraturan Pemerintah No.75/2015 dan Instruksi Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Dalam RANHAM ini terdapat kelompok-kelompok rentan termasuk, perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat adat minoritas sebagai penerima manfaat utama dalam pemenuhan hak asasi manusia di semua bidang pembangunan seperti: sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dokumen ini mencakup arahan yang sangat jelas bagi semua Kementerian terkait dan sektoral pada tingkat lokal untuk melaksanakan agenda nasional Hak Asasi Manusia ini.
Pedoman perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap disabilitas, 2015	Pedoman ini dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang memberikan arahan bagi kementerian dan lembaga pemerintah dalam mengintegrasikan isu-isu disabilitas dalam program/kegiatan perencanaan dan penganggaran mereka.
Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM No. 7/2015	Rencana Strategis tentang Pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM
UU No. 8/2016 tentang Disabilitas	Berdasarkan proses ratifikasi, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan undang-undang baru tentang disabilitas yang terdiri dari 22 hak penyandang disabilitas dan 4 hak tambahan bagi perempuan penyandang disabilitas.

Perspektif dan Kebijakan *gender equality* di Indonesia, menjadi fokus penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2019) di Kabupaten Lampung Selatan. *Gender equality* menjadi relevan dikaitkan dengan tata kelola desa dan pekerjaan perempuan di luar sektor pertanian serta peluang pembangunan ekonomi bagi perempuan.

Gender equality dalam Tata Kelola Desa, berkaitan dengan UU No.6 tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), yang memberikan dasar hukum bagi desa-desa untuk menentukan dan mengelola pembangunan mereka sendiri serta mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun, terdapat indikasi bahwa perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok-kelompok minoritas

masing terbatas partisipasinya dalam pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan desa. Gambaran data dari Pendataan Potensi Desa (PODES) pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 4.485 dari 78.736 kepala desa dan kecamatan di 34 provinsi di Indonesia adalah perempuan (5,7 persen). Proporsi sekretaris desa dan kecamatan yang perempuan lebih tinggi, meskipun masih sangat rendah (7.156 dari 70.780 atau 10,1 persen). Permasyarakatan Desa (BPD), yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi musyawarah desa tentang pembangunan dan pengawasan desa atas penggunaan dana, BPD diharuskan untuk memiliki setidaknya satu wakil perempuan. Laporan Studi *Reality Check Approach* (2016) dalam Kompak (2017) yang dilakukan *Knowledge Sector Initiative* tentang Perspektif dan Pengalaman Pejabat Pemerintah Desa tentang Undang-undang Desa Baru (*Perspectives and Experience of Village Government Officials on the New Village Law*), menemukan bahwa perubahan bentang kepemimpinan dapat membuka peluang bagi perempuan dan orang-orang muda karena peran kepemimpinan menjadi semakin tidak menarik bagi generasi tua.

Sebuah studi PNPM yang dilakukan Gibson dan Woolcock (dalam Voss, 2008) mendapati pembelajaran yang didapat dari PNPM menunjukkan bahwa walaupun tindakan afirmatif dapat meningkatkan partisipasi perempuan, hal ini tidak serta merta akan menghasilkan pergeseran peran perempuan di desa, kendali atas aset, atau pengaruh dalam pengambilan keputusan, karena 75 persen keterlibatan mereka masih dalam cara pasif (hanya mendengarkan). Selain itu, studi Akatiga (2012) pada kelompok minoritas dalam PNPM menunjukkan bahwa kelompok yang terpinggirkan/terekslusi menghadapi sejumlah hambatan untuk dapat terlibat efektif dalam proses-proses yang dipimpin oleh masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan lokasi geografis yang terpencil, kurangnya waktu dan sumber daya yang tersedia untuk menghadiri pertemuan masyarakat, kurangnya informasi, dan dalam beberapa hal karena adanya diskriminasi.

Gender equality dalam konteks pekerjaan perempuan di luar sektor pertanian serta peluang pembangunan ekonomi bagi perempuan, maka tergambar jumlah tenaga kerja perempuan pada sektor formal semakin besar di Indonesia, tetapi partisipasi angkatan kerja perempuan tetap jauh di bawah laki-laki dan masih terdapat kesenjangan upah atas dasar identitas gender yang besar (Tresiana dkk, 2018). Meskipun demikian, dan

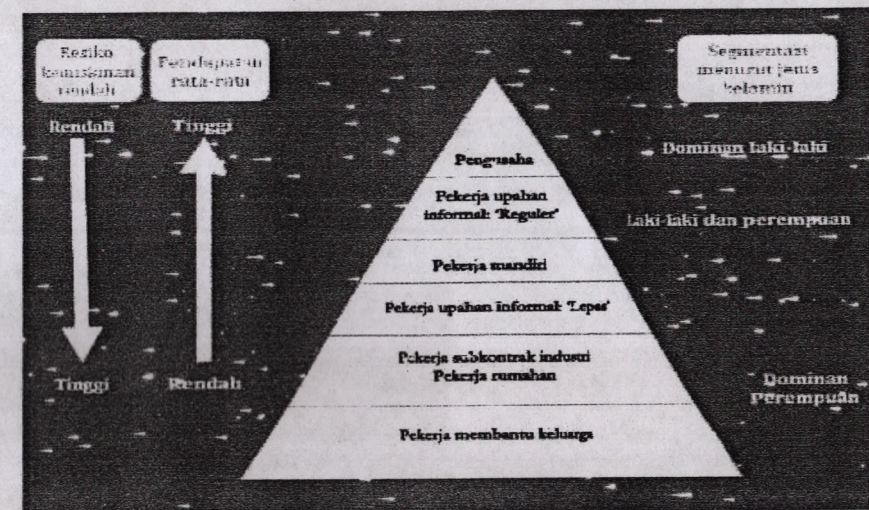
terlepas dari fokus pemberdayaan dan kesetaraan gender perempuan dalam RPJMN, hanya ada sedikit contoh inisiatif spesifik untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan, dan hal ini jarang menjadi prioritas yang dinyatakan dalam program yang relevan di sektor ini. Peluang dan minat perempuan untuk memasuki kerja pada sektor formal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk stereotip dan hambatan sosial dan budaya, kondisi kerja, dan kesulitan dalam menyeimbangkan peran ganda mereka. Perempuan mendominasi sektor informal dalam pertanian dan pekerjaan industri rumahan yang fleksibel namun dengan risiko lebih tinggi.

2.2 KEBIJAKAN INDUSTRI RUMAHAN KELOMPOK PEREMPUAN

Konsepsi industri rumahan berakar dari pemahaman pekerja rumahan (*home workers*). Di Indonesia, pekerjaan rumahan bukanlah hal baru dan pekerja rumahan seringkali disebut sebagai 'pekerja sub-kontrak'. Pekerjaan rumahan biasanya dilakukan oleh keluarga, sebagian besar perempuan, dari generasi ke generasi, dengan nenek, ibu dan anak perempuan terlibat dalam pekerjaan rumahan. Ada penelitian yang menyatakan bahwa pekerjaan rumahan sudah ada sejak tahun 1928 di industri tekstil. Meskipun sudah ada untuk waktu yang lama, mereka sebagian besar tidak terlihat dan tidak dipahami dengan baik tetapi sebagian orang berpendapat bahwa pekerjaan rumahan merupakan fenomena signifikan di pasar kerja (Gardiner,dkk, 2007). Sementara pekerjaan rumahan merupakan sumber pendapatan penting bagi banyak orang, dan pekerja rumahan memberi kontribusi penting untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat, mereka menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kondisi hidup dan kerja. Pekerjaan rumahan ditandai dengan upah rendah dan jam kerja panjang. Mereka bekerja di rumah terisolasi dari orang lain, sehingga mereka memiliki akses terbatas ke informasi dan sumber daya lainnya dan kurang memiliki suara dan perwakilan untuk berjuang menuju kerja layak. Mereka juga memiliki perlindungan hukum dan sosial yang terbatas dan mereka merupakan salah satu pekerja paling tidak beruntung.

Definisi kerja rumahan tidak mudah dirumuskan. ILO membutuhkan waktu sekitar 20 tahun sejak issue *home-workers* muncul di dunia hingga tertuang dalam Konvensi pekerja Rumahan 177 tahun 1996 (*The Homework*

Convention 177/1996) sebagai berikut: "pekerjaan rumahan didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang, yang disebut sebagai pekerja rumahan, (a) di rumahnya atau di tempat lain pilihannya, selain tempat kerja pemberi kerja, (b) untuk mendapatkan upah, (c) yang menghasilkan suatu produk atau jasa sebagaimana ditetapkan oleh pemberi kerja, terlepas dari siapa yang menyediakan peralatan, bahan atau input lain yang digunakan".



Sumber: Lim, 2015

Gambar 2.1. Pekerjaan informal: Hirarki penghasilan dan risiko kemiskinan menurut status kerja dan jenis kelamin

Lim (2015) mengaitkan pekerjaan rumahan dengan hirarki penghasilan, kemiskinan dan jenis kelamin, maka pekerjaan ini merupakan buruh, didominasi perempuan sebagai buruh, diupah oleh karena kerja yang telah dilakukan. Mereka bisa berasal dari berbagai kelompok kelas maupun tingkat pendidikan. Erat hubungannya dengan peran jender perempuan di dalam rumah tinggalnya (ranah domestik) sebagai ibu, istri dan pengurus rumah tangga, bekerja untuk upahpun disepatutkan dilakukan dalam rumah tinggalnya. Karena itu kerja rumahan dianggap paling cocok dilakukan wanita karena bisa tetap di dalam rumah melakukan peran jendernya sementara ia juga bekerja untuk upah. Pekerjaan rumahan ini juga mengambil rumah sebagai tempat kerjanya.

Ada dua kategori dasar pekerja berbasis rumahan sebagaimana dikemukakan Haspels dan Matsuura (2015). *Pertama*, Pekerja berbasis rumahan mandiri menanggung seluruh resiko menjadi operator mandiri. Mereka membeli sendiri bahan baku, persediaan, dan peralatan, dan membayar biaya utilitas dan transportasi. Mereka menjual sendiri barang jadi mereka, utamanya ke pelanggan dan pasar lokal tetapi kadang-kadang ke pasar internasional. Sebagian besar tidak mempekerjakan orang lain tetapi mungkin memiliki anggota keluarga tidak dibayar bekerja dengan mereka. *Kedua*, Pekerja berbasis rumahan sub-kontrak (disebut pekerja rumahan) dikontrak oleh pengusaha perorangan atau perusahaan, seringkali melalui perantara. Mereka biasanya diberi bahan baku dan dibayar per satuan. Mereka biasanya tidak menjual barang jadi. Namun, mereka sesungguhnya menanggung banyak biaya produksi: tempat kerja, peralatan, persediaan, utilitas, dan transportasi. Pekerja rumahan bukan pekerja rumah tangga yang bekerja di atau untuk rumah tangga melaksanakan tugas-tugas kerumahtanggaan. Mereka juga berbeda dengan pekerja berbasis rumah mandiri yang bekerja di rumah secara mandiri. Pada kenyataannya, pekerja rumahan dan pekerja mandiri memiliki banyak ciri yang sama, misalnya ketidakpastian kerja, pendapatan rendah, kondisi kerja dan hidup yang buruk yang seringkali di rumah di bawah standar dan kurangnya akses ke layanan dukungan publik atau swasta (Haspels dan A. Matsuura, 2015), Kedua kelompok tersebut juga kurang memiliki suara dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan layanan publik yang sangat penting untuk produktivitas mereka,

Kerja rumahan berhubungan langsung dengan sistem ekonomi yang lebih luas dari produksi barang dan jasa, dan dikontrol oleh kekuatan di luar rumah. Karena bekerja di rumah masing-masing, buruh wanita yang tergolong dalam pekerja rumahan ini tidak terorganisir. Secara soliter masing-masing bekerja sendiri-sendiri melakukan pekerjaan dirumahnya. Ada kalanya anggota keluarga dalam rumah tangga yang sama membantu bekerja, termasuk anak-anak. Karena terisolasi, mereka tak banyak mengetahui ketentuan-ketentuan perburuhan. Anggapan lelaki pencari nafkah utama dalam keluarga dan bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan membuat mereka memandang upah mereka pantas rendah.

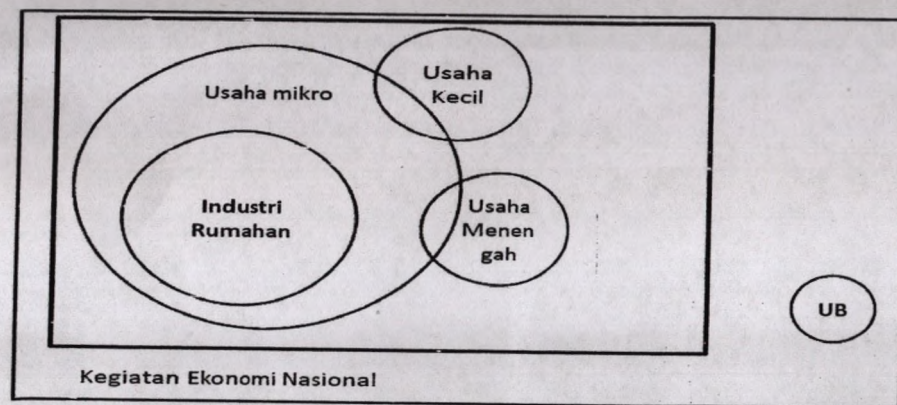
Di Indonesia, kerangka regulasi pekerjaan rumahan tidak secara eksplisit didefinisikan di dalam regulasi ketenagakerjaan nasional maupun dalam statistik nasional dan ada pemahaman yang berbeda tentang pekerjaan rumahan di kalangan pengambil kebijakan, masyarakat umum, dan bahkan kadang-kadang di kalangan pekerja rumahan sendiri. Faktanya, pekerjaan rumahan tidak secara eksplisit didefinisikan di dalam regulasi ketenagakerjaan nasional maupun dalam statistik nasional dan ada pemahaman yang berbeda tentang pekerjaan rumahan di kalangan pengambil kebijakan, masyarakat umum, dan bahkan kadang-kadang di kalangan pekerja rumahan sendiri. Secara praktik, pekerja rumahan dikecualikan dari cakupan UU Ketenagakerjaan karena tidak adanya konsensus mengenai status hukum pekerja rumahan serta pendapat umum di Indonesia bahwa UU Ketenagakerjaan hanya berlaku bagi pekerja di pekerjaan formal dan tidak untuk pekerja di perekonomian informal.

Menyikapi hal ini, maka pemerintah menggunakan pendekatan afirmatif melalui pendekatan kebijakan industri rumahan dalam menampakkan peran dan kerja perempuan pekerja rumahan. Melalui Kebijakan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2004, yang mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, maka terminologi pekerja rumahan disejajarkan dengan industri rumahan perempuan yang terklasifikasi pada pelaku usaha mikro. Kelompok yang terhitung sebagai pelaku Usaha Mikro ini, pada kenyataannya mempunyai potensi bagi perekonomian keluarga. Survei yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA RI) bekerjasama dengan IPB di tahun 2011, mendapati secara nasional Usaha Mikro memberikan kontribusi sebesar 30,25% bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha Mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan, oleh sebab itu pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menjadi sangat penting.

Konsepsi industri rumahan/*Cottage Industry* versi KPPA RI (2016) adalah: "suatu sistem produksi, yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di tempat rumah perorangan dan bukan di suatu lokasi khusus (pabrik)". Proses produksi tersebut memanfaatkan prasarana, sarana serta peralatan

produksi lainnya yang dimiliki oleh perorangan/kelompok usaha bersama/koperasi. Umumnya produk dari Industri Rumahan berupa buatan tangan (*hand made*), bersifat unik pada cara-cara yang berbeda nyata, serta sering dikaitkan dengan kearifan lokal (*local wisdom*) dan teknologi tepat sasaran. Dalam kenyataannya, produk Industri Rumahan sering diidentifikasi dengan daerah produksi (batik Pekalongan, tahu Kediri, payung Tasik) atau dengan nama keluarga (gudeg Bu Citro, bakso Cak Man, sarung Bugis).

Dalam konteks UU Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Industri Rumahan termasuk kelompok Usaha Mikro (*Micro Enterprises*), dimana banyak negara memasukkan pada kategori sektor informal. Sebagian besar Industri Rumahan belum mempunyai legalitas sebagai badan usaha dan seringkali tidak terdaftar dalam mekanisme perpajakan bisnis. Selain itu, Industri Rumahan dikelola oleh anggota suatu keluarga, meski ada pengecualian pada yang sudah dikategorikan maju dan menerapkan manajemen industri. Industri Rumahan bisa juga berwujud Kelompok Usaha Bersama yang terorganisir secara informal dan lentur dimana masing-masing anggotanya bekerja di rumah masing-masing.



Sumber: KPPPA RI, 2016

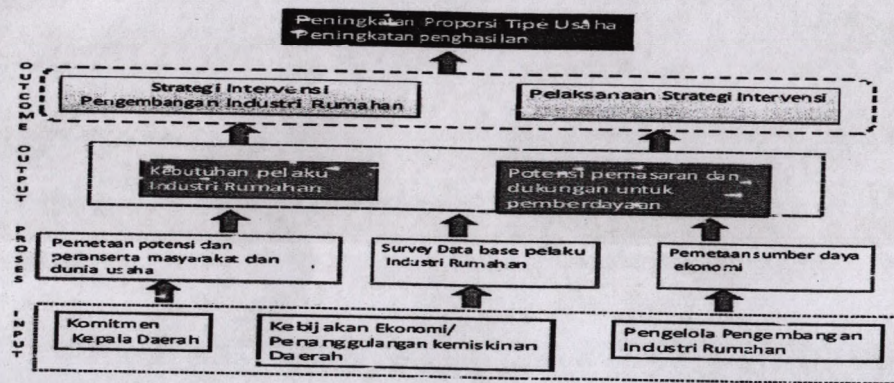
Gambar 2.2. Posisi Industri Rumahan

Regulasi yang mengatur IR adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016

Tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Perempuan.

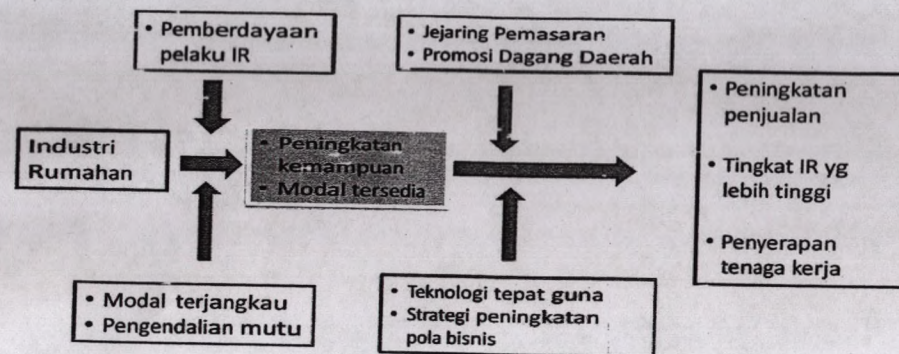
Survei lapang yang dilakukan IPB (dalam KPPPA RI, 2016), industri rumahan (IR) terklasifikasi dalam 3 kategori berdasarkan tingkat keberlanjutan usaha, modal, teknologi proses produksi yang digunakan, jumlah tenaga kerja dan sistem penjualan produknya, yaitu:

- 1) **Industri Rumahan (IR) Pemula.** IR Pemula umumnya produksi tidak kontinyu atau berdasarkan konsumen, biasanya pada acara/hari tertentu. Sistem penjualannya lepas artinya setelah produk dijual tidak ada lagi ikatan terhadap konsumennya atas produk tersebut. IR ini rentan bangkrut dikarenakan jadwal produksi yang tidak menentu serta manajemen keuangan usaha masih bergabung dengan keuangan keluarga. Modalnya masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri yaitu sekitar kurang dari 5 juta rupiah. Proses produksi masih sederhana yang dilakukan dengan manual tanpa bantuan mesin. Jumlah tenaga kerjanya masih sedikit yaitu sekitar 1-2 orang termasuk pemiliknya.
- 2) **Industri Rumahan (IR) Berkembang.** IR Berkembang umumnya produksi semi kontinyu dengan sistem penjualannya lepas. IR ini mudah berganti produk apabila dirasakan prospek penjualan produk menurun. Modalnya masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri dan sudah mulai meminjam dana dari LKM non-formal yaitu sekitar 5-25 juta rupiah. Proses produksi sudah menggunakan teknologi/semi masinal meskipun masih sederhana dengan jumlah tenaga kerjanya sekitar 3-5 orang termasuk pemiliknya.
- 3) **Industri Rumahan (IR) Maju.** IR Maju umumnya produksi sudah kontinyu dengan sistem penjualannya tertentu. Tingkat keberlanjutan usahanya tinggi karena sudah mampu mengatur usahanya dengan baik. Modalnya berkisar 25-50 juta rupiah yang berasal dari pribadi dan kredit dari LKM formal. Proses produksi sudah menggunakan teknologi tinggi/bersih dengan jumlah tenaga kerjanya sekitar 6-10 orang termasuk pemiliknya. Diharapkan setelah melampaui klasifikasi IR Maju maka seyogyanya Kementerian lain yang menangani Industri Kecil dapat melakukan pembinaan yang lebih intensif.



Sumber: KPPPA RI, 2016

Gambar 2.3. Model Proses Pengembangan IR



Sumber: KPPPA RI, 2016

Gambar 2.4. Desain Pengembangan IR

Beberapa dimensi penting dalam strategi pelaksanaan industri rumahan, sebagai berikut:

1. Permodalan. adalah salah satu kendala dalam pengembangan IR. Banyak pelaku IR yang tidak mengetahui informasi dan mendapatkan akses sumber permodalan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk menghimpun informasi tentang semua sumber permodalan yang ada di kabupaten/kota. Informasi ini digunakan untuk menyambungkan antara pelaku IR yang membutuhkan sumber permodalan. Kemampuan

pelaku IR sangat menentukan keberlangsungan dan kemajuan dari IR. Sebagian besar pelaku IR berada pada kategori tingkat yang paling rendah yaitu pemula. Kemampuan pelaku IR harus ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan keberlangsungan dan kemajuan usahanya.

2. Pemasaran yang terbatas. Pasar produk IR relatif terbatas, karena produknya dari segi kualitas dan kuantitas terbatas. Selain itu, wawasan tentang pasar juga terbatas. Sementara kemampuan pelaku IR sendiri terbatas, sehingga perlu dibantu memperluas pasarnya.
3. Pengembangan IR secara luas membutuhkan kebijakan sebagai landasan hukum dan strategi untuk dapat mengarahkan proses dan menggerakkan sumberdaya. Dalam banyak hal, IR juga masih harus dilindungi karena mereka belum dapat bersaing dengan industri yang lebih besar. Selain itu tujuan dan target dari pengembangan IR perlu ditetapkan sehingga arah dari upaya-upaya yang dilakukan mempunyai fokus yang jelas.
4. Koordinasi dengan kegiatan di luar program dan kegiatan Kabupaten/ Kota dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan lembaga/ instansi, perguruan tinggi, dan masyarakat setempat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan IR. Jika ada intervensi khusus, misalnya pelatihan motivasi atau pelatihan yang berkaitan dengan aspek psikososial, maka kegiatan ini dilakukan secara khusus, namun nantinya harus menjadi bagian dari program dan kegiatan yang ada di Kabupaten/kota.
5. Diperlukan adanya pendamping lapangan adalah kader yang ditunjuk oleh pemerintah. Pendampingan diperlukan untuk mengawal, memberikan konsultasi dan bantuan teknis dalam menindaklanjuti pengembangan kapasitas pelaku IR terkait pengembangan produk, perencanaan produksi, kualitas dan manajemen usaha serta keuangan sehingga kualitas produk IR yang dihasilkan lebih baik dengan produktivitas lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

2.2.1 Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Rumahan Kelompok Perempuan di Indonesia

Secara keseluruhan kondisi ekonomi penduduk Indonesia masih menunjukkan angka kemiskinan yaitu sebesar 11,22% (BPS, 2015) dengan jumlah penduduk 28,9 juta manusia. Dari penduduk miskin ini, perempuan merupakan kelompok yang rentan dan sering kali termarginalisasi. Data

KPPPA RI, tahun 2018 mencatat ada 57,76% kepala rumah tangga perempuan yang membeli beras miskin (raskin) selama 3 bulan terakhir, lebih banyak terjadi di pedesaan (73,15%) dibanding di pedesaan (43,44%), dan kepala rumah tangga perempuan lebih banyak berusaha sendiri sebesar 37,91% dibandingkan laki-laki 22,34%.

Padahal kelompok yang terhitung sebagai pelaku Usaha Mikro ini, pada kenyataannya mempunyai potensi bagi perekonomian keluarga. Secara nasional Usaha Mikro memberikan kontribusi sebesar 30,25% bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Dilaporkan bahwa Usaha Mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan, oleh sebab itu pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menjadi sangat penting. Ketahanan ekonomi rumah tangga dapat membangun ketahanan ekonomi masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan yang efektif yaitu melalui pengembangan Industri Rumahan (IR).

Survei yang dilakukan oleh KPPPA RI bekerjasama dengan IPB (2011) mendapati: 1) 73% IR dilakukan oleh tenaga kerja perempuan yang 36% lulusan SD dan 8% tidak sekolah; 2) Lebih dari 55% IR berada di pedesaan; 3) produk pangan mendominasi (76%), kerajinan tangan (8%), konveksi (5%); 4) IR tingkat sederhana merupakan 58% dari semua pelaku IR, mempekerjakan 1-3 orang dengan tingkat keberlangsungan yang masih rendah (3-6 bulan); 5) Pendapatan rata-rata tenaga kerja Rp 30.000 – Rp 50.000 per hari. Program piloting industri rumahan perempuan telah dilakukan secara masal pada 4764 pelaku usaha, yang tersebar di 46 desa/kelurahan, 27 kecamatan, 21 Kabupaten/Kota dan 16 provinsi.

Beberapa capaian yang diperoleh adalah sebagai berikut: (1) Hasil Produksi yang meningkat ; (2) Pendapatan Usaha Meningkat ; (3) Menciptakan lapangan pekerjaan dengan bertambahnya tenaga kerja; (4) Meluasnya jaringan pemasaran (*online* dan *offline*); (5) Sudah memiliki Ijin Usaha/PIRT; (6) Sudah terjalin Sinergitas dalam pengembangan pelaku IR antara OPD, CSR, sampai alokasi dana desa ; (7) Terbentuk pra koperasi/kelompok simpan pinjam (KPPPA RI, 2018).

Pemetaan capaian pengembangan IR secara nasional sampai dengan tahun 2018 tergambar sebagai berikut sebagai berikut:



Sumber: KPPPA RI, 2018

Gambar 2.5. Kategori IR Tahun 2016 dan 2017

Beberapa *best practice* perkembangan industri rumahan di Indonesia tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2. *Best Practice* IR Daerah

No	Daerah	Capaian IR Daerah
1	Bangka Tengah	Memasukkan unsur Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, Gabungan Organisasi Wanita, dan Dunia Usaha (General Manager Hypermart, GIANT, Semua pimpinan bank Cabang Koba) dalam Tim Pelaksana Pengembangan IR yang ditandatangani oleh Bupati

Tabel 2.2. Best Practice IR Daerah (Lanjutan)

No	Daerah	Capaian IR Daerah
2	Palembang	- Bappeda dan Litbang Kota Palembang telah memasukkan program IR sebagai salah satu program untuk pengurangan angka kemiskinan - Koordinasi yang baik untuk pendampingan pembentukan kawasan eko wisata kuliner Industri Rumah pempek
3	Cirebon	Bapelibangda melakukan pengawalan dan perencanaan anggaran bersama dalam pengalokasian anggaran 11 OPD pengalokasian anggaran Pengembangan IR pada tahun 2018
4	Rembang	- Pendampingan/KKU oleh Mahasiswa STIE YPPI Rombang (dibantu promosi dan pembuatan petunjuk jalan) - Pembuatan film Documenter IR oleh mahasiswa STIE YPPI
5	Kendal	- Anggaran IR Sudah terintegrasi pada APBDes - Sosialisasi dan pendaftaran pelaku IR untuk dapat terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja
6	Wonosobo	- Pembentukan pra koperasi bagi pelaku IR - Adanya pedoman SOP dalam pembuatan produk (Rengginang)
7	Lombok Tengah	Tahun 2018 sudah masuk dalam anggaran dana desa untuk pelatihan dan pemberian modal
8	Ternate	Sinergi seluruh OPD terkait pemenuhan kebutuhan Pelatihan pelaku IR, pertemuan koordinasi selalu dihadiri oleh Kepala Dinas sebagai pembuat keputusan.
9	Lampung Selatan	- Sudah memasarkan produk IR melalui Facebook, Bukalapak, Tokopedia dengan nama INDAH RASA - Membuka kios bersama sebagai untuk memasarkan produk hasil IR dan pengadaan bahan baku - Membuat rumah desain dan kemasan bersama

Tabel 2.2. Best Practice IR Daerah (Lanjutan)

No	Daerah	Capaian IR Daerah
10	Gianyar	- Mengintegrasikan program IR dengan program Desa Siaga Swatantra yaitu program rutin yang dilaksanakan setiap tahun melalui anggaran induk APBD untuk kegiatan yang berbasis pemberdayaan masyarakat desa, sehingga bisa masuk juga dalam BUMDES - Sudah mengalokasikan program IR dalam APBD tahun 2017 sebesar kurang lebih 600 juta dan tahun 2018 kurang lebih 700 juta.
11	Natuna	- Mengintegrasikan IR dengan program pengentasan kemiskinan pada Dinas Sosial yang nomenklaturnya bergabung dengan PPPA melalui KUBE. - Mengintegrasikan program IR ini dengan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang merupakan program prioritas Kementerian Kelautan Perikanan.
12	Donggala	Pemasaran produksi IR melalui gerai UKM di bandara
13	Tulungagung	Kerjasama dengan Perguruan Tinggi (LPPM UNITA) dan melibatkan mahasiswa KKN dalam pendampingan
14	Solok	Bekerjasama dengan perguruan tinggi menerbitkan buku "profil Industri Rumah Solok" sebagai strategi awal untuk perencanaan pengembangan IR ke depan

Sumber: KPPPA RI, 2018

2.3 INOVASI KEBIJAKAN KLASER INDUSTRI RUMAHAN

Klaster industri (rumahan) pada dasarnya bukan konsep yang sama sekali baru. Namun sejalan dengan perkembangan jaman, telaah konsep/teori dan pengalaman empiris berbagai pihak berkembang dari waktu ke waktu dan muncul kebaruan konsep/teori pada lokus khusus. Dalam literatur pembangunan wilayah, perwujudan strategi pengembangan daerah secara praktis sebagaimana dikemukakan Kuncoro Mudrajat (2002), terletak

pada aktualisasi konsep pembangunan wilayah secara utuh dan terpadu (*comprehensive and integrated area development concept*). Prinsip penting dalam pelaksanaan pendekatan pembangunan wilayah yang utuh dan terpadu adalah kemampuan menemu kenali potensi wilayah yang ada untuk dikembangkan dengan berbagai masukan program pembangunan. Kluster dengan padanan kata Industri (*industrial distric*), pertama kali didefinisikan oleh Alfred Marshal, dilanjutkan dengan Becattini (dalam Kuncoro, 2002) yakni sebagai suatu sentra industri (*industrial distric*) sebagai kluster produksi tertentu yang berdekatan, sedangkan Becattini mendefinisikan sebagai wilayah sosial yang ditandai dengan adanya komunitas manusia dan pelaku usaha dan industri, serta keduanya cenderung bersatu.

Seorang ahli, yaitu Porter (1998), berpendapat bahwa Klaster (*Cluster*) merupakan pengertian yang lazim digunakan dalam Ilmu Ekonomi Regional untuk mendefinisikan pengelompokan industri sejenis dalam suatu kawasan dan ketika kegiatan industri itu bermacam-macam kemudian disebut aglomerasi. Dalam perkembangan ketika klaster menghasilkan praktek terbaik pengembangan industri di beberapa negara, seperti yang terjadi pada klaster tertua industri galangan kapal di Norwegia, maka klaster juga diterima sebagai pengertian pendekatan pengembangan industri.

Beberapa perdebatan dan pendapat tentang klaster digambarkan sebagai berikut: **Pertama**, Bappenas (2006), menggambarkan klaster sebagai kelompok usaha industri yang saling terkait. Klaster mempunyai dua elemen kunci, yaitu: perusahaan dalam harus saling berhubungan, dan berlokasi di suatu tempat yang saling berdekatan, yang mudah dikenali sebagai suatu kawasan industri. Kedekatan lokasi dimaksudkan untuk meningkatkan kontak antar perusahaan dan meningkatkan nilai tambah pada pelaku yang terlibat dalam klaster. Kedekatan lokasi juga berperan dalam menciptakan efisiensi waktu dan biaya. Keunggulan dibentuknya klaster industri adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya transportasi dan transaksi, mengurangi biaya sosial, menciptakan aset secara kolektif, dan meningkatkan terciptanya inovasi. **Kedua**, Sujadi et al (2008) berupa upaya pengelompokan industri inti yang saling berhubungan erat, baik dengan industri pendukung (*supporting industries*), industri terkait (*related industries*), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, dan juga lembaga terkait. Manfaat klaster ini selain

untuk mengurangi biaya transportasi dan transaksi, juga untuk meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi. Meski istilah kluster definisi kerja sering diberikan sebagai "*pemusatan geografis industri-industri terkait dan kelembagaannya*", namun definisi ini tidak secara jelas mengidentifikasi batas-batas geografis, sisi bisnis klaster diidentifikasi atas daerah yang luas dimana ada pertalian-pertalian antar industri. Namun jika ditinjau dari segi studi pembangunan bahwa kepentingan yang besar diletakkan pada kedekatan geografis, dengan menyoroti sisi kelemahan pertalian industri tersebut. Kedekatan geografis secara tradisional dipandang sebagai faktor yang paling penting dalam memberi kontribusi terhadap ekonomi eksternal. Akan tetapi seiring dengan perkembangan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi akan mengurangi pengaruh kedekatan geografis tersebut. **Ketiga**, Untari (2005), Klaster industri kecil adalah sekumpulan usaha kecil yang terdiri dari usaha inti dan usaha penunjang yang muncul dan saling bekerjasama pada satu lokasi geografis tertentu untuk mencapai kondisi yang paling ekonomis baik bagi masing-masing usaha tersebut maupun secara keseluruhannya. Definisi tersebut memperjelas bahwa ketika menyebutkan klaster unsur yang utama harus ada adalah aktor yang ada dalam klaster yaitu usaha inti dan usaha-usaha penunjang, serta terjadi kerjasama dalam proses produksi sehingga mencapai kondisi ekonomis bagi masing-masing pelaku. Pada kenyataannya teori tentang klaster tidak menggambarkan kondisi yang statis, klaster berubah dan/atau berkembang dari waktu ke waktu. Sebuah Klaster yang dimulai sebagai satu jenis usaha dan dapat berakhir pada jenis yang sama sekali berbeda.

Islami (2014), berpendapat bahwa terdapat tiga hal mendasar yang dicirikan oleh klaster industri, terlepas dari perbedaan struktur, ukuran ataupun sektornya, yaitu: 1) Komonalitas/Keserupaan/Kebersamaan Kesatuan (*Commonality*); yaitu bahwa bisnis-bisnis beroperasi dalam bidang-bidang "serupa" atau terkait satu dengan lainnya dengan fokus pasar bersama atau suatu rentang aktivitas bersama; 2) Konsentrasi (*Concentration*); yaitu bahwa terdapat pengelompokan bisnis-bisnis yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi; 3) Konektivitas (*Connectivity*); yaitu bahwa terdapat organisasi yang saling terkait/ bergantung (*interconnected/ linked/ interdependent organizations*) dengan beragam jenis hubungan yang berbeda.

Sedangkan pengertian "industri" sendiri mempunyai arti luas sebagai himpunan bisnis tertentu, bukan hanya industri pengolahan atau manufaktur saja. Yang dimaksud dengan "klaster industri" adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah (Porter, 1998). Kelompok industri spesifik tersebut merupakan jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (biasanya disebut dengan industri inti/core industries - yang menjadi "fokus perhatian," industri pendukungnya/supporting industries, dan industri terkait/related industries), pihak/lembaga yang menghasilkan pengetahuan/ teknologi (termasuk perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa/litbangyasa), institusi yang berperan menjembatani/*bridging institutions* (misalnya broker dan konsultan), serta pembeli, yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai (*value adding production chain*).

Pandangan Porter mengenai klaster industri adalah hal yang paling banyak dikutip dalam kajian-kajian yang ditemukan: "A consequence of the system of [diamond] determinants is that a nation's competitive industries are not spread evenly through the economy but are connected in what I term cluster consisting of industries related by links of various kinds" (Porter, 1990). Pendapat Nugroho (2011), meskipun Porter belum mendefinisikasi klaster industri secara jelas tetapi ia telah menghubungkan antara kinerja sebuah negara dalam ekonomi global yang diringkaskan dalam kata "daya saing" dengan klaster industri. Lebih lanjut Porter menilai daya saing dibentuk oleh interaksi dari beberapa faktor yang disebut sebagai faktor "diamond". Diamond dibentuk oleh (1) *faktor condition*, (2) *demand conditions*, (3) *related and supporting industries*, dan (4) *firm strategy, structure and rivalry*. Dia juga memasukkan 2 faktor konteks yang berhubungan secara tidak langsung melalui: (1) *role of chance* dan (2) *role of government*. Faktor faktor ini secara dinamik mempengaruhi posisi daya saing perusahaan dalam suatu negara. "competitive advantage in advanced industries is increasingly determined by differential knowledge, skills and rates of innovation which are embodied in skilled people and organizational routines" (Porter, 1998). Hasil hubungan faktor-faktor ini mungkin akan menunjukkan pola klaster industri, dimana hubungan antara bisnis (dan organisasi) seharusnya mendukung pencapaian *competitive advantage*.

Beberapa kajian menunjukkan beragam definisi dan jenis-jenis klaster. Porter (1998), misalnya, membagi klaster menurut adopsi teknologi anggotanya ke dalam (1) klaster teknologi (kelompok dengan sadar menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi modern) dan (2) klaster *know-how* (anggota kelompok menggunakan pengalaman dan pengetahuan turun-temurun). Sedangkan literatur-literatur lainnya kebanyakan membagi klaster menjadi (1) klaster regional (lebih menitik beratkan pada pengelompokan usaha dalam satu wilayah dengan batasan yang jelas, atau (2) klaster bisnis (menitik beratkan pada jejaring kerjasama antarperusahaan untuk saling berbagi kompetensi dan sumberdaya). Kementerian Negara Koperasi dan UKM sendiri menggunakan pembagian yang terakhir ini. Klaster yang ideal adalah sinergi beberapa aktivitas usaha UKM yang saling terkait baik dari aspek proses produksi yang melibatkan UKM di sektor hulu sampai hilir, maupun usaha jasa yang dikembangkan oleh UKM sebagai penunjang aktivitas bisnis dalam klaster.

Dari beberapa perdebatan dan definisi di atas, maka dapat disimpulkan definisi klaster industri adalah hasil hubungan faktor-faktor ini mungkin akan menunjukkan "jaringan (industri oleh penciptaan/peningkatan dan rekayasa/*industries* - yang menjadi inti/core pola klaster industri, dimana hubungan antara bisnis (dan organisasi) seharusnya mendukung pencapaian *competitive advantage*". Lingkup geografis klaster industri dapat sangat bervariasi, terentang dari satu desa saja atau salah satu jalan di daerah perkotaan sampai mencakup sebuah kecamatan atau provinsi. Sebuah klaster industri dapat juga melampaui batas negara menjangkau beberapa negara tetangga (misal Batam, Singapura, Malaysia). Selanjutnya, fokus perhatian adalah pada "industri pemasok/supplier industries, industri industri terkait/related industries, pihak/lembaga yang menghasilkan pengetahuan/ teknologi (termasuk perguruan dan Litbang), institusi yang berperan menjembatani/*bridging institutions* (misalnya broker dan konsultan), serta pembeli, yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai (*value adding production chain*)"

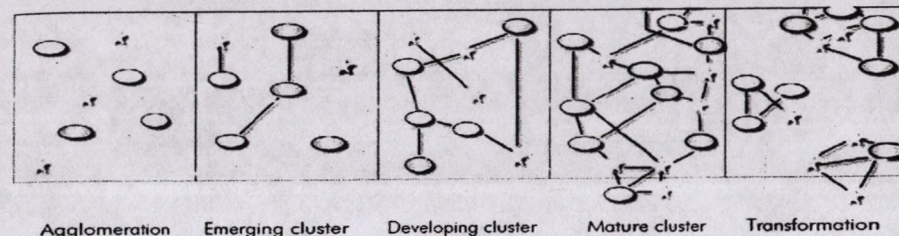
Pendekatan untuk mengembangkan inisiatif klaster di daerah, telah diringkaskan dan distandarisasikan dalam Pedoman Umum Pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Klaster (Surat Edaran Mendagri No 500/1404/V/Bangda Tanggal 30 Juni 2009). Landasan kebijakan

mendeskripsikan, agar strategi pengembangan dapat berjalan dengan efektif, tidak melakukan pengulangan tindakan yang tidak perlu, maka perlu dilakukan diskripsi posisi pada tahapan pengembangan kluster. Dengan deskripsi tersebut akan tampak apakah posisi kluster dari suatu produk masih dalam tahapan awal (sentra) atau sudah sampai pada tahapan selanjutnya. Oleh sebab itu dalam rangka menstudi tentang eksistensi sebuah kluster perlu diketahui perkembangan (evolusi) strata pada kondisi mana kluster tersebut berada.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkonsepkan dengan apa yang disebut dengan evolusi kluster (*Cluster trajectories*), khusus di negara berkembang. Peter Knorringa (1998) dalam tulisannya "*New Dimensions in Local Enterprise Co-operation and Development: From Cluster to Industrial Districts*", memperkenalkan tipologi kluster industri. Setiap kluster dibentuk oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Akan tetapi diluar keempat kondisi tersebut pada umumnya kluster di Negara berkembang dapat mengalami perkembangan atau perubahan yang kemudian disebut dengan tranjectory (evolusi). Terjadi pergeseran pada dinamika perkembangan kluster, dan masalah utama adalah apakah adakemungkinan banyak kluster aktif berubah menjadi entitas yang lebih hidup. Beberapa penulis telah menggunakan konsep "*trajectory of cluster development*" untuk menyatakan tentang konsep dinamika kluster.

Schmitz dan Nadvi (1999) berpendapat klustering memungkinkan/ memberikan peluang bagi usaha kecil untuk tumbuh dalam langkah-langkah "riskable" melalui kolaborasi. Sejumlah usaha dengan modal kecil, keterampilan dan bakat kewirausahaan dapat dibuat untuk mempertimbangkan terjadinya kerjasama antarprodusen. Dinamika kluster dengan berfokus pada adopsi inovasi yang memungkinkan perusahaan untuk membuat produk yang lebih baik yang bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Studi keduanya menggambarkan bahwa pengembangan kluster dapat diartikan bahwa ketika pengusaha lokal bergerak dan mendapat keuntungan melampaui keuntungan ekonomi eksternal, maka skala kluster akan menjadi besar karena antar perusahaan mengintensifkan kolaborasi. Kerjasama tersebut harus dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan saja, dan pengusaha kecil melihatnya sebagai strategi untuk berbagi biaya

dan risiko yang terkait dengan perubahan teknologi. Mereka berkonsentrasi pada transformasi hubungan dalam cluster sebagai hasil dari proses inovasi.



Sumber: Aderson (2004)

Gambar 2.6. Gambar Siklus Perkembangan Kluster

Paralel di atas, Kuncoro (2002) melihat ada 3 strata jenis kluster industri, yakni 1) *Specialized industrial distric* yang berdasar pada kuster produksi dengan spesialisasi secara geografis; 2) *industrial complex model* yang bercirikan hubungan antar perusahaan pada suatu kawasan industri, dan 3) *social network model* yang berdasar pada respon ekonomi terhadap tingkat integrasi sosial. Anderson (2014) melihat siklus perkembangan kluster: *Pertama*, Aglomerasi: pada suatu daerah berkumpul sejumlah perusahaan dan pelaku usaha, dimana tidak ada saling keterkaitan diantara mereka. *Kedua*, Kluster Baru: Sebagai embrio untuk Kluster sejumlah usaha dalam aglomerasi mulai bekerja sama di sekitar kegiatan inti, dan menyadari peluang umum melalui linkage mereka. *Ketiga*, Kluster Berkembang: Munculnya beberapa pelaku baru dalam kegiatan yang sama atau pelaku usaha dari luar daerah "tertarik" masuk ke daerah, hubungan baru berkembang antara semua pelaku usaha tersebut. IFC (*Institution for Collaboration*) formal atau informal dapat memasuki lapangan. Seringkali label, website, konotasiumum, terkait dengan wilayah dan aktivitas, mulai muncul. *Keempat*, Kluster Dewasa: Sekelompok kluster dewasa telah mencapai massa kritis tertentu. Hal ini juga menyebabkan mereka mengembangkan hubungan di luar kluster, untuk kluster lain, kegiatan, regions. Aktivitas tersebut merupakan dinamika internal penciptaan perusahaan baru melalui startup, usaha patungan, spin-off. *Kelima*, Kluster Transformasi: Seiring dengan berjalannya waktu, pasar, teknologi, dan proses perubahan, seperti halnya kelompok. Agar cluster untuk bertahan hidup, berkelanjutan dan menghindari stagnasi dan pembusukan, itu harus

berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan ini. Hal ini dapat mengambil bentuk transformasi menjadi satu atau beberapa kelompok baru yang fokus di sekitar kegiatan lain atau hanya perubahan dalam cara bahwa produk dan layanan yang diberikan.

Sementara itu berdasarkan SE Mendagri 500/1404/V/ Bangda/ 2009, Berikut digambarkan tahapan dari pengembangan pemberdayaan ekonomi berbasis klaster ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a) Klaster Statis (Sentra) , Klaster statis sebetulnya belum dapat dikatakan sebagai klaster, tetapi sentra produksi yang pasif. Sentra merupakan kelompok atau kumpulan para produsen suatu produk sejenis di kawasan yang sama. Kerjasama usaha antar pelaku masih terbatas persaudaraan. Sebagian besar produsen tersebut belum mampu menggali peluang pasar, bahkan tidak mampu mengenali siapa target pasar mereka di luar kawasannya, berapa volume permintaannya. Para produsen ini hanya mengetahui pelanggan tertentu atau tengkulak, yang biasanya datang ke masing-masing produsen.
- b) Klaster Pemula, Klaster pemula disebut juga klaster aktif. Klaster ini sudah mampu melakukan pengembangan PUD dalam hal teknik produksi, serta sudah mampu mengembangkan pemasaran domestik atau ekspor ke luar daerah. Tapi klaster jenis ini masih terkendala dengan masalah kualitas dan kuantitas produk, serta kontinuitas permintaan. Pelaku klaster ini mencari pasar biasanya melalui perantara jasa pedagang dari luar daerah.
- c) Klaster Dinamis, Pada klaster ini pemasaran produk sudah menjangkau ke luar negeri, tidak hanya domestik. Heterogenitas internal merupakan kata kunci kemajuan klaster dinamis. Namun masih ada kendala yang menghambat, yaitu biasanya pelaku usaha yang menjadi pelopor umumnya jauh lebih berkembang pesat dibanding dengan pelaku-pelaku usaha atau anggota lainnya dalam klaster ini. Pada umumnya pelaku usaha pelopor cenderung lebih mudah menjalin hubungan dengan pihak di luar klaster.
- d) Klaster Maju (*advance*), Hanya sedikit klaster yang sudah masuk dalam kategori ini. Cirinya adalah mereka sudah dapat mengembangkan kerjasamanya dengan berbagai pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam pengembangannya, yaitu sektor perbankan atau lembaga

keuangan, lembaga pendidikan, penyediaan bahan baku, *Business Development Service* (BDS), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pemerintah daerah. Bahkan kelompok ini sudah mampu memanfaatkan kerjasama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi.

Dalam konteks pengembangan produk dan inovasi untuk meningkatkan daya saingnya. Klaster maju, mampu memperluas keunggulan geografisnya dengan semakin menyebar dan membuat kerja sama dengan daerah sekitarnya. Kata kunci keberhasilan kelompok ini adalah derajat spesialisasi antar-pelaku usaha tinggi, diimbangi tingkat kerjasama atau kemitraan di antara mereka. Selain itu mereka secara kelompok sudah mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak penunjangnya. Namun sebenarnya tingkat pencapaian tertinggi dari klaster jenis ini adalah apabila sudah mampu membentuk sinergitas antar daerah dan saling melengkapi (komplementer). Kerjasama ini diperluas menjadi antar daerah dan antar sektor, misalnya klaster-klaster produksi kerajinan tertentu, akan bisa dirangkai menjadi klaster besar kepariwisataan, dalam wujud daerah tujuan wisata, sehingga berbagai klaster produksi lainnya, baik industri kerajinan atau klaster produk pertanian. Sehingga secara keseluruhan membentuk sinergi daya saing daerah yang kokoh dan kuat.

Berdasarkan telaah tinjauan teoretis tentang definisi klaster, tahapan perkembangan klaster dan evolusi klaster yang didefinisikan beberapa ahli maupun landasan kebijakan, maka elemen-elemen perkembangan klaster yang menjadi rujukan dikelompokkan menjadi 4 Faktor, yaitu:

- 1) Kelembagaan ; Kelembagaan dalam klaster, adalah merupakan aktivitas pada klaster yang termanajemeni oleh organisasi yang terstruktur dan dapat menjadi roda penggerak dinamikan klaster tersebut. Indikator yang dipakai untuk melihat variabel kelembagaan adalah (1) Tahun Mulai Pembentukan Klaster (2) Jumlah Unit Usaha dalam klaster (3) Perkembangan Unit Usaha
- 2) Aktivitas Usaha ; Aktivitas usaha yang dimaksudkan adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit usaha yang ada dalam klaster, mulai dari aspek produksi sampai pemasaran. Sejalan dengan tujuan penelitian untuk melihat perkembangan klaster maka indikator yang dipakai untuk mengukur kondisi aktivitas usaha adalah (1) Jenis produk yang dihasilkan, (2). Jenis usaha yang ada di dalam klaster,

- (3) Perkembangan Inovasi Produk, (4) Perkembangan penggunaan teknologi dan (5). Jangkauan aktivitas usaha dalam pengadaan bahan baku dan pengembangan produk. (6). Kondisi Permintaan
- 3) Kinerja Usaha; Kinerja Usaha adalah ukuran yang dipakai untuk melihat seberapa besar tiap usaha yang ada dalam klaster mendapat keuntungan dan efisiensi dari kegiatan usaha yang terspesialisasi karena klaster yang terbentuk. Untuk melihat aktivitas kinerja ini digunakan (1) nilai tambah, (2) Tingkat keuntungan dan (3) Perkembangan Orientasi Pasar.
 - 4) Konektivitas dan Peran pemerintah ; Konektivitas dan peran pemerintah diartikan sebagai terdapatnya organisasi yang saling terkait dengan beragam jenis hubungan yang berbeda. Untuk melihat konektivitas ini digunakan indikator bentuk (1) kerjasama vertikal (antar pengusaha), (2) bentuk kerjasama horisontal (antara pengusaha), (3) Spesialisasi Usaha dalam Klaster (4) Jumlah jenis lembaga yang ada dalam klaster (5) Hubungan dengan pemerintah

Sedangkan strata/evolusi pengembangan klaster yang menjadi rujukan adalah:

- 1) Sentra, merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu dimana didalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditi kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri dari sekumpulan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Di area sentra tersebut terdapat kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan dan sumberdaya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi di bawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi.
- 2) Klaster Pemula (Start Up), adalah klaster dengan Kelembagaan yang belum kompleks, pendiriannya diinisiasi oleh pemerintah, mulai terbentuk masih kurang dari 2 tahun, Aktivitas Usaha sederhana, teknologi masih tradisional. Kinerja Usaha dalam nilai tambah dan keuntungan masih belum terdistribusi secara merata pada setiap pelaku usaha, pemasarannya masih lokal. Dari variabel konektivitas keterlibatan lembaga pendukung masih sedikit dan pola hubungan masih sederhana dan berada di luar klaster.

- 3) Klaster Dinamis (*Growth*), adalah klaster dengan Kelembagaan yang sudah mulai menuju pada kompleksitas dalam arti organisasi dalam klaster sudah termanajemeni walaupun belum dalam lembaga manajemen klaster, pendiriannya diinisiasi karena ada interest dari sesama pengusaha dalam klaster, mulai terbentuk antara 3-4 tahun yang lalu. Aktivitas Usaha sudah lebih kompleks ada inovasi produk dan menggunakan teknologi moderen. Kinerja Usaha dalam nilai tambah dan keuntungan masih mulai terdistribusi secara merata pada setiap pelaku usaha walaupun belum semua, pemasarannya lokal sampai regional. Dari variabel konektivitas keterlibatan lembaga pendukung sudah ada dan sudah terkoneksi dengan kegiatan usaha yang berada di dalam klaster.
- 4) Klaster Maju (*Mature*), adalah klaster dengan Kelembagaan yang sudah sangat kompleks, pendiriannya diinisiasi oleh pengusaha sendiri, sudah sangat kompleks sudah terdapat manajemen klaster, mulai terbentuk antara 5-10 tahun yang lalu. Aktivitas Usaha sudah menggunakan teknologi dan inovasi, permintaan sudah sampai pada Internasional. Kinerja Usaha dalam nilai tambah dan keuntungan sudah terdistribusi secara merata pada setiap pelaku usaha, pemasarannya sudah internasional. Dari variabel konektivitas keterlibatan lembaga pendukung sudah tertata dengan baik dan berada dalam klaster maupun dari luar klaster.
- 5) Klaster Menurun (*Decline*), adalah klaster dengan Kelembagaan yang belum kompleks, pendiriannya diinisiasi bisa oleh pemerintah atau interest dari pengusaha sendiri, sudah berdiri lebih dari 10 tahun namun tidak juga terbentuk organisasi manajemen klaster yang terorganisi dengan baik. Aktivitas Usaha dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Kinerja Usaha dalam nilai tambah dan keuntungan masih belum terdistribusi secara merata pada setiap pelaku usaha, pemasarannya pernah menjangkau regional atau internasional namun sekarang mengalami penurunan. Dari variabel konektivitas keterlibatan lembaga sedikit dan pola hubungan sederhana
- 6) Dormant/Statis, adalah klaster dengan kondisi stagnan atau tidak ada perkembangan yang menunjukkan perubahan ke arah berkembang walaupun sudah lama eksis di suatu tempat. Keuntungan ekonomis tidak dirasakan oleh pihak-pihak yang berusaha karena mereka melakukan usahanya karena kedekatan secara geografis. Tidak ada perkembangan

inovasi terhadap produk yang dihasilkan dan penggunaan teknologi dari waktu ke waktu. Perbedaan yang jelas dengan sentra adalah dalam hal waktu dan keterlibatan stakeholder. Usia aglomerasi lebih lama dibandingkan sentra, dan stakeholder yang terlibat di dalamnya sudah tidak ada lagi karena produk yang dihasilkan tidak dapat dikembangkan atau mendatangkan nilai tambah.

2.4 KESIMPULAN

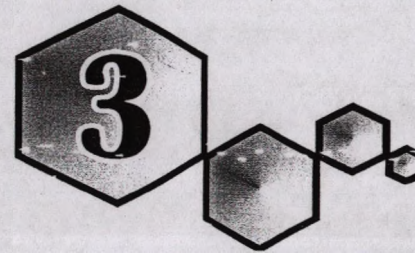
Perspektif *sustainable development goals* (SDGs) dan *gender equality* merupakan basis untuk memahami keberdayaan dan kesejahteraan kelompok perempuan. Salah satu upaya SDGs yang menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan telah tertulis bahwa *gender equality* adalah "*achieve gender equality and empower all women and girls*", kesetaraan gender ini dibuat untuk mengakhiri semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan bukan hanya hak asasi manusia, tapi juga penting untuk mempercepat SDGs. Memberdayakan perempuan dan anak perempuan memiliki *multiplier effect*, dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh level.

Implementasi kedua perspektif tergambar nyata dari pendekatan afirmatif melalui kebijakan industri rumahan (KIR), yang menempatkan peran dan kerja perempuan pelaku industri rumahan (IR), melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, sebagai wujud kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Strategi IR telah merubah terminologi pekerja rumahan dengan mensejajarkan industri rumahan perempuan yang terklasifikasi pada pelaku usaha mikro. Usaha Mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan, oleh sebab itu pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menjadi sangat penting.

Inovasi kebijakan kluster menjadi daya dorong yang diharapkan memiliki strategi maksimal untuk mengembangkan wilayah dalam pemanfaatan potensi ekonomi. Pengkajian awal tentang kluster melalui gambaran elemen-elemen penting bagi pembentukan kluster dan tipologi kluster, dapat berguna dan menjadi landasan bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan konsep dan bentuk kluster yang ideal untuk diterapkan bagi pelaku usaha kelompok perempuan.

Elaborasi gagasan perspektif dan model diharapkan mampu mengantisipasi persoalan dan isu-isu pemberdayaan bidang ekonomi kelompok perempuan secara cerdas dan memberi keberpihakan dan harapan bagi kesejahteraan kelompok khususnya perempuan dan juga masyarakat.

-oo0oo-



MODEL RINTISAN KLUSTER INDUSTRI RUMAHAN BERBASIS *TRIPLE HELIX*: SEBUAH INOVASI KEBIJAKAN

Industri rumahan (IR) telah membuktikan proporsi kontribusinya yang signifikan dan terus meningkat dalam dinamika perkembangan ekonomi, terutama di desa. IR merupakan potensi besar yang ada di masyarakat yang jika dikelola dengan baik, akan memberi nilai tambah yang sangat signifikan untuk peningkatan kemampuan dan ketahanan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha IR adalah perempuan dan mereka harus ditingkatkan kemampuannya agar nilai tambah dari pekerjaan mereka meningkat dan dapat memberikan lebih banyak peluang untuk memajukan dirinya. Upaya untuk meningkatkan IR ini juga dipicu oleh kebutuhan lapangan kerja dan penghasilan yang akan mengurangi resiko perempuan untuk masuk pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya, seperti pekerja migran tanpa persiapan yang cukup.

Namun demikian, pengembangan industri rumahan memiliki beberapa kendala antara lain adalah modal, pasar, sarana prasarana, inovasi, dukungan pemerintah dan kapasitas diri. Dibutuhkan intervensi pengelompokan industri rumahan dalam satu kawasan yang berdekatan, yang mudah dikenali sebagai suatu kawasan industri. Kedekatan lokasi dimaksudkan untuk meningkatkan kontak antar perusahaan dan meningkatkan nilai tambah pada pelaku yang terlibat dalam klaster. Kedekatan lokasi juga berperan dalam menciptakan efisiensi waktu dan biaya. Keunggulan dibentuknya klaster industri adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya

transpotasi dan transaksi, mengurangi biaya sosial, menciptakan asset secara kolektif, dan meningkatkan terciptanya inovasi (Bappenas, 2006).

Fenomena kluster industri telah menarik perhatian para ekonom untuk terjun dalam studi masalah lokasi sehingga memunculkan paradigma baru yang disebut ekonomi geografi baru (Kuncoro, 2002), Porter (1998) melalui penggambaran peta ekonomi yang didominasi oleh kluster (*cluster*). Industri cenderung beraglomerasi di daerah-daerah di mana potensi mereka mendapat manfaat akibat lokasi perusahaan yang saling berdekatan. Sedangkan makna "industri" sendiri mempunyai arti luas sebagai himpunan bisnis tertentu, bukan hanya industri pengolahan atau manufaktur saja. Sehingga makna "kluster industri" adalah kelompok industri spesifik yang dihubungkan oleh jaringan mata rantai proses penciptaan/peningkatan nilai tambah (Taufik, 2011). Kelompok industri spesifik tersebut merupakan jaringan dari sehimpunan industri yang saling terkait (industri inti) yang menjadi "fokus perhatian" industri pendukungnya dan industri terkait, pihak/lembaga yang menghasilkan pengetahuan/teknologi (perguruan tinggi dan lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa/litbangnya), institusi yang berperan menjembatani/*bridging institutions* serta pembeli, yang dihubungkan satu dengan lainnya dalam rantai proses peningkatan nilai (*value adding production chain*).

Pengembangan kluster, membutuhkan intervensi beberapa pihak untuk mendorong munculnya pionir-pionir baru dan mengembangkan sayap pelaku IR perempuan yang berkualitas, yaitu pihak akademisi perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku bisnis yang terangkum dalam model Triple Helix. Model triple helix, menjadi payung yang menghubungkan antara Cendekiawan (*Intellectuals*), Bisnis (*Business*), dan Pemerintah (*Government*) dalam kerangka bangunan ekonomi perempuan. Dimana ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri rumahan. Hubungan yang erat, saling menunjang, dan bersimbiosis mutualisme antara ke-3 aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model ekonomi pemberdayaan perempuan yang akan menentukan pengembangan ekonomi berkesinambungan.

Bab ini akan membahas bagaimana mengukur stratifikasi kluster industri rumahan melalui dimensi basis IR, kelembagaan, aktivitas usaha, kin-

erja usaha, konektivitas. Pengukuran menghasilkan tipologi/strata kluster. Selanjutnya membahas penjabaran rancangan inovasi kebijakan kluster industri rumahan dengan pendekatan *triple helix* yang mengkolaborasikan peran Akademisi, *Business* dan *Government* (ABG) dalam pengembangan kluster IR. Pada bagian ini, juga dilakukan pemetaan pelaku IR, kapasitas dan kendala pelaku IR.

3.1. MENGUKUR STRATIFIKASI DAN PERTUMBUHAN KLASER INDUSTRI RUMAHAN

Lampung Selatan merupakan salah satu lokus industri rumahan di Propinsi Lampung, yang sebagian besar dikelola oleh perempuan. Diakui peran pemerintah dalam pengembangan IR awalnya masih sangat minim dan terbatas pada pemberian pelatihan-pelatihan atau penyuluhan yang sporadis serta seringkali tidak tepat sasaran. Kelompok IR yang didominasi perempuan masih harus berjuang sendiri di tengah persaingan pasar yang tidak seimbang dan derasnya produk impor UKM negara tetangga. Disisi lain, jumlah masyarakat yang dihidupi oleh IR banyak dan potensi IR sebagai pendukung ketahanan ekonomi nasional dan pengembangan SDM cukup signifikan. Banyak perubahan yang dilakukan pemerintah, mulai dari kebijakan, modal dan penyediaan pasar.

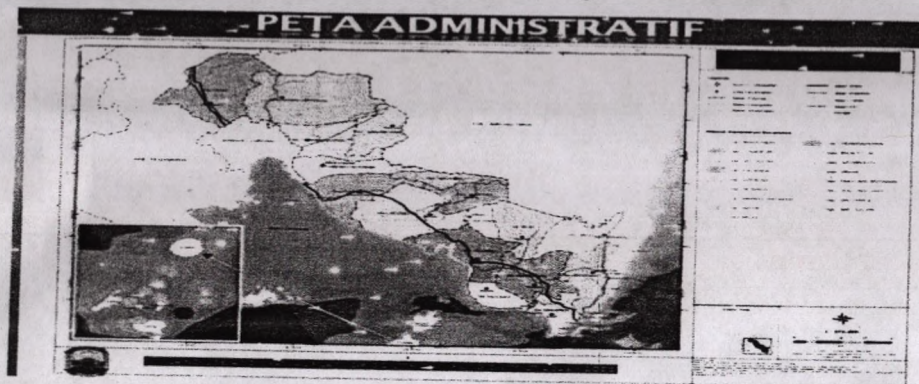
Penelitian yang dilakukan oleh Tresiana dan Duadji (2019) dengan lokus industri rumahan di Desa Canti dan Desa Way Muli Timur, Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, dengan tema "Model Kluster Pengembangan Industri Rumahan dalam mewujudkan *Gender equality* Perempuan di Kabupaten Lampung Selatan", mendeskripsikan pemetaan gambaran basis kapasitas kluster industri rumahan perempuan, sekaligus menggambarkan elemen-elemen penting pertumbuhan dan stratifikasi kluster industri rumahan yang dikelola oleh kelompok perempuan.

3.1.1 Peta Wilayah dan Kebijakan Industri Rumahan di Lampung Selatan

Kabupaten Lampung Selatan merupakan daerah di ujung selatan pulau Sumatera yang menjadi pintu gerbang masuknya arus orang, barang dan jasa ke provinsi-provinsi lain di pulau Sumatera maupun Provinsi Lampung secara khusus. Kabupaten dengan luas wilayah mencapai 2007,01

km² ini beribukota di Kota Kalianda (BPS Lampung Selatan, 2016A). Secara administratif, wilayah Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur; Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda; Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran; Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa.

Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 (tujuh belas) kecamatan dan selanjutnya terdiri dari desa-desa dan kelurahan sebanyak 251 desa/kelurahan (248 desa dan 3 kelurahan) (BPS Lampung Selatan, 2016A). Dengan garis pantai yang panjang terdapat 39 desa yang lokasinya dekat tepi laut, yaitu desa yang berada di Kecamatan Katibung, Sidomulyo, Kalianda, Rajabasa, Sragi, Ketapang dan Bakauheni. Wilayah di Sumatera masih banyak dikelilingi hutan. Ada sekitar 24 desa di Lampung Selatan yang lokasinya berada di sekitar hutan. Kecamatan Rajabasa merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yang berada di sekitar hutan.



Gambar 3.1. Peta Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan data yang ada, penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendetang. Penduduk Asli Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung. Penduduk sub suku Lampung yang lain tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk yang

berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh dan lain-lain. Dari semua suku tersebut, yang merupakan penduduk pendatang yang terbesar adalah berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta). Besarnya penduduk Lampung Selatan yang berasal dari pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan.



Gambar 3.2. Luas dan Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan

Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2013 berjumlah 942.572 jiwa, yang terdiri dari 485.805 jiwa laki-laki dan 456.767 perempuan. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 106,36 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 106 laki-laki (BPS Kab. Lamsel, 2016B).

Berdasarkan data yang ada, penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendetang. Penduduk Asli Lampung, khususnya sub suku Lampung Peminggir, umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung. Penduduk sub suku Lampung yang lain tersebar di seluruh

Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara Aceh dan lain-lain. Dari semua suku tersebut, yang merupakan penduduk pendatang yang terbesar adalah berasal dari pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta). Besarnya penduduk Lampung Selatan yang berasal dari pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, disamping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan.

Tabel 3.1. Indikator Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan

Indikator Kependudukan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Jumlah penduduk (Jiwa)	980 844	961 897	972 579
Kepadatan penduduk (Jiwa/Km ²)	474	479	485
Sex Ratio (%)	105,72	105,61	105,53
Jumlah Rumah tangga	245 927	253 131	256 255
Rata-rata anggota rumah tangga (Jiwa/Ruta)	3,87	3,80	3,80

Sumber: BPS Kab. Lamsel, 2016A

Pada sektor tenaga kerja, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mencapai 687 orang, di-mana lebih dari 60 persennya termasuk ke dalam angkatan kerja sedang sisanya bukan angkatan kerja atau penduduk yang sedang bersekolah atau mengurus rumah tangga. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tahun 2015, TPak Lampung Selatan mencapai 60,12 persen artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 60 orang tersedia untuk memproduksi barang/jasa.

Untuk melihat penyerapan angkatan kerja pada pasar tenaga kerja salah satunya dengan melihat tingkat pengangguran terbuka (TPT). Selama tiga tahun terakhir, TPT Lampung Selatan semakin rendah dari 6,46 persen di tahun 2013 menjadi 5,38 per-sen (2015). Perkembangan TPT merupakan salah satu indikator keberhasilan program ketenagakerjaan. Dari angkatan kerja yang bekerja di Lampung Selatan, hampir 50 persen bekerja di bidang

pertanian dan lebih dari 70 persennya adalah pekerja laki-laki dengan usia 24-54 tahun.

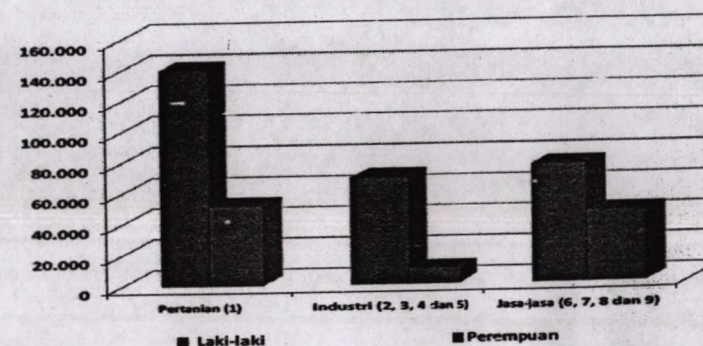
Tabel 3.2. Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Lampung Selatan

Indikator Kependudukan	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk 15 tahun + (000)	655	679	687
Angkatan Kerja (000)	411	440	414
Bekerja (000)	384	413	392
Pengangguran (000)	26	27	22
Bukan Angkatan kerja (000)	244	240	275
TPAK (%)	62,71	64,73	60,12
TPT (%)	6,46	6,05	5,38
Bekerja di Sektor (%)			
Pertanian	40,41	33,24	48,81
Industri	13,25	17,17	20,11
Jasa	46,34	48,59	31,08

Sumber: BPS Kab. Lamsel, 2016A.

Jika dilihat dari jenis lapangan kerja utama dan jenis kelamin, laki-laki lebih angka partisipasi kerja laki-laki lebih tinggi baik di sektor pertanian, industri maupun jasa-jasa. Sedangkan untuk perempuan, lapangan kerja utama lebih tinggi pada sektor pertanian, diikuti dengan sektor jasa-jasa dan sektor industri. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Tabel 3.3. Perkembangan Tenaga Kerja Kab. Lamsel menurut Lapangan Kerja Utama dan Jenis Kelamin 2013-2015



Tabel 3.4. Indikator Ketenagakerjaan Kecamatan Rajabasa 2014

Indikator Ketenagakerjaan	2014
Penduduk 15 tahun +	15 596
Angkatan kerja	13 248
Bukan Angkatan Kerja	1 348
TPAK (%)	61,97
TPT (%)	38,03

Sumber: BPS. Kab. Lamsel (2015A)

Berdasarkan data dari BPS Kab. Lamsel (2015A), Kecamatan Rajabasa pada tahun 2014 dengan jumlah penduduk yang berumur 15 tahun lebih berjumlah 14 596 orang, dan 13.248 orang merupakan angkatan kerja yang bekerja dan sisanya merupakan angkatan kerja pengangguran dan bukan angkatan kerja. Sejalan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja penduduk yang bekerja bertambah, Sebaliknya jumlah pengangguran menurun. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Rajabasa yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya semakin meningkat.

Lokus Desa Canti dan Desa Waymuli Timur Kecamatan Rajabasa merupakan sebagian dari desa-desa di Kabupaten Lampung Selatan yang berbatasan langsung dengan laut. Batas-batas kedua desa ini jika disandingkan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Batas Desa Canti dan Waymuli Timur

Batas	Desa Canti	Desa Waymuli Timur
Sebelah Utara	Desa Canggung	Gunung Rajabasa
Sebelah Selatan	Desa Banding	Selat Sunda
Sebelah Timur	Gunung Rajabasa	Desa Waymuli
Sebelah Barat	Laut	Desa Kunjir

Sumber: Dokumen Profil Desa Canti dan Desa Waymuli Timur

Desa Canti memiliki luas wilayah 6,68 km², sedangkan Desa Waymuli Timur memiliki luas wilayah 3,40 km². Secara umum, Desa Cant memiliki jarak ke Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi lebih deka dibandingkan dengan Desa Waymuli Timur. Selengkapnya dapat diliha pada tabel perbandingan berikut ini.

Tabel 3.6. Perbandingan Kondisi Umum Desa Canti dan Desa Waymuli Timur

Desa	Luas	Jarak ke Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten	Jarak ke Ibukota Provinsi
Canti	6,68 km ²	1,2 km	11,00 km	71,00 km
Waymuli Timur	3,40 km ²	7,00 km	17,00 km	78,00 km

Sumber: BPS Kab. Lamsel, 2015B

Tabel 3.7. Kondisi Pemerintahan Desa

Desa	Dusun	RW	RT
Canti	4	-	11
Waymuli Timur	3	-	7

Sumber: BPS Kab. Lamsel, 2015B

Desa Canti terdiri dari 4 dusun dan 11 Rukun Tetangga (dapat dilihat pada tabel berikut ini). Pemerintahan Desa Canti di Kepala oleh seorang Kepala Desa, seorang Sekretaris Desa, lima orang Kepala Urusan (Kaur) dan empat orang Kepala Dusun. sedangkan Desa Waymuli Timur terdiri dari 3 dusun, dan 7 Rukun Tetangga. Pemerintahan Desa Waymuli Timur dikepalai oleh seorang Kepala Desa, dibantu oleh seorang Sekretaris Desa, lima orang Kepala Urusan (KAUR), dan 3 orang Kepala Dusun.

Tabel 3.8 Struktur Mata Pencarian Desa Waymuli Timur

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Pedagang	210
2.	Petani	135
3.	Buruh	115
4.	Tukang	15
5.	Swasta	15
6.	Guru	14
7.	Angkutan (supir)	10
8.	PNS	4
9.	Bidan	2
10.	TNI/Polri	1

Sumber: Dokumen Profil Desa Waymuli Timur (tanpa tahun)

Jumlah penduduk Desa Waymuli Timur 1.215 jiwa yang terdiri dari 640 jiwa laki-laki dan 575 jiwa perempuan dengan *sex ratio* 1,11 (BPS. Kab. Lampung Selatan, 2015B). Dokumen Profil Desa Waymuli Timur menunjukkan stuktur mata pencaharian masyarakat desa ini di dominasi oleh pedagang, petani dan buruh. Hal ini sesuai luas wilayah Desa Waymuli Timur dari 3,40 km² lebih didominasi oleh lahan bukan sawah sebesar 2,50 km² dan hanya 0,90 km² berupa lahan sawah (BPS Kab. Lamsel, 2015B). Selengkapnya, struktur mata pencaharian penduduk Desa Waymuli Timur tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Struktur Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin Masyarakat Desa Canti

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Petani	1.820	712	2.532
2.	Karyawan perusahaan swasta	45	67	112
3.	Buruh migran	15	12	27
4.	Nelayan	18	-	18
5.	Pedagang keliling	1	12	13
6.	Buruh tani	5	5	10
7.	PNS	2	6	8
8.	Pembantu rumah tangga	-	8	8
9.	Peternak	3	3	6
10.	Dukun kampung terlatih	-	2	2
11.	Pengrajin industri rumah tangga	1	1	2
12.	Pengusaha kecil dan menengah	2	-	2
13.	Montir	2	-	2
14.	TNI	1	-	1
15.	Pensiunan PNS/TNI/Polri	1	-	1
16.	Seniman/artis	1	-	1
	Jumlah	1.917	828	2.745

Sumber: Dokumen Profil Desa Canti, 2016

Adapun jumlah penduduk Desa Canti 1.749 jiwa yang terdiri dari 916 jiwa laki-laki dan 833 jiwa perempuan dengan *sex ratio* 1.10 (BPS. Kab. Lampung Selatan, 2015B). Dengan struktur luas lahan sawah mencapai 1,98

km² dan luas lahan non sawah mencapai 4,70 km² (BPS. Kab. Lampung Selatan, 2015B) berbanding lurus dengan mata pencaharian pokok penduduk desa ini adalah petani, buruh migran perempuan, dan karyawan swasta (Dokumen Profil Desa Canti). Jika lebih diperinci jenis pekerjaan dan jenis kelamin masyarakat Desa Canti maka akan didapat gambaran seperti tabel berikut ini.

Pemetaan pelaku Industri rumahan, menjadi langkah awal untuk menelusuri basis perkembangan kluster industri rumahan di Kabupaten Lampung Selatan. Berbasis survei, pemetaan pelaku industri rumahan dilakukan dan mendeskripsikan beberapa hal, diantaranya: jenis kelamin, umur/usia, tingkat pendidikan, status dalam industri rumahan, dan pengalaman sebagai TKI. Bila dilihat menurut jenis kelamin, 100 persen adalah perempuan, hal ini tentunya terkait dengan kepentingan dari pemetaan ini adalah bagian dari upaya besar untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Di bidang ekonomi, perempuan sering tidak mendapatkan penghargaan dan perhatian yang layak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Keterlibatan perempuan di bidang ekonomi, sering dipandang sebagai kegiatan informal dan dihargai lebih rendah daripada yang formal. Keberadaan data survei tersebut dapat menjadi bukti bila perempuan memiliki potensi di bidang ekonomi, baik untuk tingkat keluarga maupun untuk tingkat masyarakat.

Tabel 3.10. Jenis Kelamin Pelaku IR

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	0	0
Perempuan	101	100
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Sementara itu, tabel 3.11 memperlihatkan pelaku termuda berusia 21 tahun dan tertua berusia 65 tahun. Apabila dilihat menurut kelompok usia, seluruh responden atau perempuan yang terlibat dalam industri rumahan berada dalam kategori usia produktif (15 -65 tahun). Menurut analisis rasio ketergantungan (BPS), kondisi tersebut mengindikasikan kelompok perempuan yang menjadi responden tersebut termasuk dalam kelompok yang menanggung kelompok tidak produktif, yaitu kelompok anak-anak dan

kelompok usia lanjut. Kelompok perempuan yang dapat bertanggungjawab pada kehidupan keluarganya.

Tabel 3.11. Usia Pelaku IR

Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
21-35,6	31	30,7
35,7-50,3	58	57,4
50,4-65	12	11,9
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan (tabel 3.12), tidak ada responden yang buta aksara, dan sebagian besar telah menyelesaikan sekolah lanjutan, bahkan terdapat 3 persen responden yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan, bermutunya sumber daya manusia perempuan yang menjadi responden, mereka kreatif dan dapat melihat peluang usaha produktif. Data lain yang cukup mendukung adalah dari tabel 3.13 yang menunjukkan sekitar 26,7-persen responden telah memiliki pengalaman kerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Keputusannya untuk membuka usaha industri rumahan merupakan keputusan yang relatif tepat. Karena disamping bermanfaat untuk keharmonisan dan ketahanan ekonomi keluarga, juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat setempat.

Tabel 3.12. Tingkat Pendidikan Pelaku IR

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Buta Aksara	0	0
Tidak Tamat SD	8	7,9
SD	33	32,7
SLTP	38	37,6
SLTA	19	18,8
Diploma/PT	3	3
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.13. Kepemilikan Pengalaman Sebagai TKI/TKW di Luar Negeri

Kepemilikan Pengalaman	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	27	26,7
Tidak	74	73,3

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.14. Susunan Tim Pelaksana Pengembangan IR Lampung Selatan

No	Nama/Jabatan	Kedudukan
1	Bupati	Pembina
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggungjawab
3	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
4	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sekretaris
5	Kabid.Kualitas Hidup Perempuan & Kualitas Keluarga pada DPPPA	Anggota
6	Kabid. Sosial Pemerintahan pada BAPPEDA	Anggota
7	Kabid.Kelembagaan pada Dinas Koperasi dan UKM	Anggota
8	Kabid. Bina Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota
9	Kabid.Tanaman Hortikultura pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan	Anggota
10	Kabid.Konsumsi & Penganekaragaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
11	Kabid.Pemberdayaan Usaha Perikanan pada Dinas Perikanan	Anggota
12	Camat Rajabasa	Anggota
13	Kasi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum pada DPPPA	Anggota
14	Kasi Kualitas Keluarga pada DPPPA	Anggota
15	Ka.UPT Dalduk & KB Kecamatan Rajabasa	Anggota
16	Ketua Puslitbang Wanita, Anak dan Pembangunan LPPM Universitas Lampung	Anggota
17	Kepala Desa Canti Kecamatan Rajabasa	Anggota
18	Kepala Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa	Anggota

Sumber: Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Anak, 2019

Potensi-Potensi Di Kabupaten Lampung Selatan					
Kelompok/ Unsur	SDA Kabupaten Lamsel	SDM Kabupaten Lamsel	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Potensi Aktor Governance	Kebutuhan/ Program yang di harapkan
Desa Canti	- Tempat wisata - Keripik Pisang - Catering/ Makanan - Pelabuhan - untuk ke Pulau krakatoa - Wisata Air Terjun	- Pemuda Karang Taruna - PKK - Lansia - Aparatur pemerintahan DS - Kelompok simpan pinjam PNPM	-	Usaha Rumah Tongga Desa Canti: - Keripik pisang, singkong - Hasil petani pisang, padi, kakao, pala. - Pertanian ikan - air tawar dan peranian hewan kanbuing	- Permodalan: Pasar, pelaksanaan, pekerjaan, rencana pelaksanaan Korsumsi air biah menjadi air minum kemasan gelas, botol, dan galon
Desa Way Muli Timur	- Pisang - Pantai Way Sekayu - Pengolahan Ikan - Tempat Pelelangan Ikan - Sukun, Singkong	- PKK - Karang Taruna - Risma - Kader Posyandu - Kelompok Simpan Pinjam	- SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) - POS BATU LAPIS	- - - - - -	- Mesin pengering minyak - Alat dapur untuk pembuatan keripik - Mesin penggiling ikan - Freezer - Modal untuk pembelian bahan
BKP	- Kesuburan tanah (sayuran, pisang, jagung, singkong - Pengelolaan pantai Kabaya Pengelolaan yang ada dilatut dengan melibatkan SKPD perikanan	- Tenaga PPL - Kelompok Wanita Tani (KWT)	- Pemanfaatan pekarangan rumah melalui PKK/KWT - Pelatihan pemanfaatan pekarangan - Pelatihan pengelolaan pangan lokal.	- - - -	- Memanfaatkan pekarangan dengan menanam sayuran seperti cabai, tomat, terong, dsb. - Pengembangan industri keripik pisang yang dikelola secara proporsional dengan berbatasi

Tabel 3.15. Pemetaan Potensi Pengembangan IR dan Analisis Kebutuhan Pengembangan IR di Kabupaten Lampung Selatan (Lanjutan)

80

Potensi-Potensi Di Kabupaten Lampung Selatan					
Kelompok/ Unsur	SDA Kabupaten Lamsel	SDM Kabupaten Lamsel	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Potensi Aktor Governance	Kebutuhan/ Program yang di harapkan
	- Pengelolaan ikan (pembuatan industri rumahan bakso ikan, dendeng, nugget)				- rasa, seperti coklat, strawberi, dsb. - Pengelolaan kerupuk ikan, kerupuk rasa sayuran, dsb. - Pengelolaan Industri Rumahan misalnya: dendeng, nugget - Kerjasama dengan perikanan
BAPPEDA	- Pantai (Wisata Pantai) - Pemandian Air Panas - Batu Hasil Perkebunan: kelapa, kakao - Ikan Air Tawar - Perikanan: Tambak udang, Tambak Ikan, Perikanan Tangkap - Nisak Budaya	- Telah tersusun rencana pembangunan / pengembangan potensi yang ada	- Mengakomodir urusan musrenbangsan dan sebisa mungkin dapat dimasukan atau direalisasikan didalam program-program dan kegiatannya		- Pelatihan modal usaha - Pendampingan - Monitoring - Peningkatan Kerjasama pemasaran - Promosi/pameran-pameran produk hasil IR - Edukasi kepada masyarakat untuk mencintai produk lokal

Gender Equality dan Inovasi Kebijakan Publik

Tabel 3.15. Pemetaan Potensi Pengembangan IR dan Analisis Kebutuhan Pengembangan IR di Kabupaten Lampung Selatan (Lanjutan)

Model Rintisan Kluster Industri Rumahan Berbasis Triple Helix Sebuah Inovasi ...

Potensi-Potensi Di Kabupaten Lampung Selatan					
Kelompok/ Unsur	SDA Kabupaten Lamsel	SDM Kabupaten Lamsel	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Potensi Aktor Governance	Kebutuhan/ Program yang di harapkan
Dinas Pertanian TPH	- Adanya Padi, Jagung, Pisang, Buah-buahan dan Sayuran	- PPL Pertanian, - KUPT pertanian - TPH kec, Gapoktan, - Kel Tani, - KWT	- Adanya program peningkatan produksi (benih an sarana lainnya) komoditi: Padi, Jangung, Kedelai, Pisang, Labu Merah, Bawang Merah, Jeruk - Adanya program Penanganan Pasca Panen dan pengolahan hasil: Bantuan alat-alat pasca panen & pengolahan hasil (alat pengolah keripik pisang dan emping jagung) - Adanya Fasiltasi pemasaran hasil pertanian: kegiatan pameran/expo produk-produk unggulan.		- Pengolahan teknis - Pengolahan hasil pertanian - Pendampingan dari petugas (Hulu, Hilir) - Bantuan Peralatan dan Modal Kerja - Bantuan Informasi dan Jaringan Pemasaran

Tabel 3.15. Pemetaan Potensi Pengembangan IR dan Analisis Kebutuhan Pengembangan IR di Kabupaten Lampung Selatan (Lanjutan)

Potensi-Potensi Di Kabupaten Lampung Selatan					
Kelompok/ Unsur	SDA Kabupaten Lamsel	SDM Kabupaten Lamsel	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Potensi Aktor Governance	Kebutuhan/ Program yang di harapkan
GOW	- Adanya Ikan, Pisang, Kopi, Lada, Cengkeh, Coklat	- BKMT - Iwapi - Alhidayah - Asiyah - A- Irsad Wanita Katolik - Wanita Hindu - Wanita Budha - Bhayangkari	- Adanya kegiatan pelatihan membuat diterjen dari bahan soda, air dan pewangi. - Adanya kegiatan pelatihan kembang dari baham manic- manik	-	- Modal untuk mengadakan kegiatan
IWAPI	- Adanya Ikan - Adanya Pisang, Kelapa, Kopi, Lada, Coklat - Adanya Pantai	- Membuat makanan berupa wingko dari bahan pisang & rumput laut. - Adanya keterampilan sulam usus + sulam pita - Adanya SDM membuat Keripik Pisang	- IWAPI	-	-
PSW	- Adanya Pantai sebagai potensi hasil wisata - Sumber daya pertanian (hasil bumi) - Gunung	- Adanya tenaga ahli yang dapat memberikan keterampilan/ transfer of knowledge - Adanya mitra/ perusahaan yang dapat berkolaborasi	-	- Adanya Pembinaan - koperasi keluarga penerima program PKH & desa binaan. - Adanya peningkatan keterampilan pengolahan hasil bumi berbasis TGT	-

Gender Equality dan Inovasi Kebijakan Publik

Tabel 3.15. Pemetaan Potensi Pengembangan IR dan Analisis Kebutuhan Pengembangan IR di Kabupaten Lampung Selatan (Lanjutan)

Potensi-Potensi Di Kabupaten Lampung Selatan					
Kelompok/ Unsur	SDA Kabupaten Lamsel	SDM Kabupaten Lamsel	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Potensi Aktor Governance	Kebutuhan/ Program yang di harapkan
		- Tenaga pendamping terdidik, siap untuk terjun ke lapangan			
Dinas Kelautan dan Perikanan	- Pariwisata - Perikanan - Perkebunan (Pisang, Coklat)	- Adanya pelatihan- pelatihan : - Pembuatan Bakso Ikan, Nugget, Bandeng Presto - Budidaya Ikan dan Udang - Pembuatan Pakan - Adanya bantuan: - Panci Presto - Alat Besar Ekspakatot - Mesin Paka - Mesin Pembuat Tepung Ikan	- Adanya kegiatan penyuluh Perikanan - Adanya Pelatih Olahan Perikanan - Adanya Pelatih Budidaya Ikan	-	- Modal - Pelatihan - Pemasaran - Pendampingan
Disnakertran	- Pariwisata - Pisang - Ikan - Peternakan	- Pendamping Dari TKI - Pelatihan melalui dinas itu sendiri	- Pembuatan Roti di Kecamatan Sidomulyo di 2015 - Usaha kecil industry di 2016 Desa Natar masalah jahit menjahit	-	- Modal usaha untuk pengembangan - Pembimbingan dari Pihak kec/ kab

Model Rintisan Kluster Industri Rumahan Berbasis Triple Helix: Sebuah Inovasi ...

Tabel 3.15. Pemetaan Potensi Pengembangan IR dan Analisis Kebutuhan Pengembangan IR di Kabupaten Lampung Selatan (Lanjutan)

Potensi-Potensi Di Kabupaten Lampung Selatan					
Kelompok/ Unsur	SDA Kabupaten Lamsel	SDM Kabupaten Lamsel	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Potensi Aktor Governance	Kebutuhan/ Program yang di harapkan
Dinas Peternakan	- Ayam Ras - Pedaging - Petelur - Pengembangan sapi potong	- Tenaga Pembina, pelatih bidang usaha peternakan termasuk pengolahan hasil peternakan. - Ditingkat peternak, terdapat jasa kelompok peternak yang telah melaksanakan usaha peternak ayam Ras dan sapi potong secara profesional	- Kegiatan Dinas Peternakan di Desa Canti maupun desa Waymuli Timur yang berkaitan dengan pemberdayaan EK antara lain: Peternakan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit flu burung dan penyakit rabies	-	- Pelatihan - Sarana dan Prasarana - Modal - Permasalahan Pengolahan Hasil Peternakan Khususnya komoditi ternak ayam ras dan sapi
Badan PP dan KB	- Kelapa - Pisang - Perikanan Laut - Wisata Bahari - Jagung	- PLKB - PPKDB/Sub - P2TP2A /Kecamatan	-	- Ekonomi produktif desa prima - Pemoinaan EK rumahan pada P3KSE - Pengembangan kelompok UPPKS	- Pembinaan dan pendampingan secara kontinyu: Cara pembuatan produk, Cara pengepakan produk, Cara pemasaran - Administrasi keuangan - Penguatan sumber modal - Pengurusan dan pembuatan badan hukum industri

Tabel 3.15. Pemetaan Potensi Pengembangan IR dan Analisis Kebutuhan Pengembangan IR di Kabupaten Lampung Selatan (Lanjutan)

Potensi-Potensi Di Kabupaten Lampung Selatan					
Kelompok/ Unsur	SDA Kabupaten Lamsel	SDM Kabupaten Lamsel	Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Potensi Aktor Governance	Kebutuhan/ Program yang di harapkan
Badan Ketahanan Pangan	- Sayur Mayur - Batu Bolder - Pisang - Pala - Durian - Kakao - Cengkeh - Kayu Sengon - Cabai - Padi - Air Minum Ikan - Wisata Air terjun - Labuhan - Darmaga - Pantai Canti Indah	-	-	-	- Membuat berbagai macam product olahan ikan yang memiliki daya saing - Manajemen destinasi pariwisata berbasis pada kebermanfaatan masyarakat - Membangun jaringan pemasaran - Product olahan/ kreatifitas olahan hasil bumi - Mengembangkan berbagai usaha pendukung dalam sektor pariwisata (travel, penginapan, kuliner, cinderamata)

Sumber: Hasil FGD, 2019

3.1.2 Peta Basis Kapasitas Pelaku Industri Rumahan Kabupaten Lampung Selatan

Industri rumahan (IR) merupakan suatu sistem produksi, yang berarti ada produk yang dihasilkan melalui proses nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di tempat rumah perorangan dan bukan di suatu pabrik. Karena terkait dengan bahan baku dan proses produksi yang melibatkan keahlian tenaga kerja, maka dimungkinkan perkembangan industri rumahan tiap wilayah memiliki variasi dan tingkatan yang berbeda (KPPPA RI, 2016).

Tresiana dan Duadji (2019), melalui penelitiannya di Kabupaten Lampung Selatan, telah memetakan industri rumahan khususnya di Desa Canti dan Desa Waymuli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Karakteristik kedua desa adalah: 1) Wilayah yang angka kemiskinannya tinggi; 2) Wilayah yang memiliki banyak pelaku IR; 3) Wilayah yang merupakan basis/kantong TKI/TKW; 4) Wilayah yang memiliki gizi buruk, AKI dan AKB tinggi; 5) Wilayah yang minim mendapatkan kegiatan pemberdayaan; 6) Merupakan daerah sentra produksi. Populasi yang diambil adalah seluruh Industri Rumah Tangga di 2 desa. Sampel adalah Industri Rumah Tangga yang dijalankan oleh perempuan. Teknik pengambilan sampel adalah survei, sehingga semua pelaku usaha Industri Rumah Tangga menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil pemetaan telah mengidentifikasi profil dasar/basis kapasitas pelaku IR yang mencakup: 1) Identitas pelaku dan keluarga; 2) Jenis usaha; 3) Skala usaha; 4) Jaringan pemasaran yang dijalankan; 5) Masalah yang dihadapi termasuk masalah psikososial; 6) Kebutuhan untuk meningkatkan usaha; 7) Bantuan yang pernah didapat; 8) Pelatihan yang sudah diperoleh dan yang diharapkan; 9) Ketersediaan bahan baku lokal yang dapat dimanfaatkan.

Hasil pemetaan terhadap Industri Rumahan kemudian dikategorikan mengikuti standar Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Ekonomi. Kategorisasi yang dilakukan terbagi dalam 3 klasifikasi, yaitu:

Pertama, Industri Rumahan (IR) Pemula umumnya produksi tidak kontinyu atau berdasarkan konsumen, biasanya pada acara/hari tertentu.

Sistem penjualannya lepas artinya setelah produk dijual tidak ada lagi ikatan terhadap konsumennya atas produk tersebut. IR ini rentan bangkrut dikarenakan jadwal produksi yang tidak menentu serta manajemen keuangan usaha masih bergabung dengan keuangan keluarga. Modalnya masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri yaitu sekitar kurang dari 5 juta rupiah. Proses produksi masih sederhana yang dilakukan dengan manual tanpa bantuan mesin. Jumlah tenaga kerjanya masih sedikit yaitu sekitar 1-2 orang termasuk pemiliknya.

Kedua, Industri Rumahan (IR) Berkembang umumnya produksi semi kontinyu dengan sistem penjualannya lepas. IR ini mudah berganti produk apabila dirasakan prospek penjualan produk menurun. Modalnya masih relatif kecil sesuai dengan kemampuan sendiri dan sudah mulai meminjam dana dari LKM non-formal yaitu sekitar 5-25 juta rupiah. Proses produksi sudah menggunakan teknologi/semi masinal meskipun masih sederhana dengan jumlah tenaga kerjanya sekitar 3-5 orang termasuk pemiliknya.

Ketiga, Industri Rumahan (IR) Maju umumnya produksi sudah kontinyu dengan sistem penjualannya tertentu. Tingkat keberlanjutan usahanya tinggi karena sudah mampu mengatur usahanya dengan baik. Modalnya berkisar 25-50 juta rupiah yang berasal dari pribadi dan kredit dari LKM formal. Proses produksi sudah menggunakan teknologi tinggi/bersih dengan jumlah tenaga kerjanya sekitar 6-10 orang termasuk pemiliknya. Diharapkan setelah melampaui klasifikasi IR Maju maka seyogyanya Kementerian lain yang menangani Industri Kecil dapat melakukan pembinaan yang lebih intensif.

Berdasarkan hasil perhitungan skor, diperoleh, sebagian besar unit usaha industri rumahan di kedua desa tersebut berada dalam kelompok IR level 2 (IR 2), mencapai 90,1 persen. Selengkapnya lihat tabel 3.16.

Tabel 3.16. Kelas Usaha

Kelas Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
IR 1 (Skor 0-6)	2	2,0
IR 2 (Skor 7-12)	91	90,1
IR 3 (Skor 13-18)	8	7,9
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.17. Lokasi Responden

Nama Desa	Frekuensi	Persentase (%)
Canti	64	63,4
Way Muli	37	36,6
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.18 Usia Responden

Usia (tahun)	Frekuensi	Persentase (%)
21-35,6	31	30,7
35,7-50,3	58	57,4
50,4-65	12	11,9
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.19 Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	1	1
Perempuan	100	99
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.20. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
Buta Aksara	0	0
Tidak Tamat SD	8	7,9
SD	33	32,7
SLTP	38	37,6
SLTA	19	18,8
Diploma/PT	3	3
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Beberapa tabel di atas, memperlihatkan responden termuda berusia 21 tahun dan tertua berusia 65 tahun. Apabila dilihat menurut kelompok usia, seluruh responden atau perempuan yang terlibat dalam industri rumahan berada dalam kategori usia produktif (15 -65 tahun). Menurut analisis rasio ketergantungan dari BPS, kondisi tersebut mengindikasikan kelompok perempuan yang menjadi responden tersebut termasuk dalam kelompok yang menanggung kelompok tidak produktif, yaitu kelompok anak-anak dan kelompok usia lanjut. Kelompok perempuan yang dapat bertanggungjawab pada kehidupan keluarganya.

Berikutnya, jika dilihat menurut tingkat pendidikan (tabel 3.20), sebagian besar telah menyelesaikan sekolah lanjutan, bahkan terdapat 3 persen responden yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan, bermutunya sumber daya manusia perempuan yang menjadi responden, mereka kreatif dan dapat melihat peluang usaha produktif. Data lain yang cukup mendukung adalah dari tabel xx yang menunjukkan sekitar 26,7 persen responden telah memiliki pengalaman kerja sebagai TKI/TKW di luar negeri. Keputusannya untuk membuka usaha industri rumahan merupakan keputusan yang relatif tepat. Karena disamping bermanfaat untuk keharmonisan dan ketahanan ekonomi keluarga, juga dapat berpartisipasi untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat setempat.

Tabel 3.21. Kepemilikan Pengalaman Sebagai TKI/TKW di Luar Negeri

Kepemilikan Pengalaman	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	27	26,7
Tidak	74	73,3
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Berbasis hasil penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2019), maka terdapat 101 usaha industri rumahan di Desa Canti dan Desa Way Muli. Tabel 3.22 memberikan informasi bahwa 100 persen usaha industri rumahan yang dikembangkan di dua desa yang disurvei tersebut adalah di bidang pangan. Industri rumahan di bidang pangan, kebanyakan terkait dengan ketersediaan sumber daya alam atau bahan baku, ditemukan berbagai jenis usaha yang dikembangkan. Keripik pisang dan bakso ikan,

relatif banyak diproduksi, masing-masing lebih dari 10 persen unit usaha. Dari sini sesungguhnya terlihat potensi wilayah yang dapat dikembangkan lebih lanjut atas ketersediaan bahan baku yang khas, yaitu ikan dan pisang, dapat dilakukan pengembangan variasi produk. Berdasarkan informasi dari tabel tersebut, juga dapat diketahui bila dari bahan baku ikan saja, dapat dihasilkan berbagai produk makanan, antara lain: empek-empek, nuget, bakso dan ikan asin.

Tabel 3.22. Jenis Produksi

No.	Macam Produksi	Jumlah	%
1	Bakso Ikan	13	12,87
2	Bakso ayam (1), sapi(urat) (3)	4	3,96
3	Es krim, buah, koktail, manis, pisang coklat	5	4,95
4	Chicken, cilok, somay	3	2,97
5	Aneka kue basah, donat, lapis legit, arem-arem, moho, awuk, bakpau, risol, brownis, kue ketan, martabak	11	10,89
6	Kopi bubuk (4)	4	3,96
7	Empek-empek (4)	6	5,94
8	Emping ceplis (1)	1	0,99
9	Nuget ikan	1	0,99
10	Nuget tahu	1	0,99
11	Gorengan (10)	10	9,90
12	Ikan asin (2)	2	1,98
13	Jamu tradisional	1	0,99
14	Keripik Pisang (11)	11	10,89
15	Keripik Singkong (3)	3	2,97
16	Aneka kripik (1)	1	0,99
17	Kue Pancong(2)	2	1,98
18	Kue kering (2), pangsit, stik balado, keripik bombay	5	4,95
19	Roti Bakar	1	0,99
20	Pengrajin tempe	1	0,99
21	Warung nasi (2) Nasi uduk (5)	7	6,93
22	Warung soto (4)	4	3,96
23	Warung lontong, gado-gado	2	1,98
24	Mie Tek-tek (2)	2	1,98
	Total	101	100,00

Sumber: Olah Data, 2019

Di bidang ekonomi, perempuan sering tidak mendapatkan penghargaan dan perhatian yang layak, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Keterlibatan perempuan di bidang ekonomi, sering dipandang sebagai kegiatan informal dan dihargai lebih rendah daripada yang formal. Keberadaan data survei tersebut dapat menjadi bukti bila perempuan memiliki potensi di bidang ekonomi, baik untuk tingkat keluarga maupun untuk tingkat masyarakat.

Berdasarkan hasil survei terhadap dua desa sasaran penelitian, maka berikutnya, penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2019) memetakan beberapa kondisi yang patut menjadi pencerminan untuk dijadikan dasar pengembangan usaha industri rumahan. Ada empat ukuran yang sering dijadikan dasar untuk menilai besar kecilnya unit usaha, yaitu: modal, tenaga kerja, teknologi dan pemasaran.

Tabel 3.23. Jumlah Modal Usaha

Jumlah Modal	Frekuensi	Persentase (%)
<5 juta	94	93,1
5 - <25 juta	6	5,9
25 - <50 juta	1	1,0
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Pertama, terkait modal, modal sering dijadikan 'kambing hitam' sebagai unsur yang paling penting untuk dilakukannya sebuah usaha. Tabel 3.23 dan tabel 3.24 memperlihatkan bahwa hampir seluruhnya unit usaha industri rumahan yang berkembang di kedua desa tersebut memiliki modal kurang dari 5 juta rupiah, dan hanya sekitar 34,7 persen unit usaha yang modalnya bersumber dari modal sendiri. Sedangkan 65,4 persen, sebagian modalnya bersumber dari pinjaman.

Tabel 3.24. Sumber Modal Usaha

Sumber Modal	Frekuensi	Persentase (%)
Sendiri	35	34,7
Sendiri+Pinjaman LKM NF	33	32,7
Sendiri+Pinjaman LKM F	33	32,7
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.25. Teknologi Produksi

Jenis Teknologi	Frekuensi	Persentase (%)
Manual	92	91,1
Semi Manual	9	8,9
Teknologi Tinggi	0	0
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Kedua, teknologi produksi dan tenaga kerja. Teknologi produksi sangat berkaitan dengan tenaga kerja. Usaha industri rumahan yang masih menggunakan manual, jelas kemampuan dan keahlian tenaga kerja manusia adalah yang menjadi andalan dari usaha produksinya. Sementara usaha yang telah menggunakan teknologi semi manual, telah menggunakan sebagian teknologi tepat guna untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Pada tabel 3.25 memperlihatkan 91,1 persen unit usaha masih menggunakan manual, hanya sekitar 8,9 persen yang menggunakan semi manual, dan belum ada sama sekali yang menggunakan teknologi tinggi.

Tabel 3.26. Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
1-2 orang	81	80,2
3-5 orang	17	16,8
6-10 orang	3	3,0
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Tabel 3.26 menunjukkan sebanyak 80,2 persen usaha industri rumahan memiliki tenaga kerja (plus pemiliknya) 1-2 orang. Sedangkan usaha yang memiliki tenaga kerja 3-5 orang mencapai 16,8 persen, dan masih sangat kecil atau hanya sekitar 3 persen usaha yang memiliki tenaga kerja 6-10 orang. Terbatasnya jumlah tenaga kerja, berkorelasi dengan kontinuitas usaha karena ketergantungan tinggi pada tenaga kerja yang terbatas tersebut.

Walaupun jumlah tenaga kerja tiap unit usaha industri rumahan belum dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak, namun karena jumlah unit usaha industri rumahan banyak, maka tenaga kerja pun yang terserap juga relatif banyak. Hal ini dapat dicermati dari tabel 3.27 terdapat 233 orang tenaga kerja yang terserap pada industri rumahan dari 101 usaha di dua desa sasaran survei.

Tabel 3.27. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

Tingkat Pendidikan	Perempuan				Laki-laki			
	<18 th	%	>18 th	%	<18 th	%	>18 th	%
Buta Aksara	0	0,00	1	0,57	0	0,00	0	0,00
TT SD	0	0,00	14	8,00	0	0,00	13	24,53
SD	1	25,00	70	40,00	0	0,00	23	43,40
SLTP	1	25,00	60	34,29	0	0,00	16	30,19
SLTA	2	50,00	27	15,43	0	0,00	1	1,89
PT	0	0,00	3	1,71	0	0,00	0	0,00
Total	4	100,00	175	100,00	0	0,00	53	100,00

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.28 Kepemilikan Pengalaman Pelatihan

Pengalaman Pelatihan	Frekuensi	Persentase (%)
Pernah	15	14,9
Tidak Pernah	86	85,1
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Pada tabel 3.28 juga dapat dicermati, usaha industri rumahan telah menyerap tenaga kerja dari berbagai tingkat pendidikan bahkan yang buta aksara, baik untuk tenaga kerja laki-laki maupun perempuan, yaitu dari dari yang buta aksara, tidak tamat SD hingga Perguruan Tinggi. Di samping itu, industri rumahan juga tidak memerlukan keahlian khusus, karena ketrampilan dapat dipelajari sambil bekerja. Informasi dari tabel 3.29 mendukung kondisi tersebut, dari 101 unit usaha, baru 14,9 persen yang memiliki pengalaman pelatihan.

Usaha industri rumahan juga sangat permisif dengan kondisi perempuan karena dapat dilakukan di rumah atau dekat dengan rumah, serta dapat dilakukan paruh waktu. Bekerja pada usaha industri rumahan bagi perempuan dapat menjadi alternatif mengisi waktu luang, bahkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan berprestasi (meningkatkan kerakapan hidup). Data pada tabel 3.29 dan 3.30 dapat menjadi indikasi menarik, bahwa industri rumahan terbukti dapat menjadi solusi alternatif bagi pengangguran di pedesaan.

Namun demikian, ada persoalan penting lainnya terkait dengan tenaga kerja tersebut yang perlu mendapat perhatian serius dari upaya pengembangan industri rumahan, yaitu besarnya upah. Upah yang layak turut menentukan keberlanjutan kinerja unit usaha karena orang tidak akan lagi mencari alternatif untuk pindah kerja dalam rangka meningkatkan pendapatan. Upah adalah bagian dari upaya menghargai kerja seseorang.

Tabel 3.29. Jumlah Upah Pekerja Industri Rumahan

Jumlah Upah per bulan	Frekuensi	Persentase (%)
<Rp 500.000	46	45,5
Rp 500.000-Rp 750.000	12	11,9
>Rp 750.000-Rp 1.000.000	2	2,0
>Rp 2.000.000	1	1,0
Bagi Hasil	5	5,0
Tak Ada	35	34,7
Total	101	100,0

Sumber: Olah Data, 2019

Pada tabel 3.29 sebelumnya dapat diketahui, upah tenaga kerja dalam industri rumahan yang kurang dari Rp 500.000 per bulan mencapai 45,5 persen, dan yang tak ada upah terdapat sekitar 34,7 persen. Kondisi ini cukup memprihatinkan, pada kasus upah yang sangat rendah, biasanya tenaga kerja berhadapan dengan tidak adanya alternatif lain untuk mendapat upah yang lebih baik. Pada kasus tak ada upah, orang akan memaknai kerja yang dilakukan hanyalah untuk 'membantu' keluarga, bahkan orang kemudian mendefinisikan 'tidak bekerja' walau waktu habis untuk beraktivitas dalam industri rumahan. Permasalahan rendahnya/tidak adanya upah ini, sering dikaitkan dengan masalah keuntungan, padahal masalah utamanya

pada manajemen. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi persoalan tersebut, peningkatan kemampuan manajemen, peningkatan produksi, dan peningkatan pemasaran menjadi program yang secara sinergis perlu dilakukan.

Ketiga, pemasaran. Pemasaran sebagai ujung penentu keberlanjutan suatu usaha. Apabila produk tak bisa dipasarkan atau belum mendapatkan peluang pasar yang pasti/tetap, maka sangat sulit produksi untuk dilanjutkan. Terkait dengan pemasaran, terdapat 3 hal yang perlu dicermati, yaitu cara penjualan, wilayah penjualan, serta cara pembayaran.

Tabel 3.30. Cara Penjualan Produksi

Cara Penjualan	Frekuensi	Persentase (%)
Jual langsung/lepas	62	61,4
Diambil Pedagang Keliling	9	8,9
Konsinyasi/dititipkan	23	22,8
Pelanggan Tetap	7	6,9
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.31. Wilayah Pemasaran

Wilayah Pemasaran	Frekuensi	Persentase (%)
Sekitar Desa	70	69,3
Luar Desa	25	24,8
Luar Kecamatan	5	5,0
Luar Kabupaten	0	0
Luar Provinsi	1	1
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Berdasarkan informasi pada tabel 3.30, dapat diketahui sebanyak 61,4 persen penjualan dilakukan secara langsung/lepas, sebanyak 8,9 persen diambil pedagang keliling, 22,8 persen konsinyasi/dititipkan, dan 6,9 persen pelanggan tetap. Data pada tabel tersebut mengindikasikan, ketidakpastian pemasaran masih dialami lebih dari 90 persen pengusaha industri rumahan. Indikasi ketidakpastian juga didukung oleh data pada wilayah pemasaran (tabel 3.31), sebanyak 69,3 persen melakukan penjualan di sekitar desa dan

sebanyak 24,8 persen di luar desa (masih dalam 1 kecamatan yang sama). Terbatasnya wilayah penjualan memungkinkan terjadinya 'kejuhan' permintaan pada waktu-waktu tertentu. Hal inilah yang akan berimbas pada terbatasnya besar/jumlah produksi. Berbeda bila memiliki pemasaran yang luas, memungkinkan untuk memperbesar jumlah produksi.

Tabel 3.32. Cara Pembayaran

Cara Pembayaran	Frekuensi	Persentase (%)
Tunai	75	74,3
Non Tunai	26	25,7
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Mencermati pada tabel 3.30, diketahui pengusaha industri rumahan yang melakukan pembayaran tunai mencapai 74,3 persen. Besarnya pembayaran tunai tersebut, dapat menjadi indikasi terbatasnya perputaran modal dari unit usaha industri rumahan.

Sebagian besar usaha telah dilakukan lebih dari 2 tahun, mencapai 53,5 persen (tabel 3.33). Sebanyak 80,2 persen telah melakukan produksi secara kontinyu (tabel 3.34), sebanyak 95 persen telah memiliki tempat usaha sendiri (tabel 3.35).

Tabel 3.33. Lama Usaha

Lama Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
<1 tahun	29	28,7
1-2 tahun	18	17,8
>2 tahun	54	53,5

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.34. Pola Produksi

Pola Produksi	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak kontinyu	9	8,9
Semi Kontinyu	11	10,9
Kontinyu	81	80,2
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Tabel 3.35. Status Tempat Usaha

Status Tempat Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Milik Sendiri	96	95
Sewa	3	3
Milik Bersama	1	1
Kontrak	1	1
Total	101	100

Sumber: Olah Data, 2019

Terkait dengan pengembangan usaha industri rumahan, perlu dilakukan kajian terhadap kondisi fasilitas pendukung usaha, antara lain: air bersih, sarana pengolahan dan pembuangan limbah, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi. Keempat macam fasilitas pendukung tersebut, juga turut menentukan keberlanjutan sebuah usaha. Tabel 3.36 menunjukkan bahwa diantara 4 macam fasilitas pendukung, kondisi yang memprihatinkan adalah pada pengolahan limbah, hanya 24,8 persen yang berada dalam kategori baik, sementara 14,9 persen dalam kondisi cukup dan yang berada dalam kondisi buruk mencapai lebih dari 50 persen atau tepatnya 60,4 persen. Perhatian pada buruknya pengolahan limbah, patut menjadi prioritas, karena banyak contoh usaha terhenti gara-gara limbah. Kebersihan dan kesehatan lingkungan sama pentingnya dengan peningkatan kehidupan yang layak.

Tabel 3.36. Fasilitas Pendukung

Sarana Pendukung Usaha	Buruk		Cukup		Baik	
	Frekuensi	%	Frekuensi	%	Frekuensi	%
Air Bersih	0	0	5	5	96	95
Pengolahan Limbah	61	60,4	15	14,9	25	24,8
Sarana Transportasi	3	3	13	12,9	85	84,2
Sarana Telekomunikasi	0	0	7	6,9	94	93,1

Sumber: Olah Data, 2019

3.1.3 Peta Pengukuran Perkembangan Klaster Industri Rumahan Kabupaten Lampung Selatan

Berikut dideskripsikan perkembangan klaster dilihat dari sisi kelembagaan klaster, aktivitas klaster, kinerja usaha dan konektivitas klaster.

1. Kelembagaan Klaster

a. Inisiator

Inisiator klaster menjadi ukuran dalam melihat perkembangan klaster.

Tabel 3.37. Inisiator Klaster IR

No	Inisiator Klaster	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pemerintah	100	70,93
2	Swasta	21	14,89
3	Masyarakat	20	14,18
	Jumlah	101	100 %

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Sebanyak 70,93% klaster didirikan atas prakarsa pelaku usaha yang ada di dalam klaster. Kesadaran untuk berorganisasi sebagai salah satu upaya mengembangkan usaha dan kelompoknya menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kelembagaan kelompok. Sedangkan stakeholder yang berkepentingan dalam pengembangan dan pemberdayaan pelaku IR turut berperan menjadi inisiator terbentuknya manajemen klaster, yang dalam hal ini adalah swasta dan masyarakat, walaupun yang berperan jumlahnya sedikit, yaitu 14,18% dan 14,89%. Perbedaan bentuk kelembagaan menentukan pola manajemen klaster. Pada indikator kelembagaan klaster di jelaskan dalam indikator bentuk kelembagaan klaster.

b. Bentuk Kelembagaan

Tabel 3.38. Bentuk Kelembagaan

No	Inisiator Klaster	Jumlah	Prosentase (%)
1	Berbadan hukum koperasi	0	0
2	Tidak berbadan hukum formal: forum, klaster	1	1%
3	Bentukan: Paguyuban, gapoktan	30	29,7
4	Alamiah: sentra, kelompok	70	69,3
	Jumlah	101	100 %

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Ada 4 bentuk kelembagaan yang dipilih dalam mengelola klaster, tabel berikut ini memberikan gambaran tentang bentuk kelembagaan tersebut. Sentra adalah bentuk kelembagaan yang paling sederhana di dalam klaster, tidak ada kerjasama ataupun jalinan bisnis (koneksi) yang terjadi antar pelaku usaha yang ada di dalam klaster. Keberadaan mereka hanya karena kondisi geografis yang berada dalam satu lokasi yang berdekatan. Terdapat 69,3% pelaku usaha yang ada pada tingkatan bentuk kelembagaan sentra. Bentuk kelembagaan kelompok dan paguyuban merupakan bentuk kelembagaan yang banyak juga ditemukan dalam klaster, bentuk kelembagaan ini banyak disukai karena tidak mengikat, dan menggunakan pola ikatan yang bersifat sosial. Pada klaster dengan basis pertanian mereka memilih berinteraksi dengan sesama pelaku usaha dalam wadah gapoktan, ini ditunjukkan dengan 29,7 % klaster mewadahi kelembagaannya dalam bentuk gapoktan. Bentuk kelembagaan gapoktan dan forum sudah diformalkan namun biasanya tidak berbadan hukum, sehingga keterlibatan pelaku usaha dalam bentuk kelembagaan ini lebih semi formal, walaupun sudah ada struktur organisasi dan spesifikasi pembagian peran yang jelas. Pada bentuk kelembagaan klaster juga sudah terdapat pembagian peran yang jelas sesuai dengan kaidah manajemen klaster. Bentuk kelembagaan klaster berupa forum dipandang bisa dilaksanakan dibandingkan dengan bentuk kelembagaan yang lain.

c. Kegiatan Lembaga Klaster

Tabel 3.39. Dampak&Manfaat Kegiatan Kelembagaan

No	Kegiatan Lembaga	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tidak mendukung	0	0
2	Sedikit Mendukung	11	10,90
3	Sangat Mendukung	90	89,10
	Jumlah	101	100 %

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Kegiatan lembaga dalam klaster dilihat dari kegiatan yang dilakukan didalam klaster, seperti pertemuan rutin sebagai wadah diskusi untuk menyelesaikan masalah, *market sharing*, akses pada program pemerintah, wadah untuk menggali informasi perkembangan usaha, pelatihan-pelatihan.

Sebanyak 10,90% berpendapat bahwa kelembagaan yang ada di dalam klaster tidak mendukung kegiatan dan perkembangan usaha IR. Sedangkan sisanya, 89,90% merasa bahwa kelembagaan yang ada di dalam klaster mendukung perkembangan dan kemajuan usaha.

2. Aktivitas Klaster

a. Lama Kegiatan Klaster

Tabel 3.40. Kepemilikan Izin Usaha

Kepemilikan Izin Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
Ada	5	4,95
Tidak Ada	96	95,05
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Tabel 3.41. Lama Usaha

Lama Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
<1 tahun	29	28,7
1-2 tahun	18	17,8
>2 tahun	54	53,5
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Tabel 3.42 Pola Produksi

Pola Produksi	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak kontinyu	9	8,9
Semi Kontinyu	11	10,9
Kontinyu	81	80,2
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Tabel 3.43. Status Tempat Usaha

Status Tempat Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Milik Sendiri	96	95
Sewa	3	3
Milik Bersama	1	1
Kontrak	1	1
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Tahun mulainya kegiatan kelembagaan klaster menjadi salah satu indikator pada variabel aktivitas usaha yang sudah dijalankan. Semakin lama tahun pendirian klaster diharapkan tingkat perkembangannya berada pada strata yang lebih ideal. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa 55% klaster yang diteliti berdiri kurang dari 5 tahun yang lalu, dan 100% berdiri antara 1-5 tahun yang lalu. Secara organisasi kelembagaan klaster yang ada masih pada strata awal dan tumbuh, karena berumur dibawah 10 tahun. Selanjutnya, perkembangan Jumlah Unit Usaha pada 5 tahun terakhir menjadi indikator aktivitas usaha, yang dapat digunakan untuk melihat strata perkembangan klaster.

b. Jumlah Unit Usaha Dalam Klaster

Tabel 3.44. Kategori Usaha

Kategori Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Pangan	101	100
Kerajinan	0	0
Penjahit	0	0
Pertanian	0	0
Perikanan	0	0
Peternakan	0	0
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Tabel 3.45. Kelas Usaha

Kelas Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
IR 1 (Skor 0-6)	2	2,0
IR 2 (Skor 7-12)	91	90,1
IR 3 (Skor 13-18)	8	7,9
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Jumlah unit usaha yang ada di dalam kluster menggambarkan besaran kluster dan perkembangan yang terjadi. Besaran kluster tersebut menentukan strata pada sebuah kluster, ada 101 unit usaha. Menurut definisi pengelompokan kluster unit usaha dibawah di atas 20, dapat dikategorikan sebagai kluster. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah dapat dianggap layak disebut sebagai kluster.

c. Kondisi Pasar

Tabel 3.46. Cara Penjualan Produksi

Cara Penjualan	Frekuensi	Persentase (%)
Jual langsung/lepas	62	61,4
Diambil Pedagang Keliling	9	8,9
Konsinyasi/dititipkan	23	22,8
Pelanggan Tetap	7	6,9
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Tabel 3.47 Wilayah Pemasaran

Wilayah Pemasaran	Frekuensi	Persentase (%)
Sekitar Desa	70	69,3
Luar Desa	25	24,8
Luar Kecamatan	5	5,0
Luar Kabupaten	0	0
Luar Provinsi	1	1
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Tabel 3.48 Cara Pembayaran

Cara Pembayaran	Frekuensi	Persentase (%)
Tunai	75	74,3
Non Tunai	26	25,7

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Salah satu indikator dari variabel aktivitas usaha adalah kondisi permintaan, dimana indikator ini menunjukkan scope aksesibilitas pelaku usaha IR terhadap perkembangan usahanya dalam hal permintaan dimana variabel ini juga mengindikasikan jejaring bisnisnya/*networking*. Sebanyak 69,3% permintaan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha IR yang diteliti hanya memenuhi permintaan lokal/desa. Sedangkan sebanyak 6% sudah memiliki pembeli diluar wilayah kegiatan usahanya. Kondisi permintaan yang hanya terbatas pada permintaan lokal ini dapat menggambarkan bahwa pelaku usaha yang ada di dalam kluster belum dapat mengakses pasar yang lebih luas jangkauannya, rantai distribusi mereka pendek, langsung dijual kepada konsumen atau pedagang yang ada di sekitarnya.

3. Kinerja Usaha

a. Nilai Tambah

Tabel 3.49. Nilai Tambah

Nilai Tambah	Frekuensi	Persentase (%)
>75,00%	55	54,45
50,00%-75,00%	40	39,60
25,00%-50,00%	5	4,95
<25,00%	1	1
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Nilai tambah merupakan salah satu indikator untuk melihat apakah usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai lebih dari produk yang dihasilkan. Nilai tambah yang tinggi menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan bernilai jual tinggi atau meningkat dibandingkan sebelumnya.

Sebagian besar pelaku IR dapat memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan antara 50-75%. Secara keseluruhan nilai tambah berada di atas 90%, ini menunjukkan bahwa pelaku usaha yang ada di dalam klaster sudah relatif mapan dengan kondisi usahanya. Nilai tambah yang tinggi juga menunjukkan kemampuannya untuk melakukan efisiensi dengan produksi dengan menggunakan jejaring yang ada di dalam klaster.

b. Tingkat Keuntungan

Tabel 3.50 Tingkat Keuntungan

Nilai Tambah	Frekuensi	Persentase (%)
Menurun	1	1
Tetap/Stabil	5	4,95
Meningkat	95	94,05
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Penekanan penting dalam melihat perkembangan klaster salah satunya melihat perubahan keuntungan. Berikut ini dilihat perkembangan tingkat keuntungan pelaku usaha dalam klaster. Tingkat Keuntungan yang tinggi menunjukkan bahwa biaya produksi yang rendah. Keberlangsungan usaha dalam kelompok klaster akan dapat bertahan ketika dalam wadah klaster kegiatan usaha menjadi efisien, salah satu indikatornya adalah rendahnya biaya atau tingginya keuntungan yang didapat. Selama 3 tahun terakhir 94,05% pelaku usaha yang ada di dalam klaster mengalami peningkatan keuntungan, sedangkan 4,95% stabil dan ada 1% yang mengalami penurunan. Strata perkembangan klaster dapat dilihat dengan melihat kinerja usaha dari sisi keuntungan. Keuntungan yang menurun menunjukkan bahwa jenis usaha atau produk yang dihasilkan sudah tidak dapat menghasilkan keuntungan yang baik. Ini menunjukkan bahwa pada saat terjadi penurunan maka klaster juga berada pada siklus yang menurun. Demikian juga pada saat keuntungan meningkat maka klaster juga akan ikut berkembang.

b. Jangkauan Pemasaran

Tabel 3.51 Perkembangan Orientasi Pasar

Nilai Tambah	Frekuensi	Persentase (%)
Export		
Propinsi/Nasional		
Luar Kota	1	1
Lokal	100	99
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Perkembangan Orientasi pasar menjadi salah satu pengukur kinerja usaha, orientasi pasar yang semakin luas menggambarkan perkembangan yang tinggi. Sebanyak 55% klaster perkembangan orientasi pasarnya masih berada pada lokal. Sedangkan 45% sudah berorientasi pada wilayah diluar lokasi usahanya. Perkembangan pasar yang semakin luas menunjukkan strata perkembangan klaster pada tahapan yang lebih tinggi. Untuk dapat melakukan ekspor maka *supply* dan produksi dari suatu unit usaha harus berada pada tataran mapan/ stabil, unit usaha yang stabil dan tergabung dalam klaster menunjukkan kinerja klaster sedang berkembang perintisannya atau menurun.

3.1.4 Konektivitas

1. Koneksi Usaha

Tabel 3.52 Koneksi Usaha

Nilai Tambah	Frekuensi	Persentase (%)
Inti, Pemasok, Jasa, Dagang	0	0
Pemasok dan inti	0	0
Produsen	101	100
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Konektivitas oleh ekspert dibidang klaster menjadi variabel yang memiliki skor yang tinggi karena kinerja klaster sangat menonjol terutama pada keterkaitan kerja dan hubungan yang ada. Adanya sistem inti dan

subkontrak menjadi salah satu ciri khas dalam kluster. Sebanyak 100% pelaku IR hanya terdapat produsen saja, dan tidak terkait dengan usaha lain.

1. Kerjasama Vertikal dan Horizontal

Tabel 3.53 Kerjasama Vertikal & Horizontal

Kerjama Vertikal & Horizontal	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak ada	12	11,88
Ada	89	88,11
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Kerjasama antar pengusaha sudah ada di dalam kluster hal ini ditunjukkan bahwa 88,11% dari kluster. Sedangkan yang tidak ada kerjasama sebesar 11,88%.

2. Spesialisasi Usaha

Tabel 3.54 Spesialisasi Usaha IR

Spesialisasi Usaha	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak ada	0	0
Ada	101	100
Total	101	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Spesialisasi pekerjaan menunjukkan apakah dalam sebuah dalam IR sudah ada pembagian pekerjaan yang jelas sesuai dengan tahapan kegiatan produksi, dan aktivitas produksi sudah terspesialisasi dalam unit usaha yang berbeda-beda. Semakin kompleks maka semakin tinggi strata yang dimiliki oleh suatu kluster. Rata-rata IR sudah ada spesialisasi / pembagian kerja yang berada pada unit sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan 100% menyatakan di dalam IR sudah ada spesialisasi khususnya dalam proses produksi.

4. Keterlibatan Lembaga Pendukung

Tabel 3.55 Lembaga Pendukung

Lembaga Pendukung	Frekuensi	Persentase (%)
Pemerintah	50	49,50
Perguruan Tinggi	0	0
Perbankan, BI	0	0
Pemerintah, Perguruan Tinggi	40	39,60
Pemerintah, Bisnis	10	9,9
Pemerintah, Bisnis, Perguruan Tinggi	1	1
Total	101	100

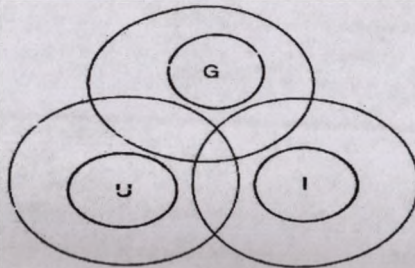
Sumber: Data Primer Yang Diolah, 2019

Keterlibatan lembaga pendukung menjadi salah satu indikator dari variabel konektivitas. Keterlibatan lembaga yang semakin banyak jumlah dan organisasinya menunjukkan konektivitas yang semakin tinggi, sehingga peluang ke arah kluster semakin tinggi.

3.2. TRIPLE HELIX DALAM PENGEMBANGAN KLAS TER INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN

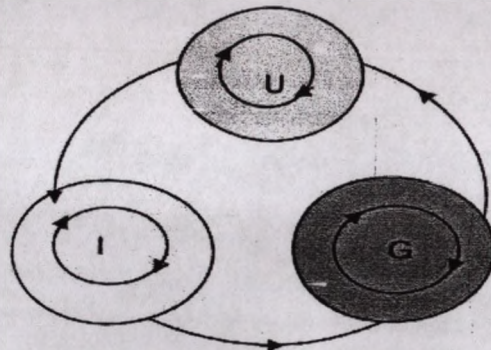
Industri rumahan memiliki berbagai masalah baik masalah internal maupun masalah eksternal. Masalah internal yang terjadi meliputi kelembagaan, aktivitas usaha, kinerja usaha, konektivitas dan perlindungan pemerintah. Dalam melakukan intervensi terhadap pembentukan kluster industri rumahan, pemerintah menerapkan konsep *triple helix* dalam mengembangkan kluster IR yang terdiri dari pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Model *Triple Helix* (Etzkowitz, 2008), adalah sebuah model penyelesaian masalah dengan melibatkan swasta (Bisnis/Industry) dan perguruan tinggi (university) dalam pembagian urusan sesuai dengan kemampuannya. *Triple Helix* menjadi payung yang menghubungkan antara Universitas (*Intellectuals*), Bisnis/industri (*Business*), dan Pemerintah (*Government*) dalam kerangka bangunan pemberdayaan ekonomi. Ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri rumahan perempuan.

Pembagian urusan dan kolaborasi antar stakeholder yang terangkum dalam *triple helix model* merupakan konsep yang efektif dan efisien dalam pengembangan industri rumahan. Selain program yang dijalankan tepat sasaran, konsep ini juga akan memberikan efisiensi terkait pendanaan dan waktu. Sistem Hubungan yang erat, saling menunjang, dan bersimbiosis mutualisme antara ke-3 aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model pemberdayaan ekonomi, akan menentukan pengembangan ekonomi perempuan yang kokoh dan berkesinambungan.



Sumber: Etzkowitz (2008)

Gambar 3.3 Triple Helix Field Interaction Model



Sumber: Etzkowitz (2008)

Gambar 3.4. Circulation of Individuals In The Triple Helix.

Dalam *triple helix model*, pemerintah (*Government*) berperan dalam memberikan kemudahan perizinan dan penyediaan sarana fisik yang

dibutuhkan untuk keberjalanan pelaku industri rumahan (IR). Berbagai penyediaan sarana fisik meliputi jalan, transportasi hingga alat-alat yang dibutuhkan IR. Administrasi keuangan usaha diserahkan sepenuhnya kepada perguruan tinggi (*University*). Berbagai kurikulum berorientasi entrepreneurship, riset inovatif multidisiplin, lembaga pendidikan dan pelatihan dengan berlandaskan akademis diharapkan mampu dicerna dengan baik oleh pelaku usaha.

Pemerintah dan swasta (*Bisnis/Industry*) berkolaborasi dalam penyediaan modal, kemudahan memperoleh kredit dan *reservation scheme*. Dalam penyediaan modal IR, pemerintah harus berani memanfaatkan uang *tax payer* untuk dalam pembayaran bunga bagi pelaku usaha kecil yang meminjam di bank. Pemerintah membantu penyediaan modal bagi industri kecil dan menengah (rumahan) diperbolehkan karena sesuai dengan prinsip pembiayaan pembangunan yaitu *utility contractarian* karena memaksimalkan potensi sumber daya yang ada yaitu potensi SDM. Namun pemerintah juga perlu bekerja sama dengan swasta (*Bisnis/Industry*), karena dana yang pemerintah miliki terbatas. Peran swasta sangat besar untuk menumbuhkan IR. Berbagai peran mulai dari kewirausahaan, *business coaching and mentoring*, skema pembiayaan, pemasaran dan *business matching*. Melalui dana CSRnya mereka dapat memberikan modal kepada masyarakat yang akan mendirikan industri. Sementara itu dalam mengelola *reservation scheme* pemerintah bekerja sama dengan swasta agar swasta dengan harapan terdapat pihak swasta yang tertarik berinvestasi atau bekerja sama dengan IR.

3.3. MODEL KEBIJAKAN RINTISAN KLUSTER INDUSTRI RUMAHAN BERBASIS THE TRIPLE HELIX DALAM MEWUJUDKAN GENDER EQUATY PEREMPUAN

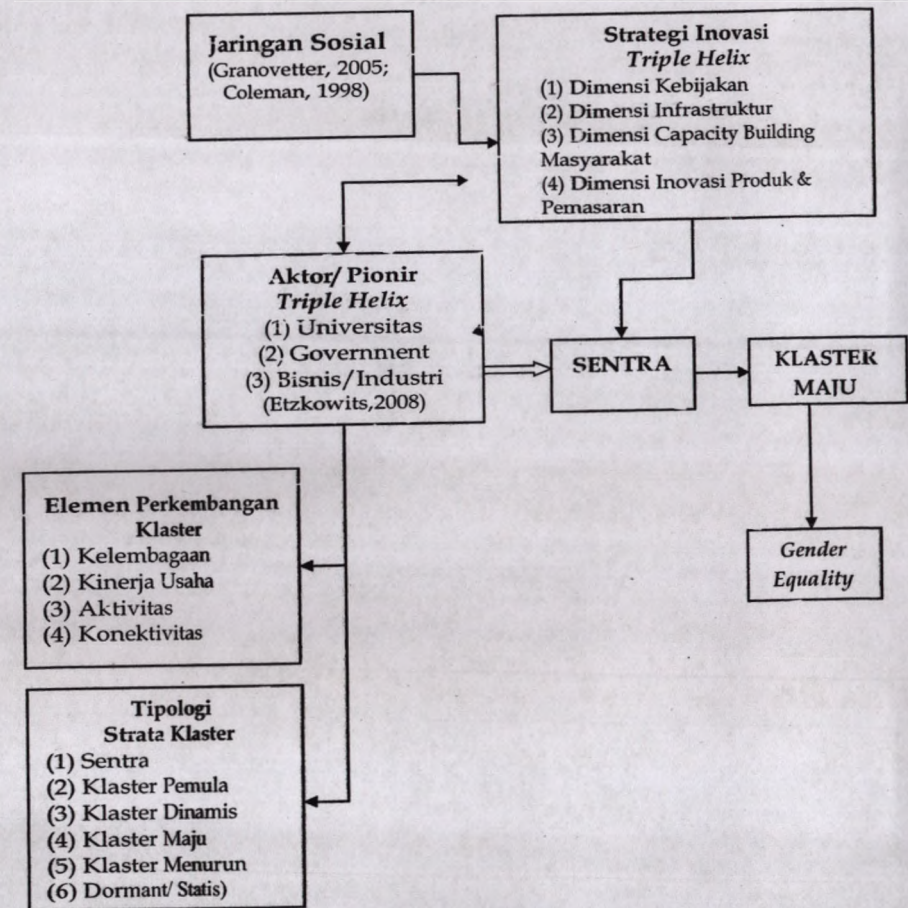
Rancangan model kebijakan rintisan kluster berbasis triple helix, didasari dari temuan variabel dan dimensi perkembangan kluster. Diperlukan strategi triple helix dalam mendorong perkembangan kluster pada masing-masing stratifikasi perkembangan kluster. Konsep utama desain model kebijakan adalah spesialisasi /kekhususan kluster industri rumahan (IR) dengan pendekatan *triple helix* yang mengkolaborasikan peran universitas, *Business/industry* dan *Government* (ABG) dalam pengembangan kluster . Dengan demikian tergambar desain strategi yang menyangkut

kebijakan pemerintah yang diperlukan dan infrastruktur yang dibutuhkan, *capacity building* (kapasitas masyarakat) serta inovasi produk-produk dan pemasaran yang ditawarkan oleh sebuah klaster wilayah.

Dimensi perkembangan klaster dilihat dari 4 faktor, yaitu: 1) Kelembagaan; merupakan aktivitas pada klaster yang termanajementi oleh organisasi yang terstruktur dan dapat menjadi roda penggerak dinamikan klaster tersebut; 2) Aktivitas Usaha; kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit usaha yang ada dalam klaster, mulai dari aspek produksi sampai pemasaran; 3) Kinerja Usaha; seberapa besar tiap usaha yang ada dalam klaster mendapat keuntungan dan efisiensi dari kegiatan usaha yang terspesialisasi karena klaster yang terbentuk; 4) Konektivitas dan Peran pemerintah; organisasi yang saling terkait dengan beragam jenis hubungan yang berbeda.

Sedangkan Tipologi dalam melihat stratifikasi perkembangan klaster adalah: *pertama*: Sentra, merupakan unit kecil kawasan yang memiliki ciri tertentu, dimana terdapat kesatuan fungsional secara fisik: lahan, geografis, infrastruktur, kelembagaan dan sumberdaya manusia, yang berpotensi untuk berkembangnya kegiatan ekonomi dibawah pengaruh pasar dari suatu produk yang mempunyai nilai jual dan daya saing tinggi. *Kedua*: Klaster Pemula (*Start Up*), adalah klaster dengan Kelembagaan yang belum kompleks, pendiriannya diinisiasi oleh pemerintah, mulai terbentuk masih kurang dari 2 tahun, Aktivitas Usaha sederhana, teknologi masih tradisional. *Ketiga*: Klaster Dinamis (*Growth*), adalah klaster dengan Kelembagaan yang sudah mulai menuju pada kompleksitas dalam arti organisasi dalam klaster sudah termanajementi walaupun belum dalam lembaga manajemen klaster, pendiriannya diinisiasi karena ada interest dari sesama pelaku usaha dalam klaster, mulai terbentuk antara 3-4 tahun yang lalu. Aktivitas Usaha sudah lebih kompleks ada inovasi produk dan menggunakan teknologi moderen. *Keempat*: Klaster Maju (*Mature*), Kelembagaan yang sudah sangat kompleks, pendiriannya diinisiasi oleh pengusaha sendiri, sudah sangat kompleks sudah terdapat manajemen klaster, mulai terbentuk antara 5-10 tahun yang lalu. Aktivitas Usaha sudah menggunakan teknologi dan inovasi, permintaan sudah sampai pada Internasional. *Kelima*: Klaster Menurun (*Decline*), Kelembagaan yang belum kompleks, pendiriannya diinisiasi bisa oleh pemerintah atau interest dari pengusaha sendiri, sudah berdiri lebih dari 10 tahun namun tidak juga terbentuk organisasi manajemen klaster yang

terorganisi dengan baik. *Keenam*: Dormant/Statis, klaster dengan kondisi stagnan atau tidak ada perkembangan yang menunjukkan perubahan kearah berkembang walaupun sudah lama eksis di suatu tempat.



Gambar 3.5. Model Kebijakan Rintisan Kluster Berbasis The Triple Helix

Berbasis hasil penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2019), maka stratifikasi perkembangan klaster belum berupa klaster yang matang, masih merupakan rintisan klaster. Tipologi stratifikasi dan perkembangan klaster di Kabupaten Lampung Selatan diawali dari berupa :

1. *Sentra*. Awalnya merupakan kelompok atau kumpulan para produsen suatu produk sejenis di kawasan desa yang berdekatan. Kerjasama usaha antar pelaku IR masih terbatas persaudaraan atau bahkan tidak ada sama sekali. Mereka hanya memiliki kesamaan jenis usaha (ikan laut dan pisang) yang secara geografis berkumpul dalam satu wilayah. Keberadaan mereka dalam satu wilayah geografis yang sama terjadi karena keberadaan sumberdaya alam yang mendukung perkembangan kegiatan produksi mereka. Sebagian besar pelaku IR belum mampu menggali peluang pasar, bahkan tidak mampu mengenali siapa target pasar mereka di luar kewasannya, berapa volume permintaannya. Aksesibilitas terhadap pasar menjadi rendah karena pasarnya lokal atau pembeli yang langsung datang kepada produsen. Gambaran analisis tersebut sesuai dengan hasil analisis yang terdapat dalam beberapa tabel di atas. Belum ada konektivitas diantara pelaku, hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan langsung dijual kepada pedagang atau konsumen tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Tergambar tidak ada motivasi untuk mengembangkan produk dan mendapatkan keuntungan yang lebih dari kerjasama yang ada dalam klaster tidak dapat tercipta. Efisiensi produksi yang diharapkan dapat mendorong mereka untuk bekerjasama dan memiliki spesialisasi tidak akan terjadi. Produk primer yang langsung dijual tidak menggunakan teknologi mesin dalam memproduksi. Demikian juga halnya inovasi produk, tidak adanya inovasi karena motivasi mereka produk yang dihasilkan tanpa harus susah payah diolah sudah terjual. Secara teoritis ciri utama dari sentra adalah ciri peralatan dan teknologi masih tradisional dan belum mempunyai cara kerja yang efisien, serta belum mempunyai kemampuan dalam menggali pasar dan sama sekali tidak ada konektivitas pada kelompok usaha ini. Model triple helix yang mengidealkan sinergitas strategi kebijakan yang mengarah pada terjadinya linkage antara pemerintah, swasta/industri dan perguruan tinggi, tidak terjadi pada strata perkembangan klaster yang masih berupa sentra.
2. *Dormant/Static*. Pada awal perkembangan klaster dimulai dari unit-unit usaha yang beraglomerasi akibat dari pemanfaatan keuntungan pemusatan usaha, yaitu keuntungan kolektif dari infrastruktur, pengumpulan pekerjaan, image pemasaran dan penyediaan input. Tahapan ini disebut sebagai aglomerasi usaha. Dengan adanya

- pendekatan tempat usaha, masing-masing usaha yang memiliki komponen produksi dan mendorong terjadinya hubungan komplementer. Tahapan ini kemudian dikenal sebagai awal mulai tumbuhnya klaster yang sesungguhnya, karena ada indikasi konektivitas. Sebagai embrio untuk Klaster sejumlah usaha dalam aglomerasi mulai bekerja sama di sekitar kegiatan inti, dan menyadari peluang umum melalui linkage mereka. Akan tetapi setelah berjalan lama kerjasama tidak menjadi daya tarik di dalam strata perkembangan klaster ini menjadi daya tarik (magnet) bagi usaha lain untuk ikut bergabung dalam kawasan industri tersebut. Pada tahapan ini dimensi lain belum dapat menjelaskan perannya dalam aktivitas industri pada kelompok aglomerasi yang terjadi. Program pemberdayaan ekonomi perempuan di Lampung Selatan masuk pada tahap ini, dengan pengembangan aspek aksesibilitas, inovasi produk dan penggunaan teknologi. Seiring dengan berjalannya waktu, pasar, teknologi, dan proses perubahan, seperti halnya kelompok. Maka klaster perlu untuk bertahan hidup, berkelanjutan dan menghindari stagnasi dan pembusukan, untuk itu harus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan ini. Hal ini dapat mengambil bentuk transformasi menjadi satu atau beberapa kelompok baru yang fokus di sekitar kegiatan lain atau hanya pengembangan produk dan layanan yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis variabel yang mendukung analisis ini adalah waktu pendirian klaster yang sudah cukup lama. Seiring dengan adanya variabel waktu lama maka jarang disadari bahwa mulai terjadi penurunan motivasi untuk mendapatkan manfaat bersama dari adanya klaster sehingga tidak tercipta kerjasama dengan pemerintah, pihak swasta yang lain dan akademisi. Keadaan ini menjadi titik kritis perkembangan klaster, jika dibiarkan maka bisa jadi klaster akan mati atau akan tetapi jika berkembang baik akan mengalami transformasi menjadi bentuk klaster-klaster baru yang lain. Melihat usia keberadaan aglomerasi yang sudah lama maka peran pemerintah dalam mensupport juga mengalami degradasi.
3. *Tumbuh/Growth*. Merupakan tahap terjadi spesialisasi supplier dan pengusaha yang menyediakan jasa. Adanya spesialisasi tenaga kerja dan penggunaan fasilitas bersama untuk produksi. Tersedia adanya organisasi pelatihan, riset dan asosiasi yang berkontribusi dan berkolaborasi yang memberikan informasi dan pengetahuan. Ada 4

variabel yang menunjukkan signifikan untuk melihat perkembangan klaster pada tahapan ini yaitu Inovasi, Institusional Linkage, Keuntungan dan Perkembangan Orientasi Pasar. Waktu atau usia klaster tidak menjadi variabel yang menentukan untuk mengukur perkembangan klaster karena dari sisi waktu perkembangan kelembagaan klaster masih tergolong muda. Tipe perkembangan pada tahapan ini belum sempurna kondisi klaster ideal, karena belum semua lembaga pendukung berada dalam satu lokasi geografis. Kondisi ini digambarkan dengan pengelompokan sejumlah besar perusahaan kecil, menengah moderen dengan spesialisasi dan jaringan kerjasama yang sehat. Kerjasama terjadi karena adanya dorongan untuk meningkatkan nilai tambah dari berbagai aktivitas dalam suatu rangkaian "supply chain" suatu komoditas. Walaupun kegiatan usahanya homogen akan tetapi pada tahapan perkembangan ini terdapat kumpulan pelaku IR tanggap terhadap peluang mengembangkan usaha dalam hal desain dan inovasi produk. Keterkaitan antar pelaku IR dalam klaster dalam satu sektor dan dengan pelaku IR dalam klaster pada sektor lain (antara), akan mendorong kemitraan antara IR dengan perusahaan menengah dan kaitan interaktif yang relevan lainnya terus menerus terbentuk, sehingga membentuk jaringan industri serta struktur yang mendukung peningkatan nilai tambah melalui peningkatan produktivitas usaha. Pada tahapan perkembangan ini merupakan tahapan menuju pada kondisi ideal dari klaster. Ketepatan program dan ada atau tidaknya intervensi dari pihak luar akan sangat menentukan kearah mana klaster ini akan berkembang atau menurun. Mengingat infrastruktur sudah ada dan konektivitas sudah terjadi, hanya tinggal persaingan usaha/kompetisi antar pengusaha yang terjadi di dalam klaster yang akan mewarnai arah perkembangannya. Persaingan usaha yang kondusif/sehat akan membawa pada keberlangsungan klaster dan perkembangan yang baik, sedangkan kompetisi yang tidak sehat akan menyebabkan kehancuran reputasi dan menurunnya efisiensi yang ada sehingga perusahaan yang tidak kuat akan mengalami kehancuran.

Analisis penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2019), tidak menemukan klaster ideal/*mature* karena jasa layanan penunjang, lembaga penelitian tidak berada pada wilayah kerja klaster. Proses munculnya

usaha inti dalam satu lokasi serta usaha penunjang yang dibutuhkan, dan menjalin kerjasama bertujuan untuk mencapai skala ekonomis yang saling menguntungkan. Proses perkembangan ke arah stratifikasi membentuk pola tertentu yang dapat diidentifikasi dari Institusional Linkage yang terbentuk, yang terbentuk dari pola hubungan horisontal, vertikal dan institusi.

Selanjutnya dengan hasil arah dan stratifikasi klaster IR, maka the triple helix dapat berperan pada 4 dimensi sebagai elemen percepatan klaster ideal, diantaranya:

Pertama, Dimensi Kebijakan Pemerintah Lokal (*Local Public Policy*). Dalam konteks pengembangan klaster IR, hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten diantaranya yakni: (a) secara legal formal, keberadaan klaster IR harus tertuang dalam hasil arah dan stratifikasi Rencana Induk Pengembangan IR. Jika terdapat payung kebijakan yang berupa Rencana Induk Pengembangan IR (RIP IR) maka secara legal formal keberadaan klaster IR akan kuat secara hukum. Begitu pula dari sisi penganggarannya, dengan keberadaan RIP IR merupakan alasan legal untuk memunculkan biaya-biaya pengembangan klaster kedalam pos anggaran (APBD/APBDes). Pemerintah kabupaten dengan Bappeda selaku koordinator mengkoordinasikan program prioritas ini ke dalam program-program OPD yang tidak hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, akan tetapi juga melibatkan OPD yang lain; (b) yang perlu dilakukan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan kebijakan yakni upaya perlindungan hukum terhadap produk unggulan terutama pada klaster IR dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) terkait dengan motif dan produk. Wujud perlindungan hukum terhadap produk unggulan Kabupaten pada umumnya dan produk unggulan pangan IR pada khususnya adalah berupa Peraturan Daerah/Keputusan Bupati. Peraturan ini akan mengatur tentang produk-produk yang menjadi unggulan terutama di kabupaten Lampung Selatan serta secara eksplisit dan implisit juga mencantumkan desain dan produk yang menjadi ciri khas kabupaten Lampung Selatan.

Kedua, Dimensi Pemenuhan Sarana dan Prasarana (*Infrastructure*). Sarana dan prasarana yang dibutuhkan yakni berupa akses jalan raya yang layak, tersedianya "tempat", yang dikaitkan dengan perkembangan desa, misalnya desa wisata, seperti area penjualan, tempat ibadah, rumah makan

atau restoran dan tempat penginapan atau *home stay*. Pemerintah harus lebih tanggap kepada pemenuhan sarana dan prasarana yang dapat mendukung lancarnya perkembangan klaster IR.

Ketiga, Membangun Kapasitas Masyarakat (*Capacity Building*). Pengembangan sumberdaya masyarakat lokal sangat memegang peranan penting, karena masyarakat lokal adalah subjek dan sekaligus objek dari klaster IR itu sendiri. Pengembangan sumberdaya masyarakat lokal dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pendidikan dan latihan. Hal yang memegang peranan penting dalam pembangunan kapasitas yakni penguatan sistem organisasi dan manajemen. Karena fokus dalam penelitian ini adalah klaster/wilayah, maka 'desa' adalah *leading sector* dalam penguatan organisasi dan manajemen. Desa harus sebagai penggerak atas penguatan organisasi lokal yang ada di desa seperti halnya paguyuban, pengajian maupun arisan dengan tidak melalaikan fokus utama olah pangan sebagai sentra perhatian. Dari sisi manajemen, masyarakat desa harus 'berdaya' dalam hal manajemen, baik manajemen usaha, manajemen pemasaran, maupun manajemen sumberdaya manusia meskipun masih dalam tataran manajemen tingkat dasar.

Keempat, Inovasi Produk, dan Pemasaran (*Innovation*). Temuan baru yang bisa berupa ide, metode, dan bentuk yang berbeda dari yang sudah ada merupakan sebuah inovasi serta bagian dari pengembangan produk. Inovasi produk tidak harus muncul dari pemilik tetapi bisa jadi muncul dari mana saja. Inovasi produk pada industri rumahan muncul dari pelaku usaha sendiri. Di samping itu ada kemungkinan lain yakni adanya inovasi yang muncul dari ide kreativitas maupun imajinasi dari sumber-sumber lain yang menyumbang munculnya ide baru. Adopsi teknologi informasi di klaster industri rumahan dapat dilakukan secara terintegrasi. Integrasi yang dimaksudkan adalah mengajak dan melibatkan desa-desa lain yang ada disekitar untuk mengekspose dalam pusat informasi dan promosi, sehingga masyarakat luas akan mengetahui tentang potensi produk masing-masing desa, dan informasi lainnya. Dengan adanya akses internet di kawasan klaster IR, terutama di kalangan pelaku IR akan didapat ide-ide baru. Pemasaran pada saat ini telah mengalami perkembangan. Hal ini karena kegiatan pemasarannya tidak hanya melalui pemasaran langsung ke konsumen tapi juga telah menggunakan internet meskipun masih sebagian kecil pelaku IR

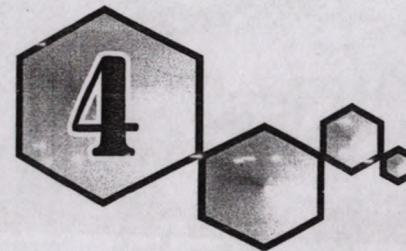
menggunakan media *online* ini. Para pelaku IR ini umumnya menggunakan media social seperti facebook. Kemudian pada pelaku juga sudah membentuk forum IR. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dalam pemasaran juga harus bekerjasama dengan para pengusaha/ pengepul/ pebisnis sedang dan besar, serta para Akademisi/ perguruan tinggi/ Universitas. Hal ini karena keberadaan para industri/pebisnis dan universitas ini sangat membantu kelancaran pemasaran dari hasil IR. Dengan sinergi antara para pebisnis/ industri, universitas dengan pemerintah tentunya juga akan membantu dan mendorong lancarnya kegiatan yang dilakukan para pelaku IR.

3.4 KESIMPULAN

Model pengembangan klaster industri rumahan sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan *gender equality*, dilakukan dengan menerapkan konsep *triple helix*. *Triple Helix* menjadi payung yang menghubungkan antara Universitas (*Intellectuals*), Bisnis/industri (*Business*), dan Pemerintah (*Government*) dalam kerangka bangunan pemberdayaan ekonomi. Ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri rumahan perempuan.

Rancangan model kebijakan rintisan klaster berbasis *triple helix*, didasari dari temuan variabel dan dimensi perkembangan klaster yang belum matang, masih merupakan rintisan klaster. Tipologi stratifikasi dan perkembangan klaster di Kabupaten Lampung Selatan diawali terbentuknya sentra, kemudian dormant/ statis dan terakhir tumbuh/ *growth*.

Diperlukan strategi *triple helix* dalam mendorong perkembangan klaster pada masing-masing stratifikasi perkembangan klaster. Konsep utama desain model kebijakan adalah spesialisasi /kekhurusan klaster industri rumahan (IR) dengan pendekatan *triple helix* yang mengkolaborasikan peran universitas, *Business/industry* dan *Government* (ABG) dalam pengembangan klaster. Dengan demikian, tergambar desain strategi yang menyangkut kebijakan pemerintah yang diperlukan dan infrastruktur yang dibutuhkan, *capacity building* (kapasitas masyarakat) serta inovasi produk-produk dan pemasaran yang ditawarkan oleh sebuah klaster wilayah.



PERAN JARINGAN SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN KLASTER INDUSTRI RUMAHAN

4.1. JARINGAN SOSIAL

Sebuah jaringan sosial adalah hubungan-hubungan sosial relatif berlangsung lama dan terpola. Hubungan-hubungan sosial yang terjadi sekali saja di antara dua orang individu bukan merupakan jaringan sosial. Jaringan sosial penting dalam transaksi atau pertukaran ekonomi. Pemaknaan jaringan sosial dalam transaksi ekonomi ditunjukkan oleh Granovetter (2005), Biggart (2001), Macaluay (1963), Podolny (1998). Jaringan sosial yang padat yang melibatkan banyak orang (anggota) dalam suatu komunitas bisa mencegah terjadinya pelanggaran norma, mempermudah penyebaran informasi dan meningkatkan solidaritas sosial (Coleman, 1988). Masyarakat yang komunitasnya memiliki banyak jaringan sosial padat lebih kondusif bagi pembangunan ekonomi (Putnam, 1993). Arti penting jaringan sosial dalam pertukaran ekonomi baru disadari oleh para ahli sosiologi setelah tulisan Granovetter diterbitkan. Granovetter mengkritik pandangan Williamson yang terlalu menekankan sisi rasional pertukaran ekonomi.

Menurut Williamson (dalam Granovetter, 2005), terdapat dua bentuk pertukaran, yaitu pertukaran pasar dan pertukaran hierarkhi. Pertukaran pasar dilakukan jika pertukaran terjadi secara langsung, tidak berulang dan tidak memerlukan banyak waktu, energi, dan uang (investasi spesifik transaksi). Pertukaran dalam hierarkhi akan dilakukan jika transaksi dalam

hierarkhi bisa mengatasi masalah waktu, energi dan uang. Dalam pertukaran hierarkhi proses transaksi diinternalisir dalam hierarkhi untuk dua alasan: *Pertama* adalah rasionalitas terbatas yang berupa ketidakmampuan individu untuk mengantisipasi sejumlah ketidakpastian. Jika proses transaksi diinternalisir maka individu tidak perlu mengantisipasi ketidakpastian tersebut karena ketidakpastian tersebut bisa diatasi dengan otoritas yang ada dalam organisasi sehingga tidak memerlukan negosiasi yang rumit. *Kedua*, dengan internalisasi tersebut oportunisme (*seeking interest with guile*) bisa diatasi dengan otoritas dalam organisasi (Powell, 1990).

Granovetter (2005) mengatakan bahwa tindakan ekonomi (misalnya pertukaran atau jual-beli) selalu melekat pada hubungan-hubungan sosial. Hubungan-hubungan sosial dan struktur hubungan sosial (atau jaringan) akan menghasilkan kepercayaan (*trust*) dan mencegah terjadinya penyimpangan (*mifescance*) oleh aktor ekonomi. Ada alasan mengapa demikian: (a) Dalam hubungan sosial individu akan memberikan informasi lebih murah, (b) informasi tersebut lebih baik, lebih kaya dan akurat, (c) individu yang memiliki hubungan secara terus-menerus akan memiliki motif ekonomi agar dirinya dapat dipercaya, dan (d) hubungan-hubungan ekonomi secara terus-menerus akan disertai dengan isi sosial yang membawa harapan kuat untuk dipercaya dan menghindari oportunisme (Granovetter, 2005).

Podolny menunjukkan bahwa pertukaran jaringan merupakan alternatif dari pertukaran dalam hierarkhi dan pertukaran pasar. Podolny mendefinisikan bentuk organisasi jaringan (pertukaran jaringan) "sebagai sekumpulan aktor yang melakukan hubungan pertukaran secara berulang dan terus menerus satu dengan yang lain dan, pada saat yang sama, tidak ada yang memiliki otoritas organisasional untuk melakukan arbitrase dan memecahkan perselisihan yang muncul selama pertukaran" (Podolny *et al*, 1998). Definisi ini menunjukkan bahwa dalam bentuk organisasi jaringan, pertukaran ekonomi melekat pada hubungan-hubungan sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh Granovetter.

Unit usaha atau organisasi proses produksi pada saat yang sama bisa menggunakan pengaturan hierarkhi, pasar dan jaringan sosial dalam pertukarannya. Dalam kondisi bagaimana unit usaha menggunakan jaringan sosial pertukaran, Jones menunjukkan bahwa ada empat kondisi

yang memunculkan pengaturan jaringan, yaitu (Jones *et al*, 1997): (a) Ketidakpastian permintaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan disgregasi vertikal dengan cara melepaskan unit-unit usaha yang sebelumnya menjadi bagian perusahaan tersebut, terutama melalui *outsourcing* atau sub-kontrak. (a) Transaksi atas dasar pesanan yang membutuhkan keahlian yang sangat spesifik. Transaksi ini menciptakan ketergantungan antara dua belah pihak. Misalnya, kalau pembeli membatalkan pesanan maka penjual mengalami kesulitan untuk menjual pada pembeli yang lain, sebaliknya pembeli juga tidak bisa dengan mudah mengalihkan pada penjual yang lain. (c) Kompleksitas pekerjaan di bawah tekanan waktu. Kompleksitas pekerjaan menunjuk pada sejumlah masukan khusus dan berbeda-beda yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kompleksitas pekerjaan memunculkan saling ketergantungan dalam perilaku. Kompleksitas tugas dengan tekanan waktu juga akan mendorong koordinasi yang fleksibel. Dan (d) Frekuensi pertukaran. Frekuensi pertukaran yang tinggi di antara pihak-pihak yang terlibat mendorong penggunaan jaringan sebagai bentuk pengaturan alternatif.

Jones *et al* (1997) menunjukkan bahwa jaringan-jaringan sosial yang tertutup dan padat bisa mendukung kegiatan industri yang produksinya berdasarkan pesanan, membutuhkan kecepatan dan melibatkan banyak orang dengan beragam keahlian. Kegiatan industri tersebut tidak efisien kalau dilakukan dalam organisasi birokratis. Industri seperti ini cepat mengalami perubahan. Dalam industri tersebut informasi dan pengetahuan mudah menyebar karena tingginya mobilitas pekerja dari satu unit usaha ke unit usaha lain. Dalam jaringan tersebut informasi mengenai reputasi pekerja juga mudah menyebar. Penyebaran informasi membuat norma-norma profesi dan budaya umum mudah terbentuk dan efektif penerapan sanksinya terhadap perilaku menyimpang (Jones *et al*, 1997). Ketidakpastian permintaan yang dikemukakan oleh Jones tersebut di atas erat hubungannya dengan lingkungan institusional persaingan atau pasar bebas yang dikemukakan oleh Nee (2005) dan konteks institusional yang dikemukakan oleh Powell (Powell, 1990). Powell menunjukkan bahwa jaringan ikatan kuat mendominasi dalam industri yang bersifat kerajinan (*craft industries*). Industri ini misalnya berupa industri konstruksi, penerbitan, film dan rekaman (Powell, 1990).

Konteks atau lingkungan institusional yang berpengaruh terhadap kluster industri rumahan berupa pasar bebas. Hubungan antara lingkungan institusional dengan jaringan sosial dalam kluster industri rumahan kelompok perempuan nampak pada ketidakpastian permintaan sebagai akibat pasar bebas mendorong pelaku industri rumahan mengembangkan dan mempertahankan jaringan sosial pertukaran dengan pembeli (*buyer*) atau pedagang keramik dan dengan pengusaha penyedia bahan baku keramik dan diintegrasikan vertikal atau pengembangan hubungan sub-kontrak. Lingkungan institusional yang lain adalah berupa peraturan pemerintah mengenai syarat untuk menjadi eksportir, dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan kluster.

4.2. JARINGAN SOSIAL DALAM KLASER INDUSTRI RUMAHAN LAMPUNG SELATAN

Penelitian yang dilakukan Purwanto (dalam Tresiana dan Duadji, 2018) pada industri keramik Kasongan, menunjukkan peranan jaringan sosial selama elemen penting model kluster. Jaringan sosial berperan dalam mendapatkan modal ekonomi, tenaga kerja transaksi antar pengusaha dan dalam mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha di dalam kluster. Jaringan sosial penting dalam transaksi atau pertukaran ekonomi sebagaimana ditunjukkan Granovetter (2005). Jaringan sosial yang padat yang melibatkan banyak orang dalam suatu komunitas, bisa mempermudah penyebaran informasi dan meningkatkan solidaritas sosial (Coleman, 1988). Masyarakat yang komunitasnya memiliki banyak jaringan sosial padat lebih kondusif bagi pembangunan ekonomi (Putnam, 1993).

Dalam kaitannya dengan jaringan sosial, penelitian yang dilakukan Tresiana dan Duadji (2019) berjudul "Model Kluster Pengembangan Industri Rumahan dalam mewujudkan *Gender equality* Perempuan di Kabupaten Lampung Selatan", menunjukkan kontribusi jaringan sosial dalam perkembangan kluster IR kelompok perempuan. Pertanyaan yang dijawab dalam penelitian di atas adalah: (1) Bagaimana peranan jaringan sosial dalam mendapatkan tenaga kerja transaksi, mendapatkan modal ekonomi, dan bagaimana jaringan sosial mempertahankan keberlanjutan kegiatan usaha di dalam kluster industri rumahan kelompok perempuan; 2) Model jaringan sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian difokuskan pada hasil

penelitian tentang kluster IR Pangan perempuan yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dan observasi terhadap 101 orang pelaku IR, perangkat desa, dan pejabat pemerintah.

4.2.1 Jaringan Sosial Untuk Mendapatkan Tenaga Kerja

Pelaku Usaha Industri Rumahan di Kabupaten Lampung Selatan sebagian besar merupakan usaha atau industri rumah tangga (*home-industry*). Pelaku IR Maju yang mempekerjakan lebih dari 10 orang dan menggunakan manajemen sederhana pun pemiliknya berperan sebagai pimpinan usaha dan orang-orang yang masih memiliki hubungan dekat ditempatkan pada posisi-posisi yang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari pemiliknya. Misalnya posisi yang berhubungan dengan masalah uang. Pada umumnya para pekerja memiliki ketrampilan berdasarkan proses magang dengan bekerja pada tetangga atau saudara yang membutuhkannya. Mereka dilatih sambil bekerja oleh pemilik pelaku usaha. Pekerja seperti ini biasanya masih muda dan lulusan SD, SLTP atau SLTA.

Hubungan antara pemilik/pelaku usaha dengan pekerja yang masih baru biasanya dipenuhi oleh kesabaran dan toleransi terhadap kesalahan dalam bekerja. Terhadap pekerja magang ini pemilik usaha biasanya membimbing untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam mengerjakan pekerjaan. Tidak ada tindakan memutuskan hubungan kerja oleh pemilik unit usaha. Pada saat pekerja sudah semakin dewasa dan trampil biasanya akan keluar dengan sendirinya. Toleransi yang terbatas diberikan pada tindakan yang tidak jujur dalam bekerja. Lain halnya dengan pekerja yang sudah dewasa. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan bisa berakibat diputuskannya hubungan kerja.

4.2.2 Jaringan Sosial Untuk Mendapatkan Sumberdaya Ekonomi

Arisan merupakan cara untuk mendapatkan modal bagi pelaku IR pemula dan berkembang. Bagi pelaku IR maju, arisan lebih sering merupakan sarana untuk menjalin pergaulan. Di Lampung Selatan, hampir semua kegiatan pertemuan disertai dengan arisan, seperti PKK, pertemuan warga RT, pengelola pemerintahan desa, pengajian.

Hubungan perkawinan juga berperan dalam mendapatkan atau mempertahankan modal ekonomi. Pelaku usaha yang tidak memiliki cukup banyak modal satu hambatanannya adalah kesulitan untuk memproduksi pangan dalam jumlah yang besar untuk pesanan pasar. Hal ini disebabkan karena para *buyer* hanya membayar 30 persen sebagai uang muka. Sisa pembayaran baru diberikan segera setelah barang dikirim. Bagi pelaku IR pemula dan berkembang, termasuk juga pelaku IR maju yang tidak memiliki jaminan pinjaman bank, sulit baginya untuk memenuhi pesanan.

Modal Ekonomi. Para pelaku IR dalam industri rumahan sebagian besar memiliki hubungan-hubungan keluarga seperti orang tua-anak, kakak-adik, paman-kemenakan, dan sebagainya. Dasar dari hubungan-hubungan keluarga sebagai modal sosial di samping motif altruistik adalah kepercayaan. Keanggotaan dalam jaringan hubungan keluarga dapat memberikan sumber modal ekonomi baik uang maupun modal ekonomi yang lain. Namun demikian, ada batas-batas tertentu dimana hubungan keluarga bisa menjadi sumber untuk mendapatkan modal ekonomi. Modal ekonomi yang bisa diperoleh melalui hubungan-hubungan keluarga berupa pinjaman modal, warisan, pemberian bagian pekerjaan sub-kontrak dan penggunaan fasilitas bersama. Pinjaman berupa modal uang biasanya hanya dalam jumlah yang kecil. Untuk pinjaman dalam jumlah yang besar biasanya pelaku pinjam pada lembaga keuangan yang didominasi lembaga keuangan non formal. Pinjaman lewat hubungan biasanya dilakukan oleh seorang pelaku usaha pada pelaku usaha lain yang hubungannya sangat dekat, misalnya kakak-adik atau orang tua-anak. Warisan merupakan salah jalan bagaimana pengusaha bisa mendapatkan modal usaha. Sebagaimana pengusaha yang masih muda biasanya mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa unit usaha. Orang tua tersebut sudah lanjut usia kemudian mengurangi kegiatan usahanya dan memberikan sebagian usaha dan modalnya kepada anak-anaknya. Pemberian warisan usaha biasanya didahului oleh proses pelatihan dimana anak-anak membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dalam usaha orang tuanya.

Hubungan sub-kontrak banyak dilakukan oleh para pelaku IR. Pemberian bagian pekerjaan sub-kontrak terjadi dalam bentuk pelaku IR memberikan pekerjaan sub-kontrak pada orang yang masih memiliki hubungan keluarga dan penerima pekerjaan sub-kontrak memberikan lagi bagian pekerjaannya

kepada orang lain yang masih memiliki hubungan keluarga. Pertimbangan yang dijadikan dasar pemberian pekerjaan sub-kontrak ini adalah membantu keluarga. Namun demikian, ketrampilan dalam mengerjakan pekerjaan juga menjadi pertimbangan dalam memberikan sub-kontrak.

4.2.3 Keberlanjutan Jaringan Sosial

Keberlanjutan jaringan sosial yang ada di Kabupaten Lampung Selatan dipengaruhi oleh lingkungan institusional yang membentuk klaster IR. Lingkungan institusional ini membatasi tetapi sekaligus menjadi saluran untuk bertindak dalam mengejar kepentingan individu maupun kelompok IR. Lingkungan institusional berupa lembaga forum/koperasi dan kebijakan pemerintah.

Forum. Telah ada Forum Industri Rumahan Indah Rasa. Pembentukan forum IR ini secara formal merupakan respon dari telah diterimanya bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Pada awalnya, forum dibentuk oleh para anggota jaringan sosial yang terdiri dari sejumlah pelaku usaha.

Hubungan Pelaku Usaha dengan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah lewat OPD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait memainkan peranan penting dalam perkembangan industri rumahan. Awalnya pemberian bantuan oleh pemerintah diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan bantuan peralatan di bawah naungan Dinas setempat. Dalam hal ini Dinas PPPA dan forum berperan sebagai penghubung atau organisator lokal dalam pemberian bantuan atau pelatihan. Instansi pemberi bantuan Kementerian PPPA RI, Dinas PPPA, Disperindagkop tetapi juga Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, dan perguruan tinggi.

Dari gambaran jaringan sosial industri rumahan di atas, nampak model jaringan sosial dalam klaster IR yang berdasarkan pada hubungan-hubungan keluarga dan kesamaan tempat tinggal. Sebagian besar pelaku IR memiliki hubungan-hubungan keluarga. Hubungan-hubungan tersebut menampakkan diri dengan jelas pada saat-saat acara keluarga atau peralihan status dalam siklus hidup manusia (*rite of passage*) seperti kelahiran, memasuki masa dewasa, perkawinan dan kematian. Pada acara-

acara tersebut rumahtangga yang punya acara mengundang para tetangga maupun kenalan dan para kerabatnya untuk hadir.

Di Kabupaten Lampung Selatan (Desa Canti dan Desa Way Muli Timur) terdapat kegiatan bersama untuk kepentingan umum. Kegiatan bersama lain yang dilakukan adalah pertemuan tingkat RT. Kegiatan ini di dilaksanakan pada malam hari tiap 30 hari sekali. Pertemuan dihadiri para kepala rumah tangga atau wakilnya. Di Kabupaten Lampung Selatan juga terdapat kegiatan lain yang memungkinkan bertemunya banyak orang seperti gotong-royong atau kerja-bakti untuk perbaikan jalan, sambatan, dan peringatan Tujuh Belas Agustus, pembersihan makam, PKK, kelompok kesenian, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang dihadiri banyak orang tersebut di atas membentuk jaringan sosial yang padat dan merupakan modal sosial yang penting dalam mendukung kegiatan klaster industri rumahan. Hampir semua pelaku usaha menjadi anggota atau terlibat dalam lebih dari dua kelompok yang ada di dusun. Ketidakaktifan atau baik-buruknya perilaku seseorang dalam salah satu kegiatan bersama akan mudah diketahui. Hal ini menyebabkan orang merasa harus mengikuti semua kegiatan bersama. Saling mengenal di antara warga membuat norma-norma kelompok yang menjamin kepentingan bersama menjadi lebih ditaati dan solidaritas dapat dipertahankan. Perjumpaan-perjumpaan dalam kegiatan bersama juga merupakan sarana penting penyebaran informasi mengenai reputasi atau kepercayaan seseorang dalam berusaha atau urusan bisnis. Di samping lewat pengalaman pribadi, pengetahuan mengenai siapa pelaku usaha yang bisa diajak kerjasama, teknik baru olah pangan serta desain baru, bisa diperoleh lewat pertemuan-pertemuan tersebut. Lancar-tidaknya pelaku usaha dalam membayar pinjaman, atau dimana mereka meminjam, juga dapat diketahui lewat perjumpaan-perjumpaan seperti itu.

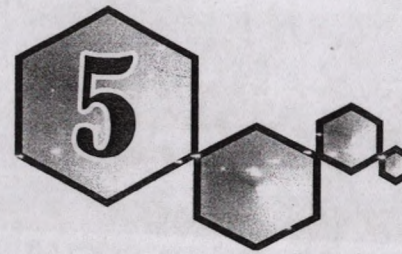
4.3. KESIMPULAN

Jaringan sosial yang padat dalam klaster industri rumahan nampak pada adanya berbagai kegiatan bersama dalam komunitas masyarakat desa. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut pelaku usaha, masyarakat saling mengenal satu sama lain. Saling mengenal lewat kegiatan bersama tersebut membuat para pelaku usaha mengenal pelaku usaha lain. Pekerja juga mengenal pekerja lain. Saling mengenail membuat reputasi para pelaku

usaha dan pekerja dalam kegiatan usaha mudah menyebar. Informasi mengenai pelaku usaha dan pekerja yang baik dan jujur mudah didapat. Hal ini membuat lebih mudah untuk mendapatkan pelaku usaha atau pekerja dengan siapa orang mau bekerjasama dan bertransaksi.

Telah ditunjukkan bagaimana jaringan sosial memudahkan pelaku usaha mendapatkan modal ekonomi dan pekerja, memudahkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Juga ditunjukkan bagaimana jaringan sosial yang memfasilitasi proses transaksi memungkinkan pengusaha menyesuaikan kegiatan usahanya secara lebih fleksibel terhadap naik-turunnya permintaan pasar, misalnya lewat diagregasi vertikal dan sub-kontrak.

-oo0oo-



PENUTUP

Reposisi administrasi publik dalam memahami *gender equality*, telah menjadi perspektif sentral dalam memahami kehadiran pemerintah (*Government*), cerdikiawan (Universitas) dan swasta (Bisnis/industri) untuk hadir, dan melahirkan inovasi kebijakan. Pemahaman *governance* menjadi penting, sebagai *tool* dan media untuk lahirnya inovasi kebijakan publik yang berkarakter kesetaraan dan keadilan bagi semua elemen masyarakat, terutama kelompok perempuan. Reposisi administrasi publik mengambil peran strategis dalam ketercapaian *gender equality*, karena fungsi pokoknya adalah merumuskan kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mengikat seluruh warga tanpa kecuali. Dengan menjadikan administrasi publik sensitif gender, maka perspektif *gender equality* dapat berjalan cepat dan efektif.

Berbagai isu-isu krusial gender bidang ekonomi, akan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan (*trust*) publik, terhadap hasil-hasil pembangunan, terutama hasilnya bagi kelompok perempuan. Adanya fenomena kegagalan strategi pengembangan model pemberdayaan ekonomi kelompok perempuan, dikarenakan strategi pengembangan dilakukan secara sporadis dan insidental, tidak berbasis model pembelajaran masyarakat sehingga dampak perkembangan usaha kelompok perempuan sulit dimonitor dan dievaluasi. Fakta pertumbuhan jenis usaha yang dikelola perempuan semakin pesat, meski kontribusi pada PDRB rendah, produktivitas pekerjaannya tertinggal, namun kelompok usaha yang dilakukan perempuan mampu me-

mainkan peran strategis meningkatkan dinamik ekonomi desa, utamanya dalam menyedot luapan tenaga kerja.

Pada bab-bab sebelumnya secara rinci dan mendalam berdasarkan hasil-hasil penelitian didukung oleh teori-teori yang relevan, telah diuraikan perspektif *gender equality* dan perspektif *sustainability development goals* (SDGs), sebagai sebuah konsep pemahaman dan payung makro dalam mewujudkan kesetaraan perempuan di bidang ekonomi. Implementasi kedua perspektif tergambar nyata dari pendekatan afirmatif melalui kebijakan industri rumahan (KIR), yang menampakkan peran dan kerja perempuan pelaku industri rumahan (IR), melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, sebagai wujud kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi. Strategi IR telah merubah terminologi pekerja rumahan dengan mensejajarkan industri rumahan perempuan yang terklasifikasi pada pelaku usaha mikro. Usaha Mikro sebagian besar dilakukan oleh perempuan, oleh sebab itu pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi menjadi sangat penting. Selanjutnya Inovasi kebijakan klaster menjadi output yang diharapkan memiliki strategi maksimal untuk mengembangkan wilayah dalam pemanfaatan potensi ekonomi.

Penerapan inovasi kebijakan klaster industri rumahan dimulai dengan pengukuran stratifikasi klaster, melalui pengkajian awal gambaran elemen-elemen penting bagi pembentukan klaster dan tipologi klaster, dapat berguna dan menjadi landasan bagi pengambil kebijakan untuk mempertimbangkan konsep dan bentuk klaster yang ideal untuk diterapkan bagi pelaku usaha kelompok perempuan. Model Triple Helix menjadi payung yang menghubungkan antara Universitas (*Intellectuals*), Bisnis/industri (*Business*), dan Pemerintah (*Government*) dalam kerangka bangunan pemberdayaan ekonomi. Gagasan model lahir sebagai strategi yang mendorong perkembangan klaster pada masing-masing stratifikasi perkembangan klaster. Konsep utama desain model kebijakan adalah spesialisasi /kekhurusan klaster industri rumahan (IR) dengan pendekatan *triple helix* yang mengkolaborasi peran universitas, *Business/industry* dan *Government* (ABG) dalam pengembangan klaster. Output, diperoleh desain strategi yang menyangkut kebijakan pemerintah yang diperlukan dan infrastruktur yang dibutuhkan, *capacity building* (kapasitas masyarakat) serta inovasi produk-produk dan pemasaran yang ditawarkan oleh sebuah klaster wilayah.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan klaster industri rumahan adalah dukungan jaringan sosial. Telah ditunjukkan bagaimana jaringan sosial memudahkan pelaku usaha mendapatkan modal ekonomi dan pekerja, memudahkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan. Juga ditunjukkan bagaimana jaringan sosial yang memfasilitasi proses transaksi memungkinkan pengusaha menyesuaikan kegiatan usahanya secara lebih fleksibel terhadap naik-turunnya permintaan pasar, misalnya lewat diintegrasikan vertikal dan sub-kontrak.

Berdasarkan beberapa kesimpulan di atas, dapat diajukan beberapa rekomendasi.

Pertama, kebijakan klaster adalah sebuah bentuk inovasi yang dibuat melalui proses penilaian kapasitas rintisan klaster. Pembentukan rintisan klaster dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan bahwa sentra industri rumahan perempuan, tersebut berpotensi untuk dikembangkan dari sentra menjadi klaster awal dan dikembangkan menjadi klaster yang dewasa. Intervensi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pola perkembangan yang terjadi secara alamiah, ini akan lebih baik karena dengan intervensi yang berlebihan dan dipaksakan, mengakibatkan kegagalan.

Kedua, Strategi kelembagaan klaster perlu dikuatkan, mengingat kelembagaan penting sebagai kekuatan kolektif yang dapat mendorong keinginan untuk tumbuh bersama, sehingga motif keinginan individu untuk mendapat keuntungan pribadi dari kebijakan yang sedang diimplementasikan dapat diminimalisir. Pemerintah perlu mendorong perkembangan sentra menjadi klaster yang ideal.

Ketiga, harus ada sinergi yang lebih harmonis antara akademisi, *Business*/pengusaha dan Pemerintah/*Government* dalam mengembangkan klaster industri rumahan perempuan, dan pemerintah perlu lebih memperhatikan perkembangan klaster.

Gender Equality

dan Inovasi Kebijakan Publik

Sebuah Model Inovasi Kebijakan Perintisan Klaster
dalam Pengembangan Industri Rumah Perempuan

Buku ini berisi tentang bagaimana upaya-upaya yang relevan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan, yang mampu membantu penanggulangan kemiskinan perempuan, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, pencegahan migrasi untuk menjadi TKI/TKW dengan pekerjaan informal, serta pencegahan trafficking. Juga, bagaimana strategi inovasi yang dilakukan bagi ketercapaian gender equality (kesetaraan ekonomi laki-laki dan perempuan). Pembahasan buku ini dilengkapi dengan Reposisi Administrasi Publik dalam memahami Gender Equality dengan basis Triple Helix dan pentingnya dukungan jaringan sosial. Pembahasan didasarkan hasil-hasil penelitian tim penulis, yang diperkuat dengan landasan teoritik yang relevan.



Dr. Novita Tresiana Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 September 1972. Menamatkan pendidikan Magister Ilmu Administrasi Publik di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawidjaya di Tahun 2000. Penulis merampungkan pendidikan doktoral pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Kekhususan Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Bandung pada Tahun 2012. Saat ini aktif sebagai Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi (Publik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.



Dr. Noverman Duadji, Lahir di Sumatera Selatan 03 November 1969. Menamatkan pendidikan Magister Ilmu Administrasi Publik di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawidjaya di Tahun 2001. Penulis merampungkan pendidikan doktoral pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Kekhususan Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Bandung pada Tahun 2012. Saat ini aktif sebagai Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi (Publik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Diterbitkan Atas Kerjasama dengan



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS LAMPUNG**

ISBN: 978-623-228-013-7



Gender Equality

dan Inovasi Kebijakan Publik

Sebuah Model Inovasi Kebijakan Perintisan Klaster dalam Pengembangan Industri Rumah Perempuan

Buku ini berisi tentang bagaimana upaya-upaya yang relevan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan, yang mampu membantu penanggulangan kemiskinan perempuan, penyerapan tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja, pencegahan migrasi untuk menjadi TKI/TKW dengan pekerjaan informal, serta pencegahan trafficking. Juga, bagaimana strategi inovasi yang dilakukan bagi ketercapaian gender equality (kesetaraan ekonomi laki-laki dan perempuan). Pembahasan buku ini dilengkapi dengan Reposisi Administrasi Publik dalam memahami Gender Equality dengan basis Triple Helix dan pentingnya dukungan jaringan sosial. Pembahasan didasarkan hasil-hasil penelitian tim penulis, yang diperkuat dengan landasan teoritik yang relevan.



Dr. Novita Tresiana Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 18 September 1972. Menamatkan pendidikan Magister Ilmu Administrasi Publik di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawidjaya di Tahun 2000. Penulis merampungkan pendidikan doktoral pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Kekhususan Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Bandung pada Tahun 2012. Saat ini aktif sebagai Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi (Publik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.



Dr. Noverman Duadji, Lahir di Sumatera Selatan 03 November 1969. Menamatkan pendidikan Magister Ilmu Administrasi Publik di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawidjaya di Tahun 2001. Penulis merampungkan pendidikan doktoral pada Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik, Kekhususan Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Bandung pada Tahun 2012. Saat ini aktif sebagai Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi (Publik) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Diterbitkan Atas Kerjasama dengan



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS LAMPUNG**

ISBN: 978-623-228-013-7

